



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS MASYARAKAT**

(Studi Kasus Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 013
Cipinang Melayu Jakarta Timur)

**Tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar**

**MAGISTER DALAM
ILMU LINGKUNGAN**

Amantya Koesrimardiyati
NPM: 0906505205

**PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA, JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Amantya Koesrimardiyati
NPM : 0906505205
Tanda Tangan : 
Tanggal : 12 Juli 2011

Halaman Pengesahan Tesis

Nama : Amantya Koesrimardiyati
NPM : 0906505205
Program Studi : Ilmu Lingkungan

Judul Tesis :
KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT
(Studi Kasus Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 013
Cipinang Melayu Jakarta Timur)

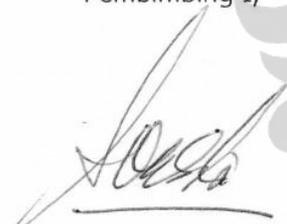
Tesis ini telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Penguji Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia pada 11 Juli 2011 dan telah dinyatakan LULUS ujian komprehensif dengan Yudisium *cum laude*.

Jakarta, 12 Juli 2011

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

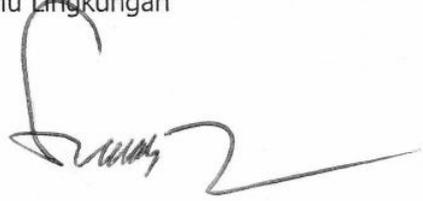

Dr. dr. Tri Edhi Budhi Soesilo, MSi


Dr. E. Kristi Poerwandari

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Ilmu Lingkungan

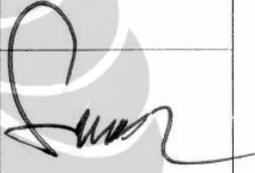
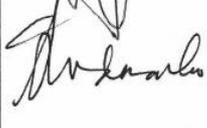

Prof. dr. Haryoto Kusnopranto, SKM, Dr. PH

Halaman Pengesahan oleh Komisi Penguji

Nama : Amantya Koesrimardiyati
NPM/Angkatan : 0906505205/28
Kekhususan : Ekologi Manusia

Judul Tesis :
KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT
(Studi Kasus Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 013
Cipinang Melayu Jakarta Timur)

Komisi Penguji Tesis

NO.	Nama Lengkap dan Gelar Akademik	Keterangan	Tanda Tangan
1.	Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM, Dr. PH	Ketua Sidang	
2.	Dr. Suyud Warno Utomo, MSi	Sekretaris Sidang	
3.	Dr.dr.Tri Edhi Budhi Soesilo, MSi	Pembimbing	
4.	Dr. E. Kristi Poerwandari, M.Hum	Pembimbing	
5.	Prof.Dr.Ir.Sulistyoweni WIdanarko, SKM	Penguji Ahli	

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amantya Koesrimardiyati
NPM : 0906505205
Program Studi : Kajian Ilmu Lingkungan
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
(Studi Kasus Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di
RW 13 Cipinang Melayu)**

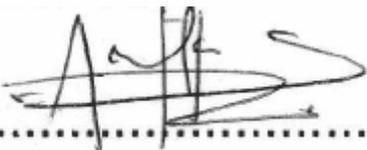
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Juli 2011

Yang Menyatakan,



.....

(Amantya Koesrimardiyati)

BIODATA PENULIS

Nama : Amantya Koesrimardiyati, S.sos
Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 14 Maret 1984
Alamat : Kav. Agraria no.53 RT 002/106 Duren Sawit
Jakarta
Status : Belum menikah
Email : amantya_k@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

2001-2006 S1 Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
1998-2001 SMUN 70 Jakarta
1995-1998 SMPN 68 Jakarta
1989-1995 SDI Al-Ikhlas Jakarta

Pengalaman Kerja :

2006 PT. Ekspresindo Global Artha
(Public Relations Officer)
2007-2009 Singapore Airlines, Ltd
(Flight Stewardess)

ABSTRAK

Nama : Amantya Koesrimardiyati
NPM : 0906505205
Program Studi : Ilmu Lingkungan
Judul Tesis : Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur)

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi telah menyebabkan volume timbulan sampah rumah tangga di DKI Jakarta meningkat. Permasalahan persampahan kemudian semakin serius ketika peningkatan tersebut tidak disertai dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan sampah yang lebih komprehensif, dilandaskan pada prinsip "*reduce, reuse, recycle*". Penelitian ini bertujuan untuk memahami keberlanjutan suatu kegiatan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, dengan mengambil tempat di wilayah RW 13 Cipinang Melayu Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mendorong perubahan perilaku warga dan pengorganisasian masyarakat menuju pengelolaan sampah mandiri, salah satunya dapat dicapai melalui penyelenggaraan program Jakarta *Green and Clean*, yang diselenggarakan oleh swasta, bekerja sama dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Pengorganisasian masyarakat dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan dalam wilayah sosial yang kecil, yaitu di tingkat komunitas, untuk kemudian dikembangkan dan diperluas ke wilayah lain. Peran aktif perempuan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat karena peran sosial perempuan telah membuat dirinya lebih dekat dengan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya sehingga mereka berusaha mempertahankan kelestariannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga.

Kata kunci: pengelolaan sampah, Jakarta *Green and Clean*, pengorganisasian masyarakat, peran perempuan

ABSTRACT

Name : Amantya Koesrimardiyati
Student : 0906505205
Programme of Study : Environmental Sciences
Thesis Title : Sustainability of Community-based Municipal Waste Management (Case Study in Women's Role on Environmental Waste Management Practice in RW 13 Cipinang Melayu Jakarta Timur)

Population growth and changes in consumption pattern have increased the municipal waste volume in DKI Jakarta. Waste management issue has been more formidable after the government has failed to overcome the situation with sufficient waste management facilities. Hence, society's active participation is needed to create a more comprehensive system of municipal waste management, based on "reduce, reuse, recycle" principle. This research is purposed to comprehend about the sustainability of a community-based municipal waste management practice, placed in RW 13 Cipinang Melayu. Results indicated that one means to stimulate behavioural change and community organizing in practicing a self-supporting municipal waste management is through engaging a program called Jakarta Green and Clean, held by a private company, in association with DKI Jakarta Environmental Board, and environmental organization. Community organizing will be working effectively when it takes place in a small community unit, then to be expanded to another area. Women's active role is very important to the sustainability of community-based municipal waste program since their social roles have made themselves feel attached to their living environment so they make an attempt to preserve it. Based on these findings, it can be concluded that community-based municipal waste management will be sustaining when there is a behavioural change of its people in practicing a self-supporting municipal waste management along with women-centred community organizing in community level, which one of the unit is Rukun Warga.

Keywords: municipal waste management, Jakarta Green and Clean, community organizing, women's role.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, hanya karena rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister dalam ilmu lingkungan. Penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan sumbangan wawasan baru bagi perkembangan ilmu lingkungan. Setelah melalui proses yang panjang, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. dr. Tri Edhi Budi Soesilo, Msi selaku dosen pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, serta memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam penyusunan dan pemahaman substansi tesis ini.
- (2) Dr. Elizabeth Kristi Poerwandari selaku dosen pembimbing II tesis yang telah memberikan banyak ilmu, masukan, ide, dan koreksi selama proses bimbingan, terutama yang berkaitan dengan kajian gender.
- (3) Prof. Dr. Haryoto Kusnoputranto, SKM, Dr. PH, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Lingkungan UI, atas berbagai inspirasi dan ilmu yang diberikan.
- (4) Prof. Dr. Ir. Sulistyoweni Widanarko, SKM sebagai penguji ahli, atas masukan dan koreksinya untuk penyempurnaan tesis ini.
- (5) Dr. Suyud Warno Utomo, Msi selaku sekretaris sidang atas masukan dan ide dalam menyempurnakan tesis ini.
- (6) Ibu Rahayu Istari Wahyudi dan Ibu Homsatin dari RW 13 Cipinang Melayu yang memberikan banyak bantuan dan dukungan selama proses penelitian dan penyusunan tesis.
- (7) Semua informan dan penduduk di RW 13 Cipinang Melayu atas kerjasama dan kebersamaan selama penelitian ini.
- (8) *Mbak* Ani Soecipto yang sudah menyediakan waktunya untuk memberikan masukan dan ide untuk penyusunan tesis ini.

- (9) Patria Pinandita Ginting Suka, teman diskusi penulis sekaligus "pembimbing III" penulisan tesis ini.
- (10) *Mbak* Donna Asteria atas waktunya untuk saling berbagi dan bertukar informasi dalam penyusunan tesis ini.
- (11) *Mas* Desrates Iskandar atas masukan dan kritisinya yang membangun untuk penyelesaian tesis ini.
- (12) Seluruh teman-teman di Program Studi Ilmu Lingkungan UI, terutama angkatan 28A Reguler: Arika, Haris, Riko, Gorba, Herman, Anas, Riodes, Ferra, *Mas* Budi, *Mas* Joko, *Pak* Miura, dan Dhaka atas kerja sama dan semangat yang diberikan selama ini.
- (13) Seluruh staf administrasi dan akademik Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia yang telah membantu kelancaran penulis semasa studi (*Bu* Irna, *Bu* Erni, *Pak* Udin, *Mas* Nasrullah, dan *Mas* Juju).
- (14) Secara khusus, penulis haturkan terima kasih untuk Ibunda dan Ayahanda tercinta, Ibu Bina Prasatyawati dan Bapak Herman Sutopo, serta adik-adik penulis, Bramandityo Adhi Baskoro dan Citra Septriana, atas doa, bantuan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
- (15) Akhmad Emir Farabie, atas dukungan dan kesabarannya. *Je t'aime énormément.*
- (16) Sahabat-sahabatku: Lukman, Olyvia, Eka, Feri & Wulan, Randy, Indi, Fitri, Sunu, Tantri, dan Rini atas hiburannya selama penulis menyelesaikan tesis ini.
- (17) Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis berharap Allah swt berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Jakarta, 20 Juni 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pernyataan Orisinalitas.....	ii
Halaman Pengesahan Tesis.....	iii
Halaman Pengesahan oleh Komisi Penguji.....	iv
Biodata Penulis.....	v
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	vi
Abstrak.....	vii
<i>Abstract</i>	viii
Kata Pengantar.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Singkatan.....	xv
Ringkasan.....	xvii
<i>Summary</i>	xix
1.PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Perumusan Masalah	4
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Manfaat Penelitian.....	6
2.TINJAUAN KEPUSTAKAAN	7
2.1.Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat.....	7
2.2.Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga	12
2.2.1.Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	12
2.2.2.Pengolahan Sampah Rumah Tangga.....	16
2.3.Pengorganisasian Masyarakat.....	19
2.4.Gender dan Lingkungan Hidup	24
2.4.1.Perempuan dan Perubahan Lingkungan Hidup.....	24
2.4.2. Pengorganisasian Masyarakat yang Terpusat pada Perempuan ...	27
2.5.Program JGC.....	29
2.5.1.Bentuk Kompetisi dan Penilaian JGC	30
2.5.2. Perkembangan JGC (2006-2010).....	32
2.6.Kerangka Teoretik.....	33
2.7.Kerangka Pikir.....	34
2.8.Kerangka Konsep	36
2.9.Hipotesis Pengarah.....	36
3.METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian	37
3.2. Lokasi Penelitian	38
3.3. Informan Penelitian.....	38
3.4. Konsep Penelitian.....	41
3.5. Data Penelitian	41
3.5.1. Sumber Data.....	41
3.5.1.1.Data Primer	41
3.5.1.2.Data sekunder	43
3.5.2. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data	43
3.5.2.1.Studi dokumen dan gambar visual	43

3.5.2.2.Observasi	44
3.5.2.3.Wawancara.....	45
3.5.3.Analisis Data	46
3.5.3.1.Penulisan Transkrip	46
3.5.3.2.Reduksi Data	47
3.5.3.3. <i>Coding</i> Data.....	48
3.5.3.4.Pemahaman	50
3.5.3.5.Penarikan Kesimpulan.....	50
3.5.4.Validitas dan Reliabilitas.....	50
3.5.3. Kegiatan di Lapangan	51
4.HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1. Gambaran Umum Wilayah RW 13 Cipinang Melayu	53
4.1.1. Letak Geografis	53
4.1.2. Demografi	53
4.1.3. Kondisi Lingkungan	54
4.2. Pengelolaan Sampah Mandiri oleh Warga RW 13 Cipinang Melayu.....	56
4.2.1. Periode pra-JGC 2008	56
4.2.1.1. Kelembagaan/organisasi	56
4.2.1.2 Teknik/operasional	56
4.2.1.3. Pembiayaan.....	58
4.2.1.4. Partisipasi.....	59
4.2.1.5. Peraturan	60
4.2.2. Periode pasca-JGC 2008.....	60
4.2.2.1.Kelembagaan/Organisasi.....	60
4.2.2.2.Teknik/Operasional.....	63
4.2.2.3.Pembiayaan	70
4.2.2.4.Partisipasi.....	72
4.2.2.5.Peraturan	73
4.3. Pengorganisasian Masyarakat RW 13 Cipinang Melayu	75
4.3.1. Periode Prakarsa Masyarakat.....	75
4.3.2. Periode Intervensi dari Luar	79
4.3.3. Periode Pengembangan dan Perluasan Jaringan.....	83
4.4. Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 13 Cipinang Melayu	89
4.4.1.Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	89
4.4.2.Peran Perempuan RW 13 Cipinang Melayu dalam Gerbang Darling	94
4.5. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di RW 13 Cipinang Melayu	107
5.KESIMPULAN.....	117
5.1.Kesimpulan.....	117
5.1.Saran.....	118
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Beberapa Wilayah di Indonesia.....	10
Tabel 3.1. Matriks Konsep Penelitian dan Metodenya.....	42
Tabel 3.2. Contoh Coding.....	49
Tabel 4.1. Penggolongan Besar Iuran Kebersihan di RW 13 Cipinang Melayu...58	
Tabel 4.2. Perbandingan Kegiatan Pengelolaan Sampah RW 13 Cipinang Melayu Sebelum dan Sesudah Program JGC.....	62
Tabel 4.3. Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di RW 13 Cipinang Melayu.....	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Hubungan antara Tiga Komponen Pembentuk Lingkungan Hidup..	11
Gambar 2.2. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (SNI 19-2454-2002).....	14
Gambar 2.3. Kerangka Teoretik.....	33
Gambar 2.4. Kerangka Pikir.....	35
Gambar 2.5. Kerangka Konsep.....	36
Gambar 4.1. Pengelolaan Sampah RW 13 Cipinang Melayu sebelum Program JGC 2008.....	61
Gambar 4.2. Pengelolaan Sampah RW 13 Cipinang Melayu setelah Program JGC 2008.....	61
Gambar 4.3. Susunan Kepengurusan Gerbang Darling RW 13 Cipinang Melayu.	63
Gambar 4.4. Diagram Susunan Kepengurusan PKK RW 13 Cipinang Melayu.....	92



DAFTAR SINGKATAN



3R	: <i>Reduce, reuse, recycle</i>
ACT	: Aksi Cepat Tanggap
AD	: Anggaran Dasar
ADB	: <i>Asia Development Bank</i>
ALGAS	: <i>Asian Least-cost Greenhouse Gas Abatement Strategy</i>
ART	: Anggaran Rumah Tangga
BGC	: Bandung <i>Green and Clean</i>
BKB	: Bina Keluarga Balita
BOISCA	: <i>Bioactivator - Organization for Industrial Spiritual and Cultural Advancement</i>
BPLHD	: Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	: Badan Pusat Statistik
CH ₄	: Gas metana
CO ₂	: Karbon dioksida
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
DBD	: Demam Berdarah Dengue
Gerbang Darling	: Gerakan Bangsa Sadar Lingkungan
GRK	: Gas Rumah Kaca
JGC	: Jakarta <i>Green and Clean</i>
K3	: Kebersihan, Keindahan, Ketertiban

KK	: Kepala Keluarga
MDGs	: <i>Millenium Development Goals</i>
MGC	: Makassar <i>Green and Clean</i>
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
PHBS	: Perilaku hidup bersih dan sehat
PIK	: Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Pokja	: Kelompok kerja
Pokus	: Kelompok khusus
Posyandu	: Pos pelayanan terpadu
PSN	: Pemberantasan sarang nyamuk
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SGC	: Surabaya <i>Green and Clean</i>
SNI	: Standar Nasional Indonesia
TPA	: Tempat Pemrosesan Akhir
TPS	: Tempat Pembuangan Sementara
TPST	: Tempat Pembuangan Sampah Terpadu
UP2K	: Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga
YGC	: Yogyakarta <i>Green and Clean</i>

(RINGKASAN)

Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia Tesis, Juni 2011

- A. Nama : Amantya Koesimardiyati
- B. Judul tesis : Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Peran Perempuan Dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur)
- C. Jumlah halaman : Halaman permulaan 20, halaman isi 126, Gambar 8, Tabel 4, lampiran 33

Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi telah menyebabkan volume timbulan sampah rumah tangga di DKI Jakarta meningkat. Sebagai ibukota negara, jumlah penduduk yang besar di wilayah provinsi DKI Jakarta telah menyumbang sampah yang sangat besar pula. Permasalahan persampahan kemudian semakin serius ketika peningkatan tersebut tidak disertai dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan sarana pengelolaan sampah yang memadai. Sementara itu, PT Unilever Indonesia Tbk., bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta beserta beberapa media dan lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup, telah menyelenggarakan program Jakarta *Green and Clean* yang diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif dari masyarakat untuk menciptakan suatu sistem pengelolaan sampah yang lebih komprehensif, dilandaskan pada prinsip "*reduce, reuse, recycle*".

Keberhasilan warga RW 13 Cipinang Melayu dalam mempertahankan posisinya di urutan tiga besar dalam kompetisi Jakarta *Green and Clean* di tahun 2008, 2009, dan 2010, dengan melibatkan perempuan sebagai agen utamanya, menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta membutuhkan suatu sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang berbasis masyarakat untuk mengatasi peningkatan timbulan sampah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu sebelum dan sesudah mengikuti program Jakarta *Green and Clean*; (2) Menjelaskan upaya pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh warga RW 13 Cipinang Melayu sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program Jakarta *Green and Clean* tahun 2008, 2009, dan 2010; (3) Menjelaskan peran perempuan RW 13 Cipinang Melayu dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tersebut; dan (4) Memahami keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilakukan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: (1) Memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu lingkungan, menambah wawasan dan pengetahuan bagi

peneliti, khususnya dari sudut pandang gender; (2) Menginformasikan kepada masyarakat, pada umumnya, dan akademisi, pada khususnya, tentang pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan, serta (3) Memberikan jalan bagi penelitian lebih lanjut mengenai topik-topik terkait.

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan paradigma kualitatif, dengan metode *explanative case study*. Metode penentuan informan yang digunakan adalah metode *combination purposive sampling*, yaitu menggabungkan beberapa strategi *purposive sampling* (Patton, 1990), yang dalam hal ini adalah *criterion sampling* dan *snowball sampling*. Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah studi dokumen dan gambar visual, observasi, dan wawancara mendalam. Untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Langkah-langkah yang dilakukan dalam teknik ini adalah: (1) Penulisan transkrip; (2) Reduksi data; (3) *Coding data*; (4) Pemahaman; (5) Penarikan kesimpulan; serta (6) Validitas dan reliabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang mendasar di dalam kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu sesudah mengikuti program Jakarta Green and Clean. Pengelolaan sampah di wilayah tersebut tidak lagi hanya mengandalkan jalur konvensional melalui TPS dan TPST, tetapi juga dengan memanfaatkan bank sampah, teknik pengomposan dan pengolahan sampah kering untuk mengurangi volume sampah yang terbuang. Untuk mendorong perubahan perilaku warga dan pengorganisasian masyarakat menuju pengelolaan sampah mandiri, salah satunya dapat dicapai melalui penyelenggaraan program Jakarta *Green and Clean*. Pengorganisasian masyarakat dapat berjalan secara efektif apabila dilakukan dalam wilayah sosial yang kecil, yaitu di tingkat komunitas, untuk kemudian dikembangkan dan diperluas ke wilayah lain. Peran aktif perempuan sangat penting untuk keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat karena peran sosial perempuan telah membuat dirinya lebih dekat dengan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggalnya sehingga mereka berusaha mempertahankan kelestariannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat terus berlanjut apabila terjadi perubahan perilaku warga yang mengelola sampahnya secara mandiri dengan disertai pengorganisasian masyarakat yang berpusat pada perempuan di tingkat komunitas, yang salah satu unitnya adalah Rukun Warga.

Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu dikembangkan lebih lanjut melalui beberapa strategi, yaitu: (1) Perencanaan harus dilakukan secara matang dan terfokus, baik dari segi waktu maupun finansial; (2) Proses kaderisasi terhadap generasi yang lebih muda harus terus dilakukan, dengan menciptakan inovasi-inovasi program kegiatan yang dapat menarik minat warga yang lebih muda; (3) Perlu dilakukan berbagai kegiatan publikasi dan perluasan jaringan ke wilayah lain; dan (4) Kegiatan pengelolaan sampah mandiri harus dikembangkan secara serius menjadi kegiatan produksi yang mendatangkan keuntungan yang tetap bagi kader dan warga secara umum.

Daftar Kepustakaan: 97 (dari tahun 1977-2011)

xviii

(SUMMARY)

Programme of Study in Environmental Sciences Postgraduate Programme University of Indonesia Thesis, June 2011

- A. Name : Amantya Koesrimardiyati
- B. Thesis title : Sustainability of Community-based Municipal Waste Management (Case Study in Women's Role on Environmental Waste Management Practice in RW 13 Cipinang Melayu Jakarta Timur)
- C. Number of pages : Initial pages 20, contents 126, figures 8, tables 4, appendices 33

Population growth and changes in consumption pattern has increased the volume of municipal solid waste in DKI Jakarta. As a capital city, a large amount of population as well contributes in immense number of waste. Waste management issue has been more formidable after the government has failed to overcome the situation with sufficient waste management facilities. Meanwhile, PT. Unilever Indonesia, Tbk., in association with DKI Environmental Board, together with some media partners and environmental organization, held the Jakarta Green and Clean program, in order to encourage active participation from the society to create a more comprehensive system of municipal waste management, based on "reduce, reuse, recycle" principle.

The success of RW 13 Cipinang Melayu community in maintaining their position as the big three in Jakarta Green and Clean competition in 2008, 2009, and 2010, by involving women as their main agent, has shown that DKI Jakarta society need a sustainable system of community-based municipal waste management. Therefore, this research is purposed for: (1) Explaining the municipal waste management practice performed by RW 13 Cipinang Melayu community, before and after engaging in Jakarta Green and Clean program; (2) Explaining the community organizing effort in municipal waste management by RW Cipinang Melayu community that they are able to maintain their position as the big three in Jakarta Green and Clean program in 2008, 2009, and 2010; (3) Explaining the women's role in waste management practice in RW 13 Cipinang Melayu; (4) Comprehending the sustainability of community-based municipal waste management practice by RW 13 Cipinang Melayu community. This research is expected to contribute as follow: (1) Contributing knowledge in developing environmental science, adding insight and comprehension for researchers, especially from gender perspective; (2) Informing the society, in general, and academics, in particular, about the importance of women's role in sustainable community-based waste management; and (3) Giving ways to further research in related topics.

This research has been conducted according to qualitative paradigm, using explanative case study method. Informant sampling method used in this research is combination purposive sampling, combining a few purposive sampling

xix

strategies (Patton, 1990), which in this case are criterion sampling and snowball sampling. Researcher used literature and visual record study, observation, and in-depth interview as research instruments. This research was using qualitative content analysis in drawing the conclusion and answering research questions. The steps are: (1) Transcript writing; (2) Data reduction; (3) Data coding; (4) Data comprehension; (5) Conclusion making; and (6) Validity and reliability.

This research shows that there are fundamental changes in municipal waste management practice by RW 13 Cipinang Melayu after engaging in Jakarta Green and Clean program. The management in this particular area is no longer depend on conventional manners through TPS and TPST, but also by making use of waste bank, composting, and recycled material crafting to reduce the waste volume. In order to stimulate behavioural change and community organizing in practicing a self-supporting municipal waste management is through engaging a program called Jakarta Green and Clean. Community organizing will be working effectively when it takes place in a small community unit, then to be expanded to another area. Women's active role is very important to the sustainability of community-based municipal waste program since their social roles have made themselves feel attached to their living environment so they make an attempt to preserve it. Based on these findings, it can be concluded that community-based municipal waste management will be sustaining when there is a behavioural change of its people in practicing a self-supporting municipal waste management along with women-centred community organizing in community level, which one of the unit is Rukun Warga.

Community-based waste management practice needs to be developed further through some strategies as follow: (1) Planning has to be done appropriately, both in time and financial aspects; (2) Regeneration process to the younger people has to be conducted continuously, by creating other program innovations which may attract them to participate; (3) Publication and network expanding need to be maintain; (4) Self-supporting municipal waste management has to be developed into entrepreneurship which can make profit for the agents and community in general.

Number of reference: 97 (issued from 1977 to 2011)

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai ibukota negara, jumlah penduduk yang besar di wilayah provinsi DKI Jakarta telah menyumbang sampah yang sangat besar pula. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, total jumlah penduduk di DKI Jakarta sebesar 9.588.198 jiwa (Triyono, 2010) dan volume timbulan sampah di DKI Jakarta telah mencapai 29.676,24 m³ atau 6.594,72 ton/hari (Nasir, 2010). Komposisinya terdiri atas 65% sampah organik dan 35% sampah non-organik. Berdasarkan komposisinya, sumber sampah DKI Jakarta berasal dari (Nasir, 2010): industri 8,97%, perkantoran 27,35%, sekolah 5,32%, pasar 4%, pemukiman 52,97%, lainnya 1,4%. Besarnya beban sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil. Baru sekitar 10% yang didaur ulang atau dibuat kompos, sisanya sekitar 60% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan 30% dibiarkan di tempat penampungan sementara (TPS), termasuk TPS ilegal (Budisantoso, 2011). Belum lagi, berdasarkan pengamatan, ada sekitar 15,3% sampah di Jakarta dibuang secara sembarangan (BPLHD DKI, 2009a).

Usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta selama ini dalam penanganan sampah dan tugas pokok lainnya dipandang masih belum optimal (Djarmiko, 2009). Tindakan penanganan sampah yang kurang baik berakibat buruk terhadap lingkungan hidup, baik pada tanah, air, dan udara. Air lindi (*leachate*) yang terbentuk dalam timbunan sampah yang menumpuk di TPS/TPST, termasuk TPS ilegal, mengandung pencemar khususnya zat organik yang sangat tinggi, sehingga berpotensi mencemari air tanah (Imansyah, 2009). Pembakaran sampah yang dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah dapat mencemari udara dan meningkatkan produksi gas rumah kaca, terutama karbondioksida dan gas metana. Satu ton sampah padat diperkirakan dapat menghasilkan 50 kg gas metana (CH₄) dan daya rusaknya terhadap lapisan ozon mencapai 21 kali dari karbondioksida (CO₂) (Kementerian Lingkungan Hidup, 2008a). Timbunan sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menjadi tempat berkembangbiaknya parasit, bakteri, dan patogen serta sarang vektor

penyakit seperti tikus, lalat, kecoa, dan nyamuk (Tobing, 2005). Berbagai penyakit yang dapat muncul karena sampah yang tidak dikelola antara lain adalah diare, disentri, cacingan, malaria, kaki gajah (*elephantiasis*) dan demam berdarah. Sampah juga menjadi penyebab utama banjir di wilayah DKI Jakarta, sebagai akibat dari buruknya sistem drainase dan sungai (Jurnal Nasional, 2010). Secara estetis, timbunan sampah juga memberikan pemandangan yang buruk dan menimbulkan bau yang tidak sedap.

Sementara itu, pemerintah dituntut untuk berkomitmen dalam upaya mencapai target MDGs di tahun 2015, yang antara lain menjamin keberlanjutan lingkungan hidup (Stalker, 2008). Untuk mencapai salah satu butirnya, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses, maka disusun Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yaitu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan (Keputusan Menteri Kesehatan No.852/Menkes/ SK/IX/2008/2008), antara lain dengan mengelola sampah secara benar. Sejalan dengan strategi nasional tersebut, diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah non-konvensional yang melibatkan peran serta masyarakat di dalam pelaksanaannya, dengan mengembangkan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) yang hingga tahun 2009 berhasil mengurangi sampah sebanyak 7% dari total volume timbulan sampah, dan pada tahun 2012 ditargetkan dapat mengurangi sampah sebesar 12%-15% (Nasir, 2010). Selain itu, berdasarkan data KLH pada tahun 2008, sampah yang diolah menjadi kompos dari produksi sampah tersebut mencapai hampir 5% atau 12.800 ton/hari (Junaedy, 2009).

Salah satu kegiatan yang mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah diselenggarakan secara konsisten adalah program Jakarta *Green and Clean* (JGC). Sejak tahun 2006, PT Unilever Indonesia Tbk. – melalui Yayasan Unilever Indonesia, sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang juga berupaya untuk membidik peran perempuan, bersama mitra strategisnya Radio 99,1 Delta FM Jakarta, Harian Republika, Aksi Cepat Tanggap (ACT), dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mencanangkan program tersebut dengan memadukan antara program

pengelolaan sampah mandiri dan kompetisi lingkungan tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-DKI Jakarta (BPLHD, 2009b). Pada tahun 2009, peserta yang berhasil dinobatkan sebagai juara umum untuk kategori wilayah maju adalah RW 13 Cipinang Melayu Jakarta Timur. Di tahun 2008, wilayah ini meraih *runner-up* pertama untuk kategori wilayah berkembang. Kemudian pada tahun 2010, RW 13 mendampingi dua RW lainnya yang berkategori wilayah berkembang meraih gelar *runner-up* kedua atas nama kelurahan Cipinang Melayu.

Keberlanjutan kegiatan ini dapat dilihat dari segi pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Pengorganisasian pengelolaan sampah berbasis masyarakat di RW 13 Cipinang Melayu antara lain ditunjukkan dalam proses kaderisasi dan pembiayaan kegiatan yang sudah mampu swadana. Dari segi pelaksanaan, kegiatan pengomposan, pengolahan sampah kering, dan bank sampah masih terus berlangsung hingga saat ini dan lebih difokuskan pada aspek *recycle* dari konsep 3R. Kini, setelah tidak lagi menjadi peserta dalam program JGC, kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah ini masih terus berjalan. Adapun pengawasan dan evaluasi dilakukan secara sinergis dengan lembaga RW dalam pertemuan rutin warga serta pengawasan rutin dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur, paguyuban JGC, dan media.

Keberhasilan RW 13 Cipinang Melayu mempertahankan posisinya tersebut didukung oleh peran aktif warga perempuan sebagai kader lingkungan yang mewakili wilayah tersebut dalam seluruh rangkaian program JGC. Peranan perempuan memang menjadi salah satu faktor penting yang mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Sukaedi, 1996). Hal ini didukung oleh penelitian Handayani (2008), yang menemukan bahwa kaum perempuan merupakan inisiator dan motor dari perkembangan pengelolaan sampah di wilayah tempat tinggalnya. Namun demikian, perhatian publik pada isu persampahan selama ini cenderung lebih memperhatikan masalah pemulung, TPA, pencemaran, dan lain-lain, sementara peran perempuan tidak tersentuh secara optimal (Muta'ali, 2003).

Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat tidak hanya dilakukan di wilayah RW 13 Cipinang Melayu saja, melainkan juga di wilayah lainnya seperti di

wilayah RW 01 Rawasari, Jakarta Pusat, dan RW 03 Rawajati, Jakarta Selatan. Kedua wilayah tersebut pernah mengikuti program JGC di tahun 2006 dan berurutan meraih juara II dan III, namun tidak lagi berhasil meraih gelar di program JGC berikutnya. Adapun RW 01 Rawasari dan RW 03 Rawajati mendapatkan bantuan teknis dan finansial dari lembaga pemerintah: RW 01 Rawasari memiliki TPST berskala komunal hasil binaan Pusat Teknologi Lingkungan-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang saat ini pengelolaannya diambil alih oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta (Kompas.com, 2010a); sedangkan RW 03 Rawajati lebih memfokuskan diri sebagai kawasan agrowisata dengan penanaman tanaman obat keluarga (TOGA), di bawah asuhan Dinas Pertanian dan Kehutanan DKI Jakarta (JakTV, 2010).

Dengan demikian, hanya wilayah RW 13 Cipinang Melayu saja yang sejak tahun 2007 secara penuh dibina oleh Yayasan Unilever Peduli, dengan peran pemerintah terbatas pada penyediaan sarana pengelolaan sampah dan pengawasan rutin. Di samping itu, di antara ketiga wilayah tersebut, hanya RW 13 Cipinang Melayu yang sepenuhnya sudah berkembang dengan mengandalkan warga perempuannya sendiri, sedangkan RW 01 Rawasari telah mengupah karyawan dari luar wilayah, dan kegiatan pengelolaan sampah di RW 03 Rawajati masih dikembangkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan pengelolaan sampah di wilayah ini mencakup tiga aspek yang sejalan dengan tujuan MDGs, yaitu peningkatan peran perempuan, pelestarian lingkungan hidup, dan kemitraan swasta dalam pembangunan.

1.2. Perumusan Masalah

Pengelolaan sampah rumah tangga belum menjadi prioritas di dalam kegiatan masyarakat perkotaan saat ini. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi telah mengarah pada peningkatan volume sampah di kota besar seperti DKI Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan sampah berkelanjutan yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat. Salah satu kegiatan yang dapat merangsang partisipasi masyarakat tersebut adalah program JGC, yang dirumuskan bersama-sama oleh pihak swasta, BPLHD, dan LSM sebagai salah satu kegiatan yang dapat mendorong perubahan perilaku

masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah sekaligus membangun sarana teknis dan finansial yang dapat mendukung pelaksanaannya.

RW 13 Cipinang Melayu adalah satu-satunya wilayah yang berhasil mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program JGC. Namun, bentuk kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan di wilayah tersebut sebelum dan sesudah mengikuti JGC belum diketahui. Selain itu, kegiatan pengorganisasian masyarakat RW 13 Cipinang Melayu dalam hal mencapai keberhasilan tersebut juga belum diketahui. Hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa upaya peningkatan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah DKI Jakarta masih belum difokuskan pada peran perempuan, padahal perempuan memiliki peran yang sangat besar di dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan permasalahan utama:

Mengapa warga RW 13 Cipinang Melayu dapat secara berlanjut melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat?

Dan pertanyaan turunannya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu sebelum dan sesudah mengikuti program Jakarta *Green and Clean*?
2. Bagaimana warga RW 13 Cipinang Melayu mengorganisasikan diri sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program Jakarta *Green and Clean* tahun 2008, 2009, dan 2010?
3. Bagaimana perempuan RW 13 Cipinang Melayu berperan dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu sebelum dan sesudah mengikuti program Jakarta *Green and Clean*.

2. Menjelaskan upaya pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh warga RW 13 Cipinang Melayu sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program Jakarta *Green and Clean* tahun 2008, 2009, dan 2010.
3. Memahami peran perempuan RW 13 Cipinang Melayu dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.
4. Memahami keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dilakukan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain:

1. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu lingkungan, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, khususnya dari sudut pandang gender.
2. Menginformasikan kepada masyarakat, pada umumnya, dan akademisi, pada khususnya, tentang pentingnya peran perempuan dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
3. Memberikan jalan bagi penelitian lebih lanjut mengenai topik-topik terkait.

2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Pengelolaan sampah kini telah menjadi isu global, dengan menilik pada upaya berbagai pihak dalam mengembangkan berbagai pilihan teknologi untuk menemukan alternatif yang memungkinkan dalam pengumpulan dan pembuangan sampah yang tepat guna (Bulle, 1999). Pandangan konvensional menyebutkan bahwa hanya pengelolaan oleh swasta atau publik yang paling efisien dalam pengelolaan sampah terlepas dari sifat sumber yang harus dikelola dan kondisi sosial ekonomi dari orang-orang yang terkait dengan sumber tersebut (Kant & Berry, 2001). Meskipun demikian, pemerintah lokal seringkali tidak memiliki sumber finansial, teknis, dan sumber daya manusia yang mencukupi. Hal ini kemudian mendorong dibangunnya suatu sistem berbasis masyarakat, yang beberapa di antaranya berhasil mengatasi permasalahan tersebut (Ostrom, 1990; Bhide & Sundaresan, 1984; Ascher, 1995).

Sejak tahun 1990, telah muncul konsensus bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan harus didasarkan pada solusi di tingkat lokal dan partisipasi masyarakat (Mwangi, 2000). Sistem yang berbasis masyarakat tersebut sangat penting bagi program pengelolaan lingkungan di negara berkembang karena negara-negara tersebut sangat kaya akan sumber daya komunal meskipun seringkali miskin dalam sumber daya keuangan. Perlunya pemahaman atas partisipasi masyarakat dan inisiatif pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah dilakukan dalam beberapa penelitian pada beberapa tahun terakhir.

Kastaman (2004) mendefinisikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator. Douglas *et al.* (1994) berpendapat bahwa pengelolaan lingkungan hidup memerlukan adanya fasilitasi dan implementasi upaya berbasis masyarakat sebagai suatu strategi pemberdayaan dan peningkatan akses mereka kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting, terutama tanah, infrastruktur, dan

pelayanan. Shikaze (1991) menggambarkan bahwa suksesnya pengelolaan sampah rumah tangga sangat tergantung pada faktor-faktor pendukung, seperti peranan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan kunci dalam pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dan keterlibatannya, serta inisiatif dan kerjasama sektor swasta.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat penting karena kegiatan tersebut dilakukan oleh anggota komunitas itu sendiri. Mereka mengambil keputusan yang terkait dengan kehidupan mereka sendiri. Hal ini akan menjadi lebih tepat guna jika disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta prioritas dan kapasitas mereka (Sutandyo-Buchholz, 2005). Mockler (1998) juga menemukan bahwa suatu kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) dianggap perlu sebagai titik awal keberhasilan pelaksanaan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Anschutz (1996) secara spesifik menyebutkan bahwa program pengelolaan sampah berbasis masyarakat seringkali gagal karena rendahnya partisipasi rumah tangga. Jika pengelolaan sampah tidak dianggap sebagai suatu kebutuhan, hal ini akan berimbas pada partisipasi dan kesediaan membayar yang rendah.

Mockler (1998) mempelajari sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Indonesia dan menemukan bahwa sejak awal tahun 1980-an, inisiatif ini telah terbentuk dan terlembaga oleh berbagai institusi termasuk lembaga nasional dan internasional, kementerian, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta. Penelitiannya menunjukkan bahwa skala program bervariasi dari pemilahan sampah untuk pengomposan dan pendaurulangan tingkat rumah tangga, hingga komunitas skala kecil dan menengah. Ia menyatakan bahwa program-program tersebut tidak hanya mengatasi aspek teknis, pengelolaan, kelayakan ekonomi, dan mekanisme swadana, tetapi juga mengupayakan keberhasilan dalam hal menghubungkan kegiatan pada level rumah tangga dengan sistem pengumpulan sampah primer dan sekunder. Hal yang memberatkan adalah bahwa di Jakarta sebagian besar rumah tangga tidak merasakan adanya insentif ekonomi dengan berpartisipasi karena jumlah timbulan sampah organik tidak cukup untuk memproduksi sejumlah kompos yang dapat dijual.

Penelitian Sukaedi (1996) menemukan faktor-faktor penting yang mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat, yaitu latar permukiman, partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan sekitar, peranan wanita, dan kebiasaan hidup sehari-hari dan sikap. Korelasi yang signifikan terjadi pada: keadaan latar permukiman dengan kebiasaan hidup sehari-hari; partisipasi masyarakat berhubungan erat dengan kebiasaan hidup sehari-hari dan latar permukiman; peranan wanita juga berhubungan erat dengan kebiasaan hidup sehari-hari, dan kebiasaan hidup sehari-hari berhubungan erat dengan ketiga faktor lainnya. Maka temuan tentang kunci untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah rumah tangga lebih berada pada kebiasaan hidup sehari-hari mereka dalam mengelola sampah.

Handayani (2008) mengkategorikan perkembangan pengelolaan sampah di Banjarsari dapat ke dalam tiga periodisasi: era prakarsa masyarakat (sebelum tahun 1996); era intervensi pihak luar (1996-2002); era pengembangan dan perluasan jaringan (2002-sekarang). Dari ketiga periode tersebut, era prakarsa masyarakat (sebelum 1996) adalah periode yang paling penting karena pada tahap tersebut terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan nilai-nilai sosial masyarakat. Pendapat tersebut kemudian didukung oleh penelitian Artiningsih (2008) yang berpendapat bahwa permasalahan utama dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga adalah bagaimana menerapkan paradigma dari memilah, membuang sampah menjadi memanfaatkan sampah. Peran kader lingkungan signifikan dalam membantu terwujudnya program pemerintah.

Berbagai cara atau model selama ini digunakan masyarakat dalam mengelola sampah, khususnya sampah rumah tangga masing-masing, antara lain disebutkan oleh Salim (2005), yaitu: (1) Menanggulangi sampah selagi volumenya masih kecil di tingkat RT/RW atau kelurahan; (2) Menanggulangi sampah dengan pendekatan dari bawah dalam merencanakan, melaksanakan, kontrol, dan evaluasi dengan semangat partisipasi merangsang masyarakat berperan serta secara aktif; dan (3) Memberi penghargaan dan pengakuan atas jerih payah anggota masyarakat yang terbukti berhasil mengelola sampah. Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sudah banyak dilakukan di

berbagai wilayah di Indonesia. Namun, berbagai kegiatan tersebut memiliki karakteristik, fokus kegiatan, dan kemitraan yang beragam, seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Beberapa Wilayah di Indonesia

No.	Wilayah	Fokus Kegiatan	Partisipan Utama	Kemitraan
1.	Sukunan, Sleman, Yogyakarta	Pengelolaan sampah terpadu	Ibu rumah tangga; kelompok pemuda.	Australian Consortium for In Party Indonesia (ACICIS).
2.	Cibangkong, Bandung, Jawa Barat	Pengomposan	Warga; Petugas kebersihan.	Kementerian PU.
3.	Perumahan Mustika Tigaraksa, Tangerang, Banten	Pengelolaan sampah terpadu	Warga (pemilahan sampah); Petugas kebersihan.	Pengembang perumahan.
4.	Kabupaten Bangli, Bali	Pengelolaan sampah terpadu	Warga (pemilahan sampah); Petugas kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Bangli
5.	Kampung Rungkut, Surabaya	Pengomposan dengan Metode Takakura	Warga	Pusat Pemberdayaan Komunitas Kota (PUSDAKOTA)

(Sumber: Darto *et al.*, 2007; Noorkamillah, 2005)

Keberlanjutan program didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu program dalam hal mempertahankan pelaksanaan, jasa, dan pemanfaatan selama program tersebut berlangsung, dilihat dari kegiatan yang masih dilakukan dan

manfaat yang masih didapatkan setelah inisiasi program berakhir; kelanjutan tindakan peserta yang didorong oleh program tersebut, dan munculnya inisiatif dari peserta meskipun program sudah tidak lagi difasilitasi oleh pihak luar (Kahn, 2000). Berdasarkan definisi tersebut, maka keberlanjutan terkait dengan aspek-aspek berikut: (1) tingkat kelanjutan dari manfaat yang diterima; (2) perubahan yang disebabkan oleh program; dan (3) inisiatif baru yang didorong oleh program. Indikator utama yang berpengaruh terhadap keberlanjutan beragam dari tiap sektor. Dalam hal kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, maka lingkungan hidup adalah indikator utama dari keberlanjutannya.



Gambar 2.1. Hubungan antara Tiga Komponen Pembentuk Lingkungan Hidup

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sesuai dengan pengertian tersebut, maka lingkungan hidup terkait erat dengan tiga komponen pokok, yaitu lingkungan alam (*natural environment*), lingkungan buatan (*man-made environment*), dan lingkungan sosial (*social environment*) (Gambar 2). Ketiga komponen ini sangat penting sebagai dasar dalam memahami berbagai isu lingkungan hidup pada tingkatan maupun konteks manapun.

Terdapat beberapa dimensi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan program, yaitu:

1. **Logistik**, yaitu adanya dukungan finansial dan pembangunan sarana yang diperlukan untuk kelangsungan program.
2. **Ekonomi**, yaitu adanya manfaat ekonomi serta kepastian dalam hal pembiayaan setelah inisiasi program berakhir.
3. **Komunitas**, yaitu partisipasi masyarakat/komunitas di dalam program terus ada.
4. **Kesetaraan**, yaitu manfaat yang didapatkan dari program didistribusikan secara adil dan merata, baik dari segi gender maupun kelas sosial.
5. **Kelembagaan**, yaitu adanya perencanaan dan pengawasan di dalam kelembagaan yang mewadahi program tersebut.
6. **Lingkungan hidup**, yaitu adanya jaminan stabilitas lingkungan hidup selama berlangsungnya program.

2.2. Pengelolaan dan Pengolahan Sampah Rumah Tangga

2.2.1. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah, menurut Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, adalah suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir.

Kegiatan mengurangi dan menangani sampah terkait erat dengan konsep 3R, yang terdiri atas:

1. *Reduce* (mengurangi timbulan sampah), yaitu mengurangi kegiatan konsumsi yang menyebabkan timbulan sampah.
2. *Reuse* (menggunakan kembali bahan yang berpotensi menimbulkan sampah), yaitu penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain.
3. *Recycle* (mendaur ulang sampah), yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan

Adapun sistem pengelolaan sampah di perkotaan pada umumnya mencakup lima komponen (Hadiwiyoto, 1993), yaitu:

1. Kelembagaan/Organisasi

Organisasi kelembagaan, pengelolaan atau manajemen berfungsi sebagai penggerak seluruh sistem, yang menyangkut tentang bentuk dan struktur organisasi pengelola, personalia, dan tata laksana kerja. Penanggung jawab pengelolaan sampah di permukiman dilaksanakan oleh swasta atau organisasi kemasyarakatan. Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman dari sumber sampah sampai ke TPS dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh organisasi masyarakat permukiman setempat. Selain itu diperlukan juga mekanisme kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah daerah atau dengan swasta, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia berupa pelatihan teknis dan manajemen persampahan hingga ke tingkat daerah.

2. Teknik Operasional

Faktor penentu dalam memilih teknik operasional yang akan diterapkan adalah kondisi topografi dan lingkungan, kondisi sosial ekonomi, partisipasi masyarakat, serta jumlah dan jenis timbulan sampah. Komponen ini menyangkut:

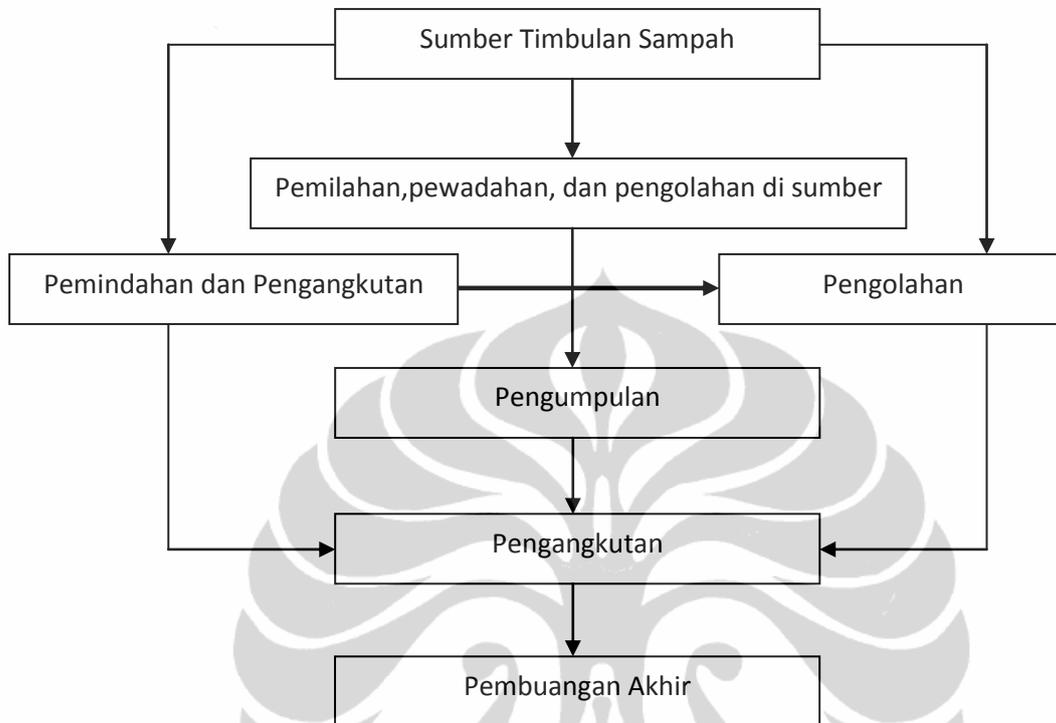
a. Pewadahan

Kegiatan pewadahan terdiri atas pewadahan individual dan/atau pewadahan komunal. Jumlah wadah sampah minimal 2 buah per rumah untuk pemilahan jenis sampah mulai dari sumber, yaitu: (1) wadah sampah organik untuk mewadahi sampah sisa sayuran, sisa makanan, kulit buah-buahan, dan daun-daunan menggunakan wadah dengan warna gelap; (2) wadah sampah non-organik untuk mewadahi sampah jenis kertas, kardus, botol, kaca, plastik, dan lain-lain menggunakan wadah warna terang.

b. Pengumpulan

Proses pengumpulan terdiri atas pola individual tidak langsung dan pola komunal. Pada pola individual, proses pengumpulan sampah dimulai dari sumber sampah kemudian diangkut ke TPS sebelum dibuang ke TPA. Pada pola komunal, pengumpulan sampah dilakukan oleh penghasil sampah ke tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan kemudian

diangkut ke TPA tanpa melalui proses pemindahan. Pola komunal umumnya dilakukan pada permukiman padat.



Gambar 2.2. Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (SNI 19-2454-2002)

- c. Pemanfaatan dan daur ulang sampah dari sumber dan di TPS.
Proses ini terkait erat dengan pengolahan sampah, yaitu suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau mengubah bentuk sampah menjadi bahan yang bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, pemadatan, penghancuran, pengeringan, dan pendaurulangan (Departemen PU, 1990). Sampah organik diproses menjadi kompos, sedangkan sampah non-organik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Pada tingkat rumah tangga, sampah non-organik yang tidak dapat didaur ulang dapat dijual ke pengumpul.
- d. Pemindahan sampah dari TPS atau wadah komunal ke TPA.
Pada proses pengumpulan, pemindahan, maupun pengangkutan, sampah yang sudah terpilah diusahakan tidak tercampur kembali. Hal ini ditujukan agar pengolahan sampah dapat dilakukan secara efisien.

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah komponen pendukung efektivitas kerja dari seluruh sistem, mencakup antara lain sumber pendanaan, dana operasional, pemeliharaan dan investasi.

4. Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri. Salah satu pendekatan masyarakat untuk membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu mengubah sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur, budaya setempat (Wibowo & Djajawinata, 2004). Peran masyarakat menyangkut bentuk partisipasi, metode pembinaan di bidang kebersihan, serta evaluasi dan pemeliharaan kondisi prasarana persampahan yang ada.

5. Peraturan

Peraturan adalah komponen dinamis yang mengatur sistem untuk mencapai sasaran secara efektif, meliputi peraturan tentang kebersihan lingkungan. Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, yang terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 12 Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pengurangan sampah yang dimaksud meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan sampah. Pemerintah

dan pemerintah daerah wajib menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, serta memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga menetapkan definisi TPS, TPST, dan TPA. TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau pengolahan sampah terpadu. TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Adapun TPA dimaknai ulang sebagai tempat pemrosesan akhir, yaitu tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Selain diperlukan pada tahap awal program, intervensi pemerintah juga diperlukan untuk menjaga kelangsungan dan meningkatkan tingkat daur ulang (Cointreau *et al.*, 1985). Penelitian yang disertai dengan teknologi terapan adalah kombinasi yang sangat penting dalam rangka mengembangkan teknologi yang tepat bagi masyarakat lokal. Dukungan finansial juga sangat dibutuhkan untuk investasi awal dan memulai kegiatan operasional.

2.2.2. Pengolahan Sampah Rumah Tangga

Sesuai dengan Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Terkait dengan penelitian ini, maka sampah yang dimaksud adalah: (1) sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik; dan (2) sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Meskipun sifatnya spesifik, sampah yang mengandung B3 seringkali terdapat dalam rumah tangga. Beberapa contoh dari sampah ini adalah baterai, pembalut, dan botol

bertekanan. Meskipun pada awalnya sampah rumah tangga aman untuk dibuang ke lingkungan, seiring dengan berjalannya waktu, setelah terjadi perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi, karakteristik sampah semakin kompleks dan sulit untuk dikelola, terutama karena kandungan berbagai bahan kimia dan anorganik yang ada di dalamnya (Joseph, 2005).

Berdasarkan asalnya, sampah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan non-organik (Gelbert, *et al.*, 1996). Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba (*biodegradable*). Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar berupa sampah organik, misalnya sisa-sisa makanan, sayuran, kulit buah, daun dan ranting. Sampah non-organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetis maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah non-organik terdiri atas sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, serta sampah detergen. Sebagian besar sampah non-organik tidak terurai oleh alam/mikroorganisme secara keseluruhan (*nonbiodegradable*), sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang lama.

Beberapa metode pengolahan sampah yang paling umum diterapkan adalah pembakaran (insinerasi) dan daur ulang. Daur ulang didefinisikan sebagai proses pengolahan sampah yang dapat menghasilkan produk yang bermanfaat lagi (Departemen PU, 1990). Tujuan dari kegiatan daur ulang sebagai suatu alternatif pengolahan sampah adalah untuk menciptakan masyarakat kota yang mencukupi diri sendiri (*self-sufficient*) secara berkelanjutan, yang berdasarkan produksi lokal dari sumber daya lokal untuk konsumsi lokal (Gandy, 1994). Terdapat tiga tingkatan daur ulang (Cointreau *et al.*, 1985), yaitu: (1) Setelah pemilahan dan pencucian, sampah dapat langsung dimanfaatkan kembali, diperbaiki, atau dimanufaktur ulang; (2) Sampah dipilah, dicuci, diolah, dan didaur ulang menjadi material baru atau produk baru; dan (3) Sampah diubah menjadi material yang berbeda dari bentuk asalnya atau menjadi energi.

Pengolahan sampah non-organik umumnya dilakukan dengan cara mendaur ulang kembali plastik, logam dan kertas menjadi barang yang dapat dibuat

kembali seperti bentuk semula atau diubah menjadi hasil karya seni yang bernilai tinggi dan indah. Bagi rumah tangga yang belum mampu menghasilkan karya seni dari sampah non-organik, dapat menjual sampah jenis tersebut kepada pemulung atau pengumpul karena sampah non-organik memiliki nilai jual dan dapat digunakan untuk keperluan industri daur ulang. Sampah non-organik yang tidak dapat didaur ulang, seperti *styrofoam*, botol plastik, popok dan pembalut, dan lain sebagainya, dapat diminimalisasikan penggunaannya dengan menghentikan atau mengurangi konsumsi barang-barang tersebut. Sampah semacam ini seringkali termasuk ke dalam sampah spesifik karena mengandung B3. Minimalisasi sampah non-organik juga dapat dilakukan dengan mengganti barang konsumsi yang menjadi sumber sampah dengan bahan yang lebih ramah lingkungan, seperti misalnya menggunakan popok kain sebagai pengganti popok sekali buang, membawa kantung belanja milik sendiri sebagai pengganti kantung plastik dari pasar swalayan, dan lain-lain.

Pengolahan sampah organik yang paling sesuai adalah dengan teknik pengomposan, yaitu proses perombakan (dekomposisi) dan stabilisasi bahan organik oleh mikroorganisme dalam keadaan lingkungan yang terkendali (terkontrol) dengan hasil akhir berupa humus dan kompos (Simamora & Salundik, 2006). Pengomposan adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikroorganisme sehingga terbentuk pupuk organik yang lebih dikenal sebagai pupuk kompos yang mengandung materi yang kaya unsur hara, antara lain nitrogen, fosfor dan kalium yang baik untuk pupuk tanaman. Dalam proses pengomposan, sampah organik secara alami akan diuraikan oleh berbagai jenis mikroba atau jasad renik seperti bakteri, jamur, dan sebagainya. Selain dengan bantuan mikroorganisme, proses pengkomposan juga dapat melibatkan organisme makro seperti cacing tanah. Pengomposan adalah cara yang alamiah untuk mengembalikan bahan organik ke alam dalam bentuk penggembur tanah. Kompos bermanfaat untuk mendukung pengendalian gulma dan pencegahan erosi, meningkatkan daya pegang air dan memperbaiki porositas tanah, meningkatkan kapasitas penyangga tanah, serta menambah unsur hara makro dan mikro tanah. Pengomposan dapat terjadi dalam kondisi aerobik (dalam keadaan ada oksigen) dan anaerobik (tanpa keberadaan oksigen) (Indriani, 2000).

Pada pengomposan secara aerobik, oksigen mutlak dibutuhkan. Mikroorganisme yang terlibat dalam proses pengomposan membutuhkan oksigen dan air untuk merombak bahan organik dan mengasimilasikan sejumlah karbon, nitrogen, fosfor, belerang, dan unsur lainnya untuk sintesis protoplasma sel tubuhnya (Simamora & Salundik, 2006). Selama proses pengomposan berlangsung akan terjadi reaksi eksotermik sehingga timbul panas akibat pelepasan energi (Sutanto, 2002). Hasil dari dekomposisi bahan organik secara aerobik adalah CO₂, H₂O (air), humus, dan energi. Adapun proses pengomposan secara anaerobik merupakan modifikasi biologis pada struktur kimia dan biologi bahan organik tanpa kehadiran oksigen (hampa udara). Proses ini merupakan proses yang dingin dan tidak terjadi fluktuasi temperatur seperti yang terjadi pada proses pengomposan secara aerobik. Namun, pada proses anaerobik perlu tambahan panas dari luar sebesar 30⁰C (Djuarnani *et al.*, 2005).

Metode pengolahan sampah melalui pengomposan sampah organik akan mengurangi volume cukup besar. Miller (*dalam* Wardhani, 2004) menyebutkan volume yang berkurang mencapai 20%. Sedangkan Kusumastuti (2003) menyebutkan angka 60% sebagai berat yang hilang dan menyisakan kompos sebesar 25% dari berat total bagian organik sampah. Sisa yang tidak dapat dikomposkan adalah sebesar 15%. Selain dari keuntungan berkurangnya volume sampah, pengomposan juga dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sesuai dengan harga jual kompos di wilayah masing-masing.

2.3. Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat adalah suatu proses yang menggambarkan masyarakat yang dapat mengidentifikasi kebutuhannya dan menentukan prioritas dari kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan skala prioritas tadi berdasarkan atas sumber daya yang ada di masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar, dengan usaha secara gotong-royong (Arifin, 2009). Proses sosiologis dari penduduk yang mengorganisasikan diri mereka dan melibatkan diri pada suatu wilayah atau lingkungan tempat tinggal, untuk memperbaiki

kondisi kehidupan sehari-hari (air, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya) disebut sebagai partisipasi masyarakat (Moningka, 2000). Masyarakat mengorganisasikan dirinya pada berbagai tingkatan keterlibatan individual atau kolektif (kontribusi finansial dan/atau fisik, komitmen sosial dan/atau politik) pada tahapan program yang berbeda-beda. Kapasitas masyarakat perlu dibangun agar dapat melanjutkan kegiatan dari suatu program pembangunan berbasis masyarakat setelah organisasi yang memfasilitasinya meninggalkan program tersebut.

Tahapan awal dalam proses pelaksanaan program pembangunan pengelolaan sampah adalah perencanaan, dimulai dari keterlibatan mereka dalam menyusun rencana program yang diaktualisasikan melalui keaktifannya pada setiap rapat dan inisiatif diadakannya rapat, dan keterlibatan dalam memberikan pendapat, tanggapan serta pengembangan terhadap upaya pengelolaan sampah, sampai dengan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan terhadap program yang direncanakan (Artiningsih, 2008). Tahap perencanaan kemudian diikuti dengan 5 tahap pelaksanaan kegiatan (Artiningsih, 2008), yang terdiri atas:

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan persiapan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, terutama pelaksanaan teknis pemilahan sampah, daur ulang dan pengomposan.

2. Pemilihan Lokasi

Warga bersama fasilitator kemudian memilih lokasi yang tepat sebagai pusat pengelolaan sampah di wilayah mereka. Lokasi yang dipilih hendaknya strategis dan sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut.

3. Perencanaan Teknis

Tahap perencanaan teknis adalah tahap penyusunan dokumen kerja serta pengadaan peralatan pengelolaan sampah, yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah, penentuan jenis dan jumlah peralatan, serta penyusunan rencana transportasi pengangkutan sampah ke TPS.

4. Pengorganisasian Masyarakat

Masyarakat didorong untuk menjadi fasilitator terhadap kegiatan di wilayah tempat tinggalnya. Pada tahap ini, penyelenggara program melakukan sosialisasi pada masyarakat dengan cara memperkenalkan program pengelolaan sampah, pembentukan organisasi, serta melakukan pelatihan pengelolaan sampah terpadu.

5. Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Tahapan ini adalah rangkuman dari keseluruhan hasil program pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kegiatan evaluasi dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemajuan kegiatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, dan dilakukan pengawasan secara intensif sebagai upaya untuk menyiapkan kemandirian masyarakat.

Bentuk pengorganisasian diri dan pengaturan sendiri suatu masyarakat terhadap suatu kegiatan pengelolaan sampah juga harus didasarkan pada prinsip rancangan (*design principles*). Prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengeksplorasi secara kritis penyusunan institusional yang penting bagi keberhasilan pengelolaan berbasis masyarakat. Ostrom (1990) mendefinisikan prinsip-prinsip rancangan sebagai elemen atau kondisi yang membantu mengukur keberhasilan institusi dalam hal melestarikan pekerjaan fisik dan memperoleh kepatuhan pengguna dari berbagai generasi terhadap peraturan yang berlaku, sehingga terwujud suatu perilaku yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut terdiri atas:

1. Batas Wilayah yang Jelas

Penentuan batas wilayah yang jelas terhadap individu atau rumah tangga yang terlibat adalah langkah awal dalam pengorganisasian suatu kegiatan kolektif. Tanpa adanya kejelasan tersebut, tidak dapat ditentukan apa yang dikelola dan siapa yang mendapatkan manfaat dari kegiatan tersebut. Kejelasan batas wilayah meminimalisasi pihak lain yang tidak berkontribusi mengambil manfaat atas kegiatan tersebut.

2. Kesesuaian Peraturan dengan Kondisi Setempat

Tidak cukup hanya dengan batas wilayah yang jelas, kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat juga memerlukan aturan yang membatasi waktu, tempat, teknologi, dan/atau jumlah sumber daya yang terkait dengan kondisi

wilayah setempat, serta aturan yang mengawasi penggunaan tenaga kerja, bahan, atau uang. Hal ini diperlukan untuk membantu kegiatan pengelolaan sesuai dengan karakteristik lingkungan masing-masing wilayah.

3. Pengaturan Pilihan Kolektif

Warga masyarakat diizinkan dan didukung untuk berpartisipasi dalam diskusi menyangkut sistem pengelolaan sampah, memberikan masukan kepada organisasi yang mengelola sampah dan meminta perhatian atas masalah yang mereka hadapi. Mereka yang terkait dengan aturan pelaksanaan program dapat berpartisipasi dalam menyesuaikan aturan pelaksanaan tersebut sehingga aturan yang dibuat dapat disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi wilayah setempat berikut warga yang terlibat di dalamnya.

4. Pengawasan

Mengawasi perilaku orang lain dalam hal membuang sampah adalah hal yang umum di masyarakat. Ketika seorang warga menyaksikan warga lain membuang sampah tidak pada tempatnya, ia dapat melaporkan perbuatan tersebut kepada organisasi pengelola. Kegiatan pengawasan ditujukan kepada dan dapat dilakukan oleh seluruh warga yang terkait dengan program.

5. Penggolongan Sanksi

Seorang warga yang tertangkap tangan oleh warga lain sebagai hasil dari upaya pengawasan mereka atau warga yang tidak membayar iuran dapat dihadapkan pada sanksi yang dibuat berdasarkan golongan-golongan tindakan yang dilakukan. Selain itu, individu yang tidak berpartisipasi dalam sistem dapat dikecualikan dari aktivitas komunal lainnya. Pengecualian ini dapat mendorong warga untuk berpartisipasi.

6. Mekanisme Resolusi Konflik

Masyarakat dan pengurus kegiatan pengelolaan sampah memiliki akses yang besar untuk menyelesaikan konflik di antara mereka sendiri maupun di antara warga dan penyelenggara program.

7. Pengakuan atas Hak untuk Mengorganisasikan Diri

Masyarakat berhak untuk menggunakan lembaga dan sistem pengelolaan sampah mereka dan tidak mendapatkan tentangan dari kewenangan

pemerintah di luar lembaga tersebut. Masyarakat umumnya menggunakan aturan yang mereka buat tanpa terkait dengan yurisdiksi pemerintah formal.

Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting bagi keberhasilan sistem pengelolaan sampah rumah tangga, terutama peran mereka untuk memisahkan sampah pada sumbernya. Namun, pelaksanaan kegiatan daur ulang bukanlah tanpa hambatan. Partisipasi seringkali hanya diartikan sebatas membayar iuran/retribusi pengumpulan sampah setiap bulannya, yang diorganisasikan oleh ketua RT setempat. Kesiapan untuk membayar iuran sampah tanpa disertai dengan keterlibatan lainnya tidak dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi nyata karena lebih cenderung mengarah pada tindakan pemenuhan kewajiban daripada perasaan kepemilikan (*sense of belonging*), karena terlepas dari pembayaran iuran bulanan, anggota masyarakat seringkali tidak termotivasi untuk kepentingan komunitasnya seperti memelihara lingkungan yang lebih bersih (Sutandyo-Buchholz, 2005). Cointreau *et al.* (1985) menyebutkan kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaksanaan kegiatan daur ulang pada sumbernya, yaitu:

1. Praktek kegiatan daur ulang bergantung pada kenyamanan penghasil sampah melakukan daur ulang dan/atau apakah upaya itu menguntungkan secara ekonomi atau tidak.
2. Tingkat partisipasi daur ulang dapat menurun apabila partisipan (penghasil sampah) merasakan ketidaknyamanan, misalnya pengumpulan sampah tidak dilakukan dengan teratur, jarak pengambilan sampah terlalu lama, ataupun sampah yang dikumpulkan terlalu beragam.
3. Adanya cara pandang dan stigma dari masyarakat yang mengasosiasikan pengumpulan sampah dengan kegiatan pemulung, sehingga dapat menimbulkan efek antagonistik terhadap kegiatan daur ulang.
4. Peningkatan tingkat pendapatan masyarakat yang kemudian meningkatkan standar hidup dan juga kegiatan konsumsi.
5. Rendahnya atau malah tidak adanya dokumentasi perhitungan biaya secara penuh (yang mencakup kerugian sosial, dampak lingkungan dan kesehatan yang terjadi) tentang pembuangan sampah yang aman dan ramah lingkungan.

2.4. Gender dan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan kondisi persampahan di DKI Jakarta yang sebagian besar ditimbulkan dari konsumsi rumah tangga, pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat memerlukan peningkatan peran serta perempuan yang sebagian besar memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan konsumsi keluarga. Untuk itu, diperlukan pemahaman dari sudut pandang gender sebagai salah satu upaya mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Gender mengacu pada peran yang terkonstruksi secara sosial serta tingkah laku dan harapan yang dikaitkan secara sosial dengan laki-laki dan perempuan (World Bank, 2001). Perubahan ekonomi, politik, dan lingkungan global telah mempengaruhi laki-laki dan perempuan sebagai pemangku kepentingan dan para pelaku penggunaan dan pengalokasian sumber daya alam, manajemen atau pengelolaan lingkungan hidup, dan penciptaan norma kebaikan dan kelangsungan lingkungan hidup. Terdapat perbedaan gender dalam pengalaman, tanggung jawab, dan ketertarikan terhadap lingkungan alam yang berasal dari interpretasi biologi sosial dan konstruksi sosial gender, yang berbeda-beda berdasarkan budaya, kelas, ras, dan tempat, dan berubah menurut individu dan masyarakat (Rocheleau et.al, 1996).

2.4.1. Perempuan dan Perubahan Lingkungan Hidup

Pengaruh hubungan gender dalam penggunaan lingkungan oleh manusia teramat penting di banyak negara yang sedang berkembang. Saat ini semakin diakui bahwa perbedaan peran sosial ekonomi yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan berimplikasi mendalam pada lingkungan (Potter & Lloyd-Evans, 1998). Pada satu sisi, budaya patriarki menganggap bahwa pola konsumsi dan sifat alamiah reproduksi perempuan adalah penyebab utama dari munculnya permasalahan lingkungan (Bretherton, 1996). Ledakan populasi dan konsumerisme yang berlebihan adalah tanggung jawab perempuan sehingga mereka-lah yang menjadi obyek atau sasaran suatu kebijakan, seperti misalnya

kampanye konsumen hijau maupun program pengendalian kelahiran. Di negara berkembang, selain isu reproduksi, perempuan juga seringkali dipersalahkan sebagai penyebab kerusakan lingkungan karena kegiatan domestik mereka yang seringkali bersinggungan langsung dengan lingkungan alam, seperti mengambil kayu bakar untuk memasak atau mencuci pakaian di sungai. Alih-alih secara aktif melibatkan perempuan di dalam pembuatan dan penerapan kebijakan, budaya patriarkal lebih cenderung berupaya untuk mengubah perilaku perempuan menjadi seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut.

Fenomena ini kemudian mendorong pergerakan yang berupaya melihat permasalahan lingkungan dengan perspektif gender. Shiva (1989) berpendapat bahwa penurunan kondisi lingkungan diakibatkan oleh "pola pembangunan patriarkal yang salah," yang dikaitkan dengan kapitalisme, aliran pemikiran yang mengabaikan wilayah keterlibatan perempuan dalam penurunan kondisi lingkungan itu sendiri. Di banyak kota perempuan memainkan peran kunci sebagai pengelola dan pengguna tak kasat mata dari lingkungan, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti air, tanah, dan energi (Sontheimer, 1991). Perempuan juga berperan penting dalam usaha komersial serta multinasional yang penuh risiko, dan lebih sering menggunakan rumah mereka sebagai tempat kerja informal, sehingga meningkatkan implikasinya pada kesehatan dan keselamatan (Moser, 1995). Perempuan-lah yang paling mampu memanfaatkan pengetahuannya untuk meningkatkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Keterkaitan perempuan dalam lingkungan hidup merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena perempuan dapat mempengaruhi gaya hidup keluarga dan masyarakat sekelilingnya (Kementerian Lingkungan Hidup, 2008). Perempuan sering mengambil peran utama dalam pemeliharaan lingkungan, dan paling berisiko terkena dampak masalah lingkungan, terutama yang terkait dengan tempat tinggal, tempat kerja, dan kesehatan. Di belahan dunia manapun, perempuan bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan keluarganya. King (*dalam* Mellor, 1997) menyebutkan bahwa perempuan sebagai "pengurus rumah tangga, anak, dan komunitas" mengembangkan "kekuatan pengasuhan"

yang mereka gunakan setiap hari terlepas dari apakah mereka seorang ibu secara biologis.

Perempuan mengambil bahan mentah dan pendapatan keluarga, baik yang disediakan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan mengubahnya menjadi makanan, pakaian, pemeliharaan kesehatan, dan sebagainya. Perempuan dalam kesehariannya cenderung lebih dekat dengan lingkungan, seperti ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah rumah tangga, merawat kebun, dan sebagainya. Apalagi perempuan yang berada di pedalaman, umumnya mereka mempunyai pengetahuan turun temurun mengenai tanaman obat dan kearifan lingkungan. Perempuan juga mempunyai kemampuan lebih untuk menggerakkan masyarakat, sehingga membuat perempuan berpotensi untuk gerakan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa perempuan adalah konsumen utama dan pembuat keputusan atas penggunaan sumber daya bagi keluarga dan komunitasnya. Pada umumnya, perempuan yang mengusung kegiatan lingkungan hidup yang berbasis komunitas tidak memiliki pengalaman politik. Mereka hanyalah para ibu biasa yang memiliki peranan sosial sebagai penopang keluarga, yang seringkali menjadi orang pertama yang menyadari adanya permasalahan lingkungan, seperti air tanah yang tercemar, munculnya penyakit kulit pada anak, ataupun hujan yang terus-menerus sehingga pakaian yang dijemurnya sulit kering. Seperti yang diungkapkan oleh Seager (1996), perempuan di dalam komunitas bereaksi paling awal terhadap masalah lingkungan ketika mereka merasakan adanya ancaman bagi anak-anak mereka maupun bagi diri sendiri, dalam hal ini adalah potensi pencemaran lingkungan dan bahaya kesehatan akibat sampah.

Seager (1993) menekankan bahwa sangat penting untuk memperhitungkan perempuan dalam rencana kebijakan lingkungan hidup, bersamaan dengan penggunaan teknologi dan sumber daya yang tepat. Perubahan paradigma teknologi tidak akan berhasil tanpa pengalaman dan kebutuhan perempuan. Karena sifat alamiah dari kehidupannya sehari-hari, maka perempuan seringkali memberikan peringatan dini terhadap masalah lingkungan, sehingga mereka sangat tepat untuk bertindak sebagai agen perubahan (*agent of change*) (Agarwal, 1992). Perempuan harus memiliki kemampuan untuk tawar-menawar,

bagi kepentingannya sendiri, di berbagai domain sekaligus, baik dalam keluarga, komunitas, pasar, maupun negara.

2.4.2. Pengorganisasian Masyarakat yang Terpusat pada Perempuan

Konsep pengorganisasian masyarakat dari sudut pandang kelompok feminis didasarkan pada pembagian kekuasaan. Mereka berupaya untuk menciptakan hubungan kekuasaan yang seimbang melalui praktik yang demokratis atas pembagian kepemimpinan, pembuatan keputusan, kewenangan, dan tanggung jawab (Dominelli, 1995; Acker, 1995; Collins, 2000). Banyak kelompok yang berpusat pada perempuan percaya bahwa tanpa adanya pendekatan ini pengorganisasian masyarakat akan tetap berujung pada kelembagaan hierarkis yang tradisional. Dengan demikian, pengorganisasian masyarakat yang berbasis perempuan menjunjung kesetaraan dan keterlibatan.

Melalui praktik yang sehat atas pembagian kekuasaan, pengorganisasian masyarakat berupaya untuk memelihara lingkungan yang damai, memberdayakan, dan penuh hormat. Sudut pandang ini membagi kekuasaan melalui keterlibatan, pembentukan konsensus dan pengembangan keahlian (Kretzmann, 2006). Praktik lainnya termasuk mengesahkan pengalaman perempuan, mengantisipasi tantangan dan konflik, membangun tempat yang aman, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta berbagi peran dan tanggung jawab. Rasa hormat adalah akar dari keberhasilan pembagian kekuasaan, sebagai komitmen sejati terhadap prinsip, praktik, dan proses feminisme.

Model pengorganisasian yang terpusat pada perempuan menekankan bahwa hubungan seharusnya tidak dibangun atas dasar kepentingan diri sendiri, melainkan atas dasar pemahaman dan tanggung jawab. Model ini menempatkan pengembangan diri dan pembangunan masyarakat sebagai prioritas yang sama tinggi. Pengorganisasian yang berpusat pada perempuan tidak berasal dari kepentingan sendiri melainkan dari suatu etika pengasuhan yang dilestarikan oleh hubungan yang dibangun dalam zona pribadi yang diperluas, yang

cenderung tercampur dengan zona publik. Kedekatan emosional perempuan dengan keluarganya mempengaruhi komitmen keseharian mereka di masyarakat dan prioritas mereka mengenai tujuan apa yang sesuai bagi upaya perubahan sosial. Pengorganisasian yang terpusat pada perempuan kemudian memperluas batas rumah tangga dan memasukkannya ke dalam lingkungan tempat tinggal, yang berujung pada buramnya batasan yang jelas antara kehidupan publik dan pribadi, antara rumah tangga dan masyarakat (Ackelsberg, 1988). Perempuan mempelajari moralitas tanggung jawab yang terkait dengan hubungan dan didasarkan pada universalitas kebutuhan akan kasih sayang dan pengasuhan (Gilligan, 1977).

Di dalam pendekatan ini, pengelolaan dan pembangunan kohesi sosial, yaitu hubungan pribadi dengan orang lain yang memberikan lingkungan yang aman bagi seseorang untuk berkembang, lebih penting dibandingkan penekanan pada konflik untuk mencapai kekuasaan kelembagaan. Bagi perempuan, hubungan di masyarakat tercipta melalui kegiatan rutin yang terkait dengan lingkungan pribadi, seperti pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan kegiatan belanja (DeVault, 1991), serta melalui urusan sosial yang mereka buat untuk melindungi, meningkatkan, dan melestarikan pengalaman budaya dari para anggota masyarakat (Bernard, 1981). Bagi perempuan, struktur kemasyarakatan dapat berfungsi sebagai ruang bebas yang menawarkan wilayah di luar keluarga, tempat mereka dapat mengembangkan rasa akan kepemilikan hak untuk bekerja.

Pada permukiman informal (*unplanned settlements*), perempuan seringkali menjadi motivator utama dari pengumpulan sampah. Mereka mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan suatu sistem pengumpulan sampah berbasis masyarakat, namun suara mereka jarang didengar oleh anggota komunitas yang lainnya. Kemitraan di dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat sangat penting untuk melibatkan perempuan dan generasi muda, karena mereka seringkali memiliki peran yang istimewa dalam kegiatan ini (Anschütz, 1996). Dibandingkan dengan laki-laki, perempuan umumnya memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap perbaikan pelayanan, namun partisipasi mereka dalam pembuatan keputusan dalam masyarakat sangat minim. Banyak program di

berbagai negara berkembang telah membuktikan bahwa perempuan tidak hanya tertarik pada kegiatan pengawasan dalam program pengelolaan sampah, tetapi juga pada aspek pekerjaan dan penghasilan. Sebagai contohnya, mereka bertindak sebagai pemrakarsa, menjalankan kampanye pendidikan dalam perilaku sanitasi, maupun bertindak sebagai pengawas di komunitasnya terhadap rumah tangga agar mematuhi aturan perilaku yang telah disepakati.

Tujuan dari proses pengorganisasian yang berpusat pada perempuan adalah pemberdayaan (ECCO, 1989), yaitu suatu proses pembangunan yang meliputi siklus yang berulang atas suatu tindakan dan refleksi yang membangkitkan keahlian dan pemahaman baru, yang pada akhirnya mendorong tindakan yang baru dan lebih efektif. Pemberdayaan dapat tercapai apabila perempuan berhasil memenuhi kebutuhan praktis sekaligus kepentingan strategis mereka (UNESCO, 2003). Kebutuhan praktis adalah kebutuhan yang paling mendasar yang diidentifikasi oleh perempuan di dalam lingkup peran mereka, yang terdefinisi secara sosial. Umumnya berupa kebutuhan material jangka pendek seperti air, sandang, pangan, maupun tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan ini perempuan tidak berupaya untuk mempertanyakan pembagian kerja berdasarkan gender maupun posisi subordinat perempuan di masyarakat. Adapun kepentingan strategis yang dimiliki oleh perempuan adalah suatu kebutuhan jangka panjang yang difokuskan pada status sosial perempuan sebagai subordinat dan ketidaksetaraan gender. Pada kebutuhan semacam ini, perempuan cenderung mempertanyakan kekuatan dan kontrol pembagian kerja berdasarkan gender serta norma dan peran yang didefinisikan secara tradisional, misalnya persamaan dalam hukum, kekerasan domestik, maupun kesetaraan upah.

2.5. Program JGC

Program JGC adalah bagian dari kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Unilever Indonesia yang menitikberatkan pada aspek lingkungan, sosial dan juga ekonomi. Sejak tahun 2001, Unilever berhasil menerapkan program sejenis di beberapa kota lain di Indonesia, yaitu Surabaya *Green and Clean* (SGC),

Makassar *Green and Clean* (JGC), Yogyakarta *Green and Clean* (YGC) dan Bandung *Green and Clean* (BGC).

Jakarta *Green and Clean* adalah program berbasis komunitas yang berupaya memberdayakan masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan terutama dalam hal pengelolaan sampah secara mandiri, penghijauan, dan biopori. JGC berbentuk kegiatan kompetisi kebersihan lingkungan antar wilayah, melalui sosialisasi manajemen pengelolaan sampah dan lingkungan dengan tujuan menjadikan Jakarta kota yang hijau dan bersih. Implementasi JGC membidik struktur lingkungan terkecil di wilayah Jakarta, yaitu RW dan RT.

Program yang dimulai sejak tahun 2006 ini diharapkan dapat lebih memberdayakan dan menampung keinginan masyarakat untuk kembali menghijaukan lingkungan dan berbuat bijak dengan sampah rumah tangga yang dihasilkannya dengan konsep 3R. Untuk mengoptimalkan program ini, ACT, sebagai salah satu pihak penyelenggara, merangkul kader-kader lingkungan dari masyarakat dengan memberikan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan hidup yang benar, yakni dengan menerapkan konsep pemilahan sampah organik dan non-organik mulai dari tingkat rumah tangga, serta pengelolaan sampah organik menjadi kompos dengan mempergunakan teknologi sederhana. Mereka kemudian bertugas mendampingi fasilitator yang memberikan pelatihan kepada peserta JGC.

2.5.1. Bentuk Kompetisi dan Penilaian JGC

Tata cara di dalam perlombaan dimulai dengan babak penyisihan. Kegiatan penyisihan dilakukan dua kali, yaitu penyisihan 50 besar dan 25 besar, yang dilakukan dengan penilaian terhadap presentasi masing-masing RT/RW peserta. Tiap peserta yang lolos menjadi nominator akan menerima dana stimulan. Dana tersebut merupakan bentuk komitmen pihak penyelenggara agar peserta yang menjadi nominator melaksanakan program kerja kebersihan dan atau penghijauan wilayahnya masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, kader masing-masing RW akan dibantu atau didampingi oleh motivator yang sebelumnya sudah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Motivator tersebut akan membuat laporan peserta secara berkala

untuk memantau proses kegiatan yang dilakukan. Selain dari laporan motivator, tim penilai juga akan menurunkan petugas lapangan untuk melakukan penilaian secara terbuka maupun rahasia.

Sebelum lomba dimulai, juga akan diadakan serangkaian kegiatan. Yaitu pelatihan kader RW. Materi yang diberikan adalah tentang maksud, tujuan dan tata cara lomba, pelatihan pengolahan sampah dan penghijauan, kiat memotivasi dan menggerakkan masyarakat, kiat penggalangan dana untuk kebersihan dan penghijauan lingkungan, serta merumuskan program kerja di lingkungan masing-masing. Kegiatan di dalam program ini juga meliputi pembuatan 86 ribu lubang biopori dan penanaman 5 sampai dengan 10 pohon pada tiap RT yang ada di tiap wilayah DKI Jakarta. Pendekatan program dilakukan dengan cara memberdayakan peran pemimpin di masyarakat (fasilitator lingkungan) yang kemudian secara aktif mengajak warga masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam mengelola lingkungan (kader lingkungan). Animo masyarakat yang mengikuti perhelatan lingkungan ini pun meningkat. Setiap RW diwakili oleh 1 orang fasilitator yang akan mendapatkan pelatihan mengenai tata cara lomba dan materi pengetahuan tentang lomba.

Sejak tahun 2009, peserta dikategorikan menjadi dua, yaitu wilayah maju dan wilayah berkembang. Wilayah maju adalah wilayah yang sudah dapat melakukan replikasi program keluar wilayahnya (semua RT pada RW tersebut). Wilayah berkembang adalah wilayah yang masih dalam tahap penerapan dan pengembangan program di lingkungannya sendiri. Pengkategorian ini dimaksudkan agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah yang sudah pernah mengikuti kompetisi dan wilayah yang baru bergabung. Para peserta kemudian memperebutkan hadiah uang, dengan kriteria penilaian ditinjau dari pengelolaan sampah, penerapan bank sampah (khusus untuk kategori wilayah maju), penghijauan, lubang resapan biopori (LRB), partisipasi masyarakat, serta replikasi program ke wilayah lain (khusus untuk kategori wilayah maju).

Daerah yang masuk menjadi nominator kebanyakan berupa permukiman sempit, namun mereka mampu melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Peran para ibu sangat penting, karena selain terlibat secara penuh dalam kegiatan pemilahan sampah, mereka juga mampu meningkatkan pendapatan

tambahan dengan mengolah sampah kering menjadi aneka kerajinan tangan seperti taplak meja, hiasan bunga, piring makan, payung, dan lain sebagainya (Nurhayati, 2009). Peserta juga mampu menampilkan hasil karya mereka dari pengelolaan sampah mandiri dan penghijauan yang diterapkan di lingkungannya masing-masing seperti komposter (alat pembuat kompos buatan sendiri), kompos, pernak-pernik, serta tanaman hias maupun tanaman obat.

2.5.2. Perkembangan JGC (2006-2010)

Pada tahun 2006, Program JGC mulai diselenggarakan di DKI Jakarta dengan peserta yang terdiri atas 148 RT dan kader lingkungan sebanyak 1.200 orang (Republika Online, 2009a). Juara I diraih oleh RT 02/RW 15 Kampung Bulak Klender Jakarta Timur. Juara II adalah RT 08/RW 01 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat. Juara III diraih oleh RT 01/RW 03 Mampang Prapatan Jakarta Selatan. Juara IV diraih oleh RT 06/RW 011 Warakas Tanjung Priok Jakarta utara. Juara V adalah RT 02/RW 01 Serdang kemayoran Jakarta Pusat.

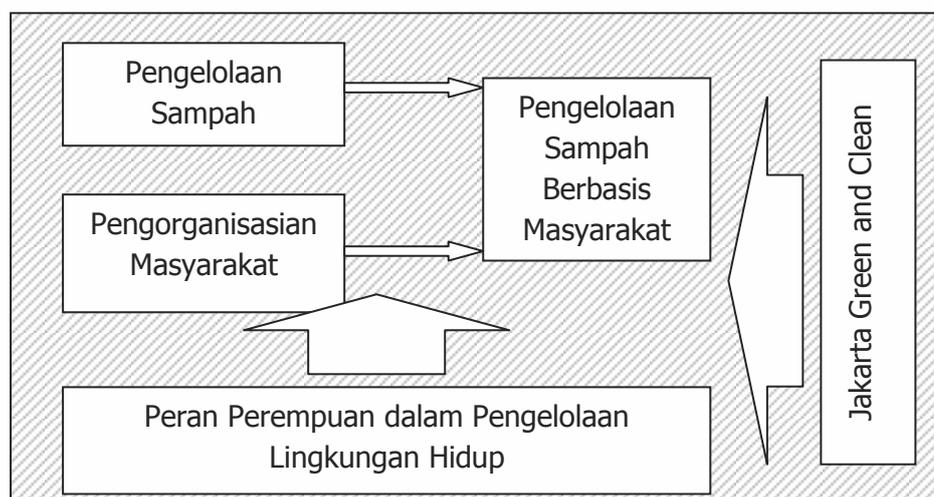
Pelaksanaan JGC kedua, pada tahun 2007, diikuti oleh 623 RT dan 7.258 kader lingkungan (ACT, 2007). Pemenang pertama, RT 5 RW 8 Kelurahan Ciracas berhak membawa pulang uang hadiah Rp.15 juta berikut trofi. Sebagai Pemenang II jatuh pada RT 12 RW 3 Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan hadiah uang Rp.10 juta dan trofi. Lalu, Pemenang III adalah RT 7 RW 4 Kedoya Utara, Jakarta Barat dengan hadiah uang Rp.7 juta dan trofi. Urutan IV adalah RT 10 RW 2 Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara, urutan V adalah RT 3 RW 3 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Jakarta *Green and Clean* ketiga dilaksanakan pada tahun 2008, dengan perubahan pada tingkat wilayah administrasi peserta dari tingkat RT menjadi tingkat RW. JGG ketiga diikuti oleh 300 RW dan 30.768 kader lingkungan (Unilever, 2008). Juara pertama diraih oleh RW 7 Kebayoran Lama Jaksel dengan hadiah Rp. 20 juta. Juara kedua RW 13 Cipinang Melayu, Jakarta Timur dengan hadiah Rp. 15 juta. Juara ketiga RW 06 Pesanggrahan Jakarta Selatan dengan memperoleh hadiah Rp. 10 juta. Lalu RW 2 Pasar Minggu Jakarta Selatan dan RW 03 Semper Barat, Jakarta Utara, masing-masing mendapat hadiah Rp. 5 juta.

Tahun 2009 diselenggarakan JGC keempat, yang mulai mengategorikan RW pesertanya menjadi dua, yaitu wilayah maju dan berkembang, dengan jumlah peserta sebanyak 500 RW dan 41.250 kader lingkungan (Republika Online, 2009b). Perlombaan diikuti oleh seluruh kelurahan di DKI Jakarta dan setiap kelurahan diwakili oleh 3 RW. Satu RW mewakili kategori wilayah maju sedangkan 2 RW lainnya mewakili kategori wilayah berkembang. Juara umum kategori wilayah maju adalah RW 013 Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Sedangkan *runner up* 1 adalah RW 04 Kedoya Utara, Jakarta Barat; *runner up* 2 RW 06 Pesanggerahan, Jakarta Selatan; *runner up* 3 RW 03 Malaka Sari, Jakarta Timur; dan *runner up* 4 RW 03 Semper Barat, Jakarta Utara. Sedangkan juara umum kategori wilayah berkembang adalah RW 012 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Selain trofi, kedua peserta yang meraih juara umum juga mendapatkan hadiah sebesar Rp.15 juta dan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp.25 juta.

Jakarta Green and Clean kelima dilaksanakan pada tahun 2010, yang kali ini diikuti oleh 250 kelurahan, yang diwakili oleh 1 RW wilayah maju dan 2 RW wilayah berkembang, dan 70.000 orang kader lingkungan (BPLHD DKI Jakarta, 2010). Juara Umum diraih oleh Kelurahan Malaka Sari yang mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.30 juta. *Runner up* 1 diraih oleh Kelurahan Cikoko. *Runner up* 2 diraih oleh Kelurahan Cipinang Melayu. *Runner up* 3 diraih oleh Kelurahan Rawa Buaya. *Runner up* 4 diraih oleh Kelurahan Cempaka Putih Barat. Seluruh *runner up* mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.15 juta.

2.6. Kerangka Teoretik



Gambar 2.3. Kerangka Teoretik

2.7. Kerangka Pikir

1. Kegiatan pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 013 Cipinang Melayu selama tahun 2008 hingga 2010 dapat dilihat dari lima komponen yang mempengaruhi pelaksanaannya, yaitu kelembagaan/organisasi, teknik/operasional, pembiayaan, partisipasi, dan peraturan. Kelembagaan/organisasi berfungsi sebagai penggerak seluruh sistem, yang menyangkut tentang bentuk dan struktur organisasi pengelola, personalia, dan tata laksana kerja. Teknik/operasional meliputi proses pewadahan, penempatan, serta pemanfaatan dan daur ulang sampah hingga ke TPS. Pembiayaan adalah komponen pendukung efektivitas kerja dari seluruh sistem, mencakup antara lain sumber pendanaan, dana operasional, pemeliharaan dan investasi. Partisipasi adalah kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah, dilihat dari perubahan sikap, perubahan perilaku, dan bentuk partisipasi. Peraturan termasuk di antaranya peraturan pemerintah menyangkut pengelolaan sampah.
2. Upaya pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan sampah didefinisikan sebagai pembangunan kapasitas masyarakat agar dapat melanjutkan kegiatan dari suatu program pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dalam hal ini JGC, setelah organisasi yang memfasilitasinya meninggalkan program. Keberhasilan warga RW 013 Cipinang Melayu mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program JGC ditentukan oleh adanya batas wilayah yang jelas, kesesuaian peraturan dengan kondisi setempat, pengaturan pilihan kolektif, pengawasan, penggolongan sanksi, mekanisme resolusi konflik, serta pengakuan atas hak untuk mengorganisasikan diri.

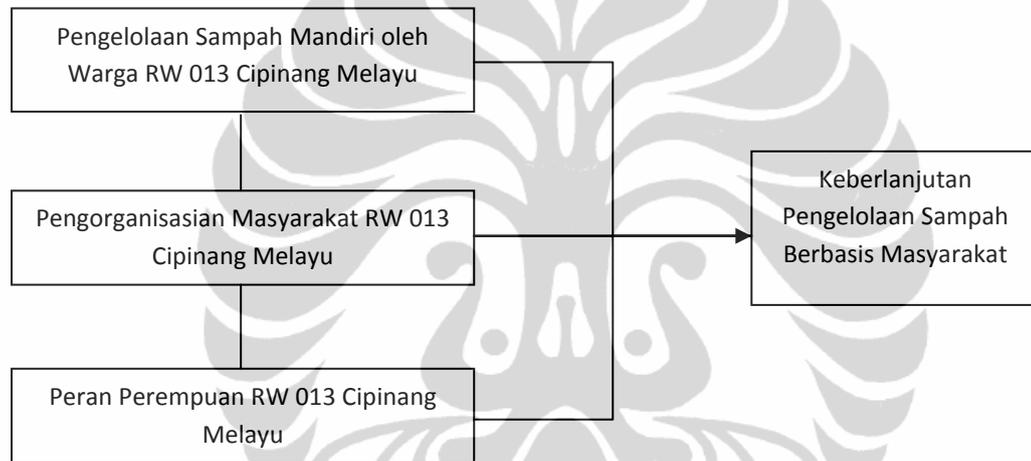
3. Peran perempuan RW 013 Cipinang Melayu dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya dilandaskan pada upaya perempuan dalam hal memenuhi kebutuhan praktis sekaligus mencapai kepentingan strategis mereka. Melalui peran tersebut diharapkan dapat tercipta suatu hubungan kekuasaan dan pembagian kerja yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam lembaga RW 013 Cipinang Melayu, sehingga menguatkan kendali perempuan dalam mendorong tindakan yang baru dan lebih efektif dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga.

4. Pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat salah satunya dapat dilihat dari kegiatan pengelolaan sampah yang berjalan baik di tingkat RW. Di RW 013 Cipinang Melayu, kegiatan pengelolaan sampah berdasarkan partisipasi masyarakat mulai berkembang setelah warganya mengikuti program JGC, yang memfasilitasi upaya pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Pengelolaan sampah yang baik juga harus didukung oleh pengorganisasian yang baik dari warga yang terlibat di dalamnya, sehingga partisipasi mereka berjalan efektif. Lebih lanjut, partisipasi warga 013 Cipinang Melayu secara umum tidak terlepas dari peran ibu rumah tangga di wilayah tersebut yang sesungguhnya dominan di dalam kegiatan pengelolaan sampah. Dengan demikian, pengelolaan sampah berbasis masyarakat pada warga RW 013 Cipinang Melayu dapat diartikan sebagai suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, yang keberlanjutannya harus didukung oleh kualitas kegiatan pengelolaan sampah oleh warga, pengorganisasian masyarakat, dan peran perempuan.



Gambar 2.4. Kerangka Pikir

2.8. Kerangka Konsep



Gambar 2.5. Kerangka Konsep

2.9. Hipotesis Pengarah

Adanya hubungan antara peran perempuan RW 013 Cipinang Melayu, pengorganisasian masyarakat RW 013 Cipinang Melayu, dan pengelolaan sampah mandiri oleh warga RW 013 Cipinang Melayu, dengan keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah tersebut

3. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu untuk memahami keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat oleh warga RW 013 Cipinang Melayu, maka peneliti menggunakan paradigma kualitatif, yaitu paradigma yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial, sebagai pendekatan penelitian (Creswell, 1994). Paradigma kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena perhatian utama peneliti mengarah pada proses dan pemaknaan pada interaksi sosial manusia dalam kehidupan nyata. Selain itu, peneliti merasakan adanya kebutuhan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan lebih lanjut fenomena keberlanjutan pengelolaan sampah oleh warga RW 013 Cipinang Melayu dan mengembangkan teori yang mengaitkannya dengan pentingnya peran perempuan.

Penelitian dilakukan dengan metode *case study* (studi kasus), yaitu peneliti mengeksplorasi suatu kasus yang terikat oleh waktu dan aktivitas (program, kejadian, proses, institusi, atau kelompok sosial) dan mengumpulkan informasi detail dengan menggunakan beragam prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Creswell, 1994). Metode ini sesuai untuk penelitian ini karena peneliti tidak dapat memanipulasi perilaku mereka yang terlibat di dalam kegiatan yang diteliti (Yin, 2003). Selain itu, Yin juga menyebutkan bahwa metode ini juga digunakan untuk memahami kasus yang tidak dapat dipisahkan dari konteks, yang dalam hal ini kegiatan warga RW 013 Cipinang Melayu dalam pengelolaan sampah terikat dengan konteks pengelolaan sampah itu sendiri.

Berdasarkan hipotesis pengarah yang dibuat, peneliti meyakini adanya hubungan antara ketiga konsep berikut, yaitu peran perempuan RW 013 Cipinang Melayu, pengorganisasian masyarakat RW 013 Cipinang Melayu, dan pengelolaan sampah mandiri oleh warga RW 013 Cipinang Melayu, dengan keberlanjutan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mengingat tujuan penelitian adalah menjelaskan masing-masing konsep dan memahami keberlanjutan pengelolaan sampah sebagai hasil dari hubungan antar konsep tersebut, maka metode studi kasus

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus eksplanatif (*explanatory case study*), yaitu menjelaskan hubungan yang dianggap kausal dalam intervensi kehidupan nyata yang terlalu kompleks untuk strategi survei atau eksperimental (Yin, 2003).

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur, sesuai dengan tujuan penelitian. Lokasi ini dipilih karena:

1. Sistem pengelolaan sampah padat yang dilaksanakan di RW 013 Cipinang Melayu adalah inisiatif masyarakat sendiri.
2. Sistem ini sebagian besar melibatkan perempuan yang berpartisipasi aktif di dalamnya.
3. RW 013 Cipinang Melayu telah mempertahankan posisinya sebagai tiga besar kompetisi Jakarta Green and Clean selama tahun 2008, 2009, 2010.
4. Aktivitas yang dilaksanakan dapat menjadi percontohan model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tempat lainnya.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud oleh peneliti adalah penduduk RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur. Mengingat informasi yang dibutuhkan untuk memahami keberlanjutan pengelolaan sampah di RW 013 Cipinang Melayu hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu dalam populasi, maka metode penentuan informan yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*, yaitu informan ditetapkan oleh peneliti dengan sengaja berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, alasan mengapa informan ditentukan terlebih dahulu, bukan secara acak, adalah untuk mendapatkan kekayaan data yang lebih rinci dan mendalam yang dimiliki oleh informan tertentu (Ezzy, 2002). Peneliti menggunakan metode *combination purposive sampling*, yaitu menggabungkan beberapa strategi *purposive sampling* (Patton, 1990), yang dalam hal ini adalah *criterion sampling* dan *snowball sampling*.

Pemilihan informan berdasarkan strategi *criterion sampling* didasarkan pada satu atau lebih kriteria pokok, yaitu keahlian (*expertise*), keterlibatan (*involvement*), pengalaman (*experience*), serta dapat dipercaya (*accountability*). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang aktif terlibat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan program JGC, yang terdiri atas perangkat RW 013 Cipinang Melayu, fasilitator program di RW 013 Cipinang Melayu, penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah di RW 013 Cipinang Melayu, dan perempuan RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur yang menjadi kader lingkungan pada program JGC. Adapun kriteria inklusi yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria perangkat RW 013 Cipinang Melayu: Penduduk resmi RW 013 Cipinang Melayu yang menjabat sebagai salah satu perangkat RW 013 Cipinang Melayu sedikitnya selama satu tahun pada masa program JGC berlangsung.
- b. Kriteria fasilitator program JGC di RW 013 Cipinang Melayu: Penduduk resmi di RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur yang bertindak sebagai fasilitator program JGC di RW 013 Cipinang Melayu sedikitnya selama satu tahun pada masa program tersebut berlangsung.
- c. Kriteria penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah di RW 013 Cipinang Melayu: Penduduk resmi di RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur yang bertanggung jawab dalam masing-masing kegiatan pengelolaan sampah di RW 013 Cipinang Melayu sedikitnya selama satu tahun pada masa program JGC berlangsung.
- d. Kriteria perempuan kader lingkungan RW 013 Cipinang Melayu: Perempuan penduduk resmi di RW 013 Cipinang Melayu Jakarta Timur, berusia 25-60 tahun, dan aktif sebagai kader lingkungan dalam program JGC sedikitnya selama satu tahun.

Penggunaan strategi *snowball sampling* diperlukan karena peneliti sebagai orang luar belum mengetahui betul siapa saja yang mengetahui berbagai hal berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah yang ingin diteliti. Menurut Aston & Bowles (1998), *snowball sampling* digunakan ketika kita tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang kerangka sampel dan memiliki akses yang terbatas terhadap orang-orang yang memenuhi kriteria dalam penelitian. Peneliti harus melakukan

penelusuran terlebih dahulu mengenai siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah RW 013 Cipinang Melayu dan memenuhi kriteria inklusi yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat dijadikan sebagai informan yang dapat membantu penelitian ini. Langkah-langkah yang diambil untuk menemukan informan yang tepat bagi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menemui *gatekeeper*, dalam hal ini ketua RW 013 Cipinang Melayu, untuk mendapatkan informasi mengenai siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan pengelolaan sampah di daerahnya.
2. Dari ketua RW diharapkan akan muncul informasi seputar siapa fasilitator program JGC di wilayah tersebut.
3. Fasilitator program yang ditemui oleh peneliti diharapkan akan mengarahkan peneliti pada tiga anggota tim yang dianggapnya cukup representatif sebagai informan di dalam penelitian ini.
4. Fasilitator program diharapkan dapat merekomendasikan warga perempuan yang sesuai dengan kriteria inklusi sebagaimana disebutkan di atas.

Meskipun tidak ada aturan yang baku mengenai jumlah sampel dalam penelitian kualitatif, penentuan jumlah sampel biasanya bergantung pada sejumlah kecil informan dengan tujuan penelitian yang mendalam dan terperinci (Miles & Huberman, 1994; Patton, 1990). Kecukupan jumlah informan ditentukan dari relevansi, kelengkapan, dan jumlah data yang terkumpul (Morse, 1991). Hal ini, menurut Morse, ditandai dengan kejenuhan, yaitu ketika tidak ada lagi data, ide, atau teori yang dapat ditambahkan dalam penelitian. Pengambilan sampel akan terus berlangsung hingga tidak ada lagi informasi baru yang didengar dalam wawancara (Patton, 1990). Meskipun demikian, untuk mempermudah proses pengumpulan data, peneliti menargetkan terlebih dahulu jumlah informan, yaitu sebanyak delapan orang, yang terdiri atas:

1. Satu orang perangkat RW 013 Cipinang Melayu.
2. Satu orang fasilitator program JGC di RW 013 Cipinang Melayu.
3. Tiga orang penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah di RW 013 Cipinang Melayu.
4. Tiga orang perempuan kader lingkungan RW 013 Cipinang Melayu.

Informan perempuan berasal dari 3 RT di wilayah RW 013 Cipinang Melayu yang memiliki kader lingkungan JGC terbanyak, yaitu RT 4, 5, dan 6, dengan proporsi 1 orang dari masing-masing RT. Pemilihan ketiga RT tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mempermudah penelitian, letaknya yang berdekatan, dan menjadi pusat dilaksanakannya semua kegiatan pengelolaan sampah.

3.4. Konsep Penelitian

Konsep utama dari penelitian ini adalah:

1. Pengelolaan Sampah Mandiri oleh Warga RW 013 Cipinang Melayu
2. Pengorganisasian Masyarakat RW 013 Cipinang Melayu
3. Peran Perempuan RW 013 Cipinang Melayu
4. Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

3.5. Data Penelitian

3.5.1. Sumber Data

Ada beberapa sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

3.5.1.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data, yaitu melalui:

1. Wawancara dengan perangkat RW 013 Cipinang Melayu, fasilitator Program JGC di RW 013 Cipinang Melayu, penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah di RW 013 Cipinang Melayu, dan perempuan kader lingkungan di RW 13 Cipinang Melayu.
2. Observasi di wilayah RW 013 Cipinang Melayu untuk melihat langsung bagaimana kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Tabel 3.1. Matriks Konsep Penelitian dan Metodenya

Tujuan Penelitian	Konsep Penelitian	Definisi Konsep	Metode
Menjelaskan kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 013 Cipinang Melayu sebelum dan sesudah mengikuti program Jakarta <i>Green and Clean</i> .	Pengelolaan Sampah Mandiri oleh Warga RW 13 Cipinang Melayu	Suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang pelaksanaannya ditentukan oleh kelembagaan/organisasi, teknik/operasional, pembiayaan, partisipasi, dan peraturan	Wawancara mendalam; Observasi; Studi dokumen.
Menjelaskan upaya pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh warga RW 013 Cipinang Melayu sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program Jakarta <i>Green and Clean</i> tahun 2008, 2009, dan 2010.	Pengorganisasian Masyarakat RW 13 Cipinang Melayu	Pembangunan kapasitas masyarakat agar dapat melanjutkan kegiatan dari suatu program pembangunan berbasis masyarakat setelah organisasi yang memfasilitasinya meninggalkan program tersebut.	Wawancara mendalam; Studi dokumen.
Memahami peran perempuan RW 013 dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tersebut.	Peran Perempuan RW 13 Cipinang Melayu	Upaya perempuan dalam hal memenuhi kebutuhan praktis sekaligus mencapai kepentingan strategis mereka agar dapat tercipta suatu hubungan kekuasaan dan pembagian kerja yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam lembaga RW 013 Cipinang Melayu, sehingga menguatkan kendali perempuan dalam mendorong tindakan yang baru dan lebih efektif dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga.	Wawancara mendalam; Studi dokumen.
Memahami kegiatan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat pada warga RW 013 Cipinang Melayu.	Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Suatu kegiatan mengurangi dan menangani sampah yang didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, yang keberlanjutannya dipengaruhi oleh bentuk pengelolaan sampah oleh warga, pengorganisasian masyarakat, dan peran perempuan.	Wawancara mendalam; Studi dokumen.

3.5.1.2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendukung penelitian ini, yaitu data primer yang diperoleh orang lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder didapatkan melalui dokumen atau catatan publikasi dari RW 013 Cipinang Melayu, Kelompok PKK RW 13 Cipinang Melayu, Gerbang Darling maupun PT Unilever Indonesia serta tulisan-tulisan ilmiah dalam buku, jurnal, koran dan majalah.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, sumber data yang dikumpulkan umumnya berupa data kualitatif, yaitu data dalam bentuk kata-kata, gambar, maupun rekaman yang mengandung makna. Meskipun demikian, di awal penelitian data kuantitatif yang berupa angka-angka juga digunakan oleh peneliti untuk mengetahui gambaran umum dari topik penelitian ini.

3.5.2. Instrumen dan Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan laporan penelitian, ada beberapa teknik, cara, atau metode yang dilakukan oleh peneliti dan disesuaikan dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu:

3.5.2.1. Studi dokumen dan gambar visual

Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data awal yang diperlukan oleh peneliti. Data yang digunakan sebagai data awal penelitian adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai media, seperti dokumen negara, buku, jurnal, hasil penelitian, makalah, terbitan terbatas, surat kabar, dan artikel di situs web. Dengan melakukan studi dokumen, peneliti memperoleh gambaran teoretis dan praktis mengenai kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan hal-hal lainnya yang terkait dengan penelitian ini, sehingga dapat lebih mudah memahami konteks penelitian.

Selain itu, studi dokumen juga dilakukan bersamaan dengan observasi di lapangan, dengan mencari informasi di wilayah RW 013 Cipinang Melayu sehubungan dengan laporan kegiatan, evaluasi program, dokumen, serta catatan-catatan lainnya. Peneliti juga melakukan studi dokumen lewat rekaman video dan foto-foto yang diambil oleh peneliti di lokasi kegiatan, terutama seputar kegiatan fisik pengelolaan sampah seperti pengomposan dan daur ulang. Studi terhadap hasil dokumentasi diperlukan untuk lebih mendalami konteks dan mendapatkan temuan-temuan penting yang mungkin tertinggal pasca-observasi.

3.5.2.2. Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, obyek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Peneliti melakukan observasi langsung non-partisipan karena perilaku yang relevan sudah tersedia di lokasi penelitian untuk diamati. Peneliti hanya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan:

1. Menghadiri kegiatan kemasyarakatan di wilayah RW 013 Cipinang Melayu yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, misalnya kerja bakti, rapat kegiatan, kunjungan dari warga daerah lain, dan sebagainya.
2. Melakukan pengamatan langsung terhadap berbagai kegiatan keseharian yang dilakukan warga RW 013 Cipinang Melayu, pada pagi, siang, dan sore hari. Peneliti mengunjungi rumah-rumah informan dan mengamati kegiatan pengolahan sampah skala rumah tangga yang dilakukan oleh informan tersebut. Peneliti juga menelusuri jalan-jalan di wilayah RW 013 Cipinang Melayu sambil mengamati kondisi fisik dan lingkungan kampung.
3. Mengambil gambar kegiatan pengelolaan sampah dan kegiatan lainnya yang terkait dengan penelitian.

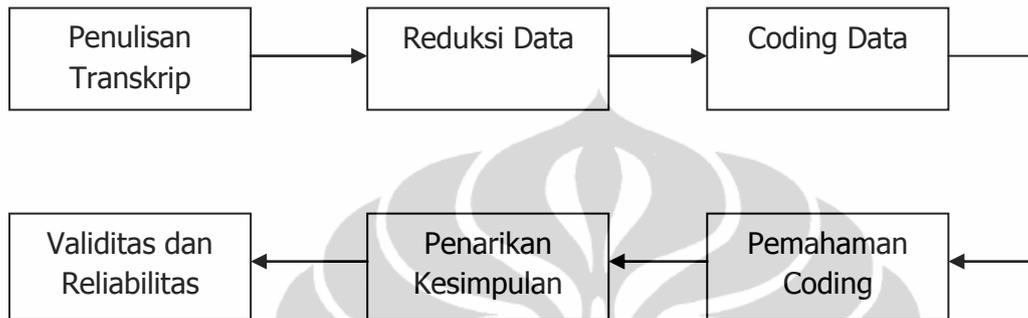
3.5.2.3. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan untuk menanyakan pandangan informan tentang hal-hal tertentu yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Alston & Bowles (1998) mengemukakan bahwa wawancara mendalam bertujuan untuk melihat fenomena sosial yang diteliti dari pandangan informan, untuk menyelidiki pemikiran dan perasaan mereka dan untuk memahami secara seksama sudut pandang mereka. Wawancara mendalam menempatkan informan sebagai mata dan telinga peneliti di lapangan, mengingat penelitian ini bertujuan untuk memahami kegiatan yang telah dilaksanakan sejak di masa lampau, yang tidak dapat diamati secara langsung oleh peneliti. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam pelaksanaan wawancara mendalam, yaitu:

1. Wawancara dilakukan secara individual dengan 8 orang informan, yaitu Bapak SDY sebagai perangkat RW 013 Cipinang Melayu, Ibu RIW sebagai fasilitator program JGC untuk RW 013 Cipinang Melayu, Ibu KNR, Ibu WTN, dan Ibu AST sebagai penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah RW 013 Cipinang Melayu, serta Ibu ELS, Ibu DNI, dan Ibu YNT yang mewakili perempuan kader lingkungan.
2. Wawancara dilakukan secara spontan, dengan pertanyaan yang mengacu pada pedoman wawancara yang disiapkan oleh peneliti.
3. Wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung, dilengkapi dengan alat perekam suara. Bila dirasa perlu, dilakukan wawancara lanjutan untuk melengkapi data yang masih kurang.
4. Untuk keperluan validitas penelitian, interpretasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil wawancara akan diperlihatkan kepada informan yang membuat pernyataan (*member-checking*), sehingga partisipan berkesempatan untuk mengklarifikasi dan mendiskusikan interpretasi tersebut.

3.5.3. Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) untuk menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian. Teknik ini tidak hanya menganalisis isi yang berwujud dari suatu data, melainkan juga informasi konteks dari data tersebut yang disebut sebagai informasi laten (Mayring, 2000).



Gambar 3.1. Analisis Data

3.5.3.1. Penulisan Transkrip

Peneliti memberikan kode awal untuk metode pengambilan data yang digunakan, untuk wawancara pada bagian ini akan digunakan nama "int", untuk dokumentasi akan digunakan nama "doc", dan untuk observasi akan digunakan nama "obs".

Rekaman hasil wawancara disalin ke dalam bentuk transkrip verbatim, yaitu transkrip yang berisi kata demi kata yang persis dengan rekaman. Supaya peneliti dapat mengidentifikasi informasi sesuai pemberi informasi, pada transkrip verbatim data informan ditulis lengkap dan dikelompokkan menurut format tertentu, yaitu menggunakan inisial nama informan, baik untuk perangkat RT/RW 013 Cipinang Melayu, fasilitator JG di RW 013 Cipinang Melayu, penanggung jawab kegiatan pengelolaan sampah di RW 013 Cipinang Melayu, maupun perempuan ibu rumah tangga kader lingkungan RW 013 Cipinang Melayu.

Data dari observasi dan arsip biasanya berupa catatan di lapangan (*field note*). Prosesnya tidak berbeda jauh dengan data hasil wawancara. *Field note* selama observasi dapat diorganisasikan ke dalam suatu format dengan judul tertentu,

misalnya: tanggal, jam, peristiwa, tempat, informan, deskripsi peristiwa, bagaimana terjadi, apa yang dikatakan, serta opini dan perasaan peneliti. Untuk observasi diberikan nama, misalnya balai pertemuan Gerbang Darling, RT 4 dengan kode "RT4", dan seterusnya. Untuk observasi di rumah informan akan dinamai dengan inisial informan tersebut, misalnya rumah ibu RIW dinamai dengan "Rumah RIW".

Adapun data dari analisis catatan organisasi (arsip) diorganisasikan ke dalam format untuk mendukung data dari observasi dan wawancara. Arsip dapat dikelompokkan sesuai dengan format data observasi. Untuk arsip akan diberikan kode, misalnya gambar foto dinamai "pic", manual/prosedur dengan "doc", instruksi kerja juga dinamai dengan "doc".

Salinan transkrip yang sudah lengkap diperlihatkan kepada informan yang bersangkutan untuk ditinjau ulang, sementara peneliti melakukan tahap analisis data yang kedua, yaitu reduksi data.

3.5.3.2. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti membaca keseluruhan transkrip verbatim untuk menemukan topik kunci yang dapat ditandai untuk memudahkan *coding* dan pengklasifikasian. Transkrip yang telah diorganisir dapat dikelompokkan ke dalam tema tertentu, dengan menggunakan kode. Pengelompokan tema tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian dan keyakinan yang dibuat oleh peneliti sesuai dengan fenomena penelitian. Kegiatan pengelompokan tema mengacu pada tujuan penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti (lihat tabel 2). Pada penelitian ini terdapat empat tema besar, berikut kodenya, yaitu:

- kode 1. Pengelolaan sampah di RW 13 Cipinang Melayu
- kode 2. Pengorganisasian masyarakat RW 13 Cipinang Melayu
- kode 3. Peran perempuan RW 13 Cipinang Melayu
- kode 4. Pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat

Data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang dikembangkan dari tujuan penelitian. Sebagai contohnya, pada tujuan penelitian pertama, yaitu menjelaskan kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 013

Cipinang Melayu sebelum dan sesudah mengikuti program Jakarta *Green and Clean*, ditampilkan kategori yang terdiri dari:

SE : Sebelum JGC
RE : Perencanaan
TE : Teknis
BI : Pembiayaan
PA : Partisipasi

Hasil pengelompokan tersebut kemudian dibuat kode-kodenya pada tahap *coding* data.

3.5.3.3. Coding Data

Data yang diperoleh dari langkah di atas, yang sudah dikelompokkan ke dalam tema tertentu, kemudian diberi kode untuk melihat kesamaan pola temuan. Jadi, *coding* dilakukan sesuai dengan kerangka teoritis yang dikembangkan sebelumnya. Dengan cara ini, *coding* memungkinkan peneliti untuk mengkaitkan data dengan masalah penelitian. Langkah-langkah dalam melakukan *coding* adalah:

1. Peneliti menyusun transkrip kata demi kata atau catatan lapangan, memberi kolom kosong di sisi kanan-kiri catatan, memungkinkan dilakukan *coding*. Secara urut dan bersambung, peneliti kemudian melakukan penomoran pada baris-baris transkrip. Selanjutnya, peneliti memberikan nama untuk masing-masing berkas dengan kode tertentu dengan menggunakan kode yang sesuai dengan catatan penelitian tersebut.
2. Peneliti melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap data dan *coding* yang dilakukan sebelumnya setelah semua data lengkap. Hasil verifikasi dan masukan dari informan terhadap hasil interpretasi peneliti turut disertakan dalam proses *coding*.
3. Kode-kode yang muncul kemudian dibandingkan dan dikontraskan satu sama lain sehingga peneliti dapat menemukan kesamaan dan perbedaan, membangun tipologi, ataupun menemukan rangkaian atau pola sebagai dasar pemahaman atas kegiatan pengelolaan sampah yang sedang diteliti.

4. Hubungan dan sifat yang muncul pada tahap perbandingan dan pengontraskan tersebut dicantumkan dan dikategorikan kembali pada dengan memberikan kode mutu sebagai berikut:

- 0 apabila pernyataan dari informan mengandung opini yang ideal bagi pengelolaan sampah berbasis masyarakat (pernyataan normatif)
- 1 apabila pernyataan dari informan mengandung fakta yang menghambat pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- 2 apabila pernyataan dari informan mengandung fakta yang netral bagi pengelolaan sampah berbasis masyarakat
- 3 apabila pernyataan dari informan mengandung fakta yang mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Sehingga pada akhirnya muncul tema utama yang diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk melakukan interpretasi dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Tabel 3.2. Contoh Coding

Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
Modal pribadi merintis penghijauan "Saya mulainya dari pribadi, karena saya punya tanaman banyak, sampe saya taruh di luar. Lama-lama berkembang digunakan sama satu rw, akhirnya selain kalau beli mahal, ya kita bagi-bagi tanamannya."	1	BI	2	KNR	211
Modal awal pribadi untuk pengomposan cukup besar "Itu sebetulnya pertama beli buat pemilahan sampah kering basah, tapi karena butuh tempat untuk menaruh komposnya, saya beli lagi, satunya 20 ribu. Tongnya satunya 65 ribu. Kalo tempat sampah warna hijau itu dari kelurahan. Kalo yang ukuran 60 liter harganya 300 ribu. Kerja sama dengan Pak sukamto. Mesin pencacah sampah 3,5 juta. Pencacah plastik 8 juta. Nah dari uang itu kita sisihkan untuk kas."	1	BI	1	KNR	207
Kegiatan Gerbang Darling lebih banyak dibiayai atas swadaya warga. "Memang pemerintah mendukung juga, tapi tidak banyak, dan tidak secara langsung. Kita memang lebih banyak swadaya."	1	BI	3	SDY	205

3.5.3.4. Pemahaman

Atas dasar *coding*, peneliti dapat memulai memahami data secara detail dan rinci. Proses ini dapat berupa “pemotongan” data transkrip wawancara dan dimasukkan ke dalam berkas khusus sesuai dengan tema/pola yang ada. Hasil observasi dan analisis dokumen dapat dimasukkan ke dalam berkas yang sama untuk mendukung pemahaman atas data transkrip wawancara. Data kemudian dicoba dicari maknanya/diinterpretasi. Dalam melakukan interpretasi, peneliti harus berpegang pada koherensi antara tujuan penelitian dan hasil *coding* data.

3.5.3.5. Penarikan Kesimpulan

Dari data-data yang sudah tersaji, peneliti mulai membuat kesimpulan awal. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode *pattern-matching*, yaitu pencarian pola-pola dengan membandingkan hasil pengolahan data dengan pola yang diperkirakan dari teori atau literatur (Yin, 1994). Jika pola yang muncul dari hasil penelitian cocok dengan pola yang sudah diperkirakan sebelumnya, maka reliabilitas dari penelitian ini meningkat. Perbandingan sesungguhnya di antara pola yang diprediksi dengan pola yang muncul belakangan mungkin saja tidak memiliki kriteria kuantitatif (Trochim, 1989).

3.5.4. Validitas dan Reliabilitas

Untuk menjamin keakuratan serta memastikan kemampuan generalisasi dan mengetahui kemungkinan replikasi penelitian, maka penting bagi peneliti untuk mengemukakan validitas dan reliabilitas dari penelitian ini. Creswell (1994) menyebutkan tiga hal yang harus dimiliki dalam penelitian, yaitu validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas. Dengan demikian, untuk memenuhi ketiga persyaratan tersebut, peneliti menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Triangulasi

Triangulasi artinya menggunakan berbagai pendekatan dalam melakukan penelitian. Artinya, dalam penelitian kualitatif, peneliti dapat menggunakan

berbagai sumber data, teori, metode dan investigasi agar informasi yang disajikan konsisten. Oleh karena itu, untuk memahami dan mencari jawaban atas pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan lebih dari satu teori dan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara dengan informan, observasi langsung ke wilayah RW 13 Cipinang Melayu, dan analisis dokumen yang menyertai kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah tersebut.

2. *Member Checking*

Member checking dilakukan dengan cara kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan verifikasi terhadap kredibilitas informasi. Langkah yang dilakukan oleh peneliti pada prosedur ini adalah:

- a. Peneliti melakukan verifikasi terhadap interpretasi data yang dibuat dengan memperlihatkan transkrip wawancara sekaligus hasil interpretasinya kepada informan yang membuat pernyataan tersebut dan memastikan bahwa interpretasi yang dibuat oleh peneliti adalah benar.
- b. Setiap temuan harus didiskusikan dan diperiksa validitasnya dengan orang di dalam organisasi tempat peneliti berasal, dalam hal ini dosen pembimbing yang memiliki keahlian serta pengalaman di bidang yang diteliti, sehingga diharapkan bahwa dosen pembimbing dapat memberikan masukan-masukan bagi penelitian tersebut.

3. *Peer Debriefing*

Peneliti juga berupaya meningkatkan kredibilitas hasil penelitian dengan cara mendiskusikan hasil penelitian tersebut dengan rekan-rekan peneliti yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang yang diteliti.

3.5.5. Kegiatan di Lapangan

Kegiatan pengumpulan data di lapangan membutuhkan waktu enam minggu hingga seluruh data terkumpul. Dua minggu pertama digunakan oleh peneliti untuk memperkenalkan diri kepada informan, mendekati diri kepada para informan tersebut, serta membiasakan diri di lapangan. Tahap pendekatan yang relatif lama tersebut disebabkan karena informan masih terkesan kurang

bersedia untuk membuka diri pada dua minggu pertama. Informan terkesan mengulur-ulur waktu ketika peneliti ingin membuat janji wawancara. Di samping itu, jawaban-jawaban yang diberikan oleh beberapa informan masih sebatas pada jawaban yang normatif, meskipun beberapa informan lain sudah cukup terbuka menjawab pertanyaan peneliti.

Untuk dapat lebih mendekati diri dengan informan, peneliti berusaha ikut terlibat dalam berbagai kegiatan mereka, seperti membantu membuat kerajinan hasil olahan sampah kering, ikut mendokumentasikan kegiatan *roadshow*, serta secara rutin menghampiri pusat kegiatan pengelolaan sampah hanya untuk sekedar berbincang-bincang secara informal dengan informan. Peneliti juga berusaha membangun hubungan yang lebih informal dengan beberapa informan yang berperan sentral, seperti fasilitator dan penanggung jawab kegiatan, dengan berkomunikasi melalui telepon maupun layanan pesan singkat. Strategi ini dianggap cukup efektif oleh peneliti karena selanjutnya informan mulai menerima keberadaan peneliti di lapangan, memberikan dukungan, bersedia untuk memberikan keterangan tanpa mengulur-ulur waktu, serta memberikan jawaban yang faktual maupun pernyataan opini yang jujur.

Hambatan yang berarti baru muncul ketika ketua RW yang menjabat pada saat JGC berlangsung (periode 2006-2011) tidak bersedia untuk diwawancarai. Hal ini disebabkan karena terdapat masalah pribadi yang kurang baik di antara mantan ketua RW tersebut dengan fasilitator yang sekarang menjadi istri ketua RW sekaligus menjabat sebagai ketua PKK. Meskipun demikian, friksi di antara kedua tokoh masyarakat tersebut tidak sampai mengganggu jalannya program pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, sehingga kurang signifikan apabila dijelaskan di dalam pembahasan. Untuk mengatasi hambatan ini, fasilitator dan beberapa informan lainnya merekomendasikan perangkat RT/RW 13 Cipinang Melayu lainnya yang menjabat pada periode 2006-2010 untuk mewakili lembaga RW tersebut. Nama Bapak SDY muncul sebagai hasil rekomendasi dari para informan karena selain sebagai wakil ketua RW periode 2006-2010, dirinya juga dianggap sebagai salah satu tokoh masyarakat yang merintis kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah RW 13 Cipinang Melayu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Wilayah RW 13 Cipinang Melayu

4.1.1. Letak Geografis

RW 13 adalah salah satu dari 22 RW di Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Wilayah RW 13 terdiri atas 9 RT dengan luas wilayah diperkirakan \pm 19 ha. RT 1 dan RT 2, yang terletak di sebelah timur, berada terpisah dari 7 RT lainnya, yang terletak di sebelah barat. Kedua bagian tersebut dipisahkan oleh jalan raya Jatiwaringin. Sebelah utara RW 13 berbatasan dengan RW 11, sebelah barat berbatasan dengan RW 11 dan RW 12, sebelah selatan berbatasan dengan RW 5, dan sebelah timur berbatasan dengan RW 7. Akses masuk ke wilayah RW 13 berada di pinggir jalan raya Jatiwaringin dan jalan raya Tarum Barat Kalimalang, Jakarta Timur. Kedua ruas jalan raya tersebut banyak dilalui angkutan umum, baik yang berupa minibus (mikolet, KWK) hingga bus ukuran sedang (metro mini, kopaja). Wilayah RW 13 juga cukup strategis karena dekat dengan fasilitas umum seperti pasar swalayan, rumah makan, perusahaan transportasi antar kota, dan akses pintu tol Pondok Gede Barat.

4.1.2. Demografi

Jumlah penduduk RW 13 Cipinang Melayu hingga tahun 2010 adalah sebanyak 2.210 orang, atau 510 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk laki sebesar 1.151 orang dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.059 orang. Warga yang berstatus penduduk tidak tetap sebanyak 35% dari total warga yang mendiami tempat tersebut. Dengan kata lain, sepertiga dari warga RW 13 Cipinang Melayu adalah warga yang tinggal di wilayah tersebut dengan mengontrak rumah. Sebagian besar dari warga di RW 13 Cipinang Melayu bukanlah penduduk asli Jakarta, melainkan pendatang dari luar Jakarta. Jumlah yang paling banyak adalah pendatang dari daerah lain di pulau Jawa, sisanya dari Sumatra dan Sulawesi.

Mayoritas warga RW 13 Cipinang Melayu berpendidikan hingga sekolah menengah atas. Sebagian besar warga di wilayah ini memiliki mata pencaharian

sebagai pegawai negeri, pegawai swasta dan buruh. Pada beberapa wilayah RT terdapat sejumlah besar pensiunan pegawai negeri. Sisanya adalah wiraswasta.

Di wilayah penelitian dapat ditemukan berbagai bentuk organisasi lembaga sosial, baik formal maupun informal, yang tumbuh dan terpelihara dengan baik. Dalam bentuk organisasi formal sebagai contoh dapat ditemukan adanya lembaga RW, RT maupun PKK, sedangkan di luar lembaga formal terdapat beberapa lembaga sosial informal yang menjadi sarana komunikasi rakyat. Mengingat sebagian besar warga beragama Islam, maka kelembagaan sosial paling utama yang terdapat di RW 13 Cipinang Melayu adalah pengajian ibu-ibu dan pengajian bapak-bapak. Masing-masing diadakan setiap sebulan sekali pada akhir bulan. Kelembagaan informal lainnya adalah kegiatan arisan. Sama seperti pengajian, arisan yang dilakukan oleh warga diadakan setiap sebulan sekali. Lembaga lainnya yang penting di dalam penelitian ini adalah organisasi Gerakan Bangsa Sadar Lingkungan (Gerbang Darling) sebagai wadah kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di RW 13 Cipinang Melayu.

4.1.3. Kondisi Lingkungan

Seluruh akses masuk menuju pemukiman penduduk di wilayah RW 13 sudah diaspal, namun sebagian di antaranya berupa gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil, bahkan ada yang hanya bisa dilalui oleh motor dan pejalan kaki. Jalan yang ada umumnya datar, meskipun di beberapa RT terdapat jalan menanjak atau menurun yang cukup curam. Di dalam wilayah pemukiman sendiri terdapat banyak ruas jalan yang menyempit, buntu, atau menyambung dengan ruas jalan lainnya. Jalur yang ada tidak terencana dengan baik dan membingungkan, sehingga orang yang berkunjung ke wilayah tersebut dapat tersesat. Nama jalan hanya terdapat pada jalan utama menuju wilayah pemukiman, namun setelah melewati beberapa belokan, jalan tidak lagi diberi nama.

Meskipun terdapat beberapa trayek angkutan umum yang melewati jalan raya Jatiwaringin, tidak ada satupun angkutan umum yang masuk ke wilayah pemukiman, sehingga untuk mencapai wilayah pemukiman biasanya digunakan kendaraan pribadi, ojek motor, maupun dengan berjalan kaki. Warga yang tidak

memiliki kendaraan pribadi umumnya terbiasa berjalan kaki dari tempat tinggalnya menuju jalan raya. Hal ini tidak sulit karena terdapat banyak akses dari dan menuju jalan raya Jatiwaringin dan Tarum Barat Kalimantan. Di samping itu, warga yang berjalan kaki juga tidak merasa panas akibat sinar matahari karena di sisi kiri dan kanan jalan atau gang banyak ditumbuhi pohon-pohon peneduh yang cukup rimbun disertai dengan pot-pot berisi tanaman hias yang tersusun berjajar di atas parit. Di halaman rumah warga yang lahannya cukup besar rata-rata memiliki pohon peneduh yang berupa tanaman buah, yang didominasi oleh pohon rambutan dan mangga.

Secara umum, kondisi jalan di wilayah tersebut bersih dari sampah. Setiap tiga meter ruas jalan ditempatkan satu buah tong sampah yang terbuat dari kaleng atau plastik, dan di beberapa ruas jalan tempat sampahnya dibedakan untuk jenis sampah kering dan sampah basah. Selain itu, warga RW 13 juga memiliki kebiasaan menyapu sendiri halamannya masing-masing setiap sore hari, melakukan kerja bakti per wilayah RT masing-masing, serta melaksanakan kerja bakti sistem "Grebekan" setiap satu bulan sekali, yaitu mobilisasi seluruh warga RW untuk melaksanakan kerja bakti di satu wilayah RT saja. Oleh karenanya, meskipun sebagian besar kelurahan Cipinang Melayu sering mengalami banjir, RW 13 adalah daerah yang bebas banjir. Di samping itu, Walikota Jakarta Timur telah menyatakan RW 13 Kelurahan Cipinang Melayu sebagai laboratorium pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Di setiap parit diusahakan bersih dari sampah dan jentik nyamuk melalui kegiatan pemantauan setiap hari Jumat.

Sebagian besar peruntukan tanah di wilayah ini digunakan untuk pemukiman penduduk dan sebagian kecil untuk fasilitas umum. Bangunan fisik yang terdapat di RW 13 Cipinang Melayu meliputi:

1. Bangunan pemukiman permanen
2. Bangunan sekolah
3. Balai pertemuan Gerbang Darling
4. Bank sampah Gerbang Darling
5. Tempat industri daur ulang sampah kering
6. Tempat pengomposan
7. Masjid

Umumnya rumah-rumah warga adalah bangunan permanen yang dibangun berdempetan satu sama lain, dan memiliki halaman yang tidak begitu luas. Rumah yang ada tidak seragam, baik dari bentuk maupun ukurannya. Beberapa rumah diubah menjadi tempat usaha seperti warung makan, toko kelontong, dan bengkel. Tidak terdapat banyak lahan kosong di wilayah ini, dan jika ada sudah digunakan untuk kegiatan pengelolaan sampah oleh kelompok Gerbang Darling.

4.2. Pengelolaan Sampah Mandiri oleh Warga RW 13 Cipinang Melayu

4.2.1. Periode pra-JGC 2008

4.2.1.1. Kelembagaan/organisasi

Sebelum berpartisipasi dalam program JGC di tahun 2008, secara kelembagaan, pengelolaan sampah di RW 13 Cipinang Melayu hanya dilakukan di bawah koordinasi lembaga RT, yang dapat disebut sebagai jalur konvensional. Pada jalur ini, terdapat petugas kebersihan yang bertugas mengumpulkan sampah rumah tangga di tiap RT untuk diangkut ke TPS resmi. Petugas kebersihan tersebut bekerja di bawah pengawasan pihak kelurahan yang menyediakan sarana dan prasarana kebersihan untuk tiap RT di wilayahnya, antara lain dalam bentuk tong sampah, gerobak, petugas kebersihan dan lahan pembuangan sampah. Pengurus RT bertugas untuk memfasilitasi sistem pembiayaan secara swadaya oleh warga, yang ditujukan untuk mengupah petugas kebersihan tersebut.

4.2.1.2. Teknik/operasional

Sampah yang terdapat di wilayah RW 13 Cipinang Melayu mayoritas berasal dari sampah rumah tangga atau sampah domestik, yang tergolong sebagai limbah padat domestik, yaitu bahan sisa proses produksi atau hasil sampingan dari kegiatan rumah tangga. Sampah yang dihasilkan oleh warga terdiri dari sampah organik, sampah non-organik, dan sampah spesifik. Sampah organik umumnya terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, sisa makanan, tulang, dedaunan, dan

ranting pohon. Sampah non-organik yang dihasilkan dari rumah tangga umumnya adalah kertas, sampah plastik, dan sampah multilayer (kemasan produk isi ulang). Adapun sampah spesifik yang dihasilkan oleh warga sebagian besar berupa baterai, pembalut wanita, botol kaleng semprot, baik pengharum ruangan, pembasmi nyamuk, dan *hairspray*, serta obat-obatan kadaluarsa.

Sebelum terlibat dalam program JGC, pengelolaan sampah rumah tangga di RW 13 Cipinang Melayu hanya dilakukan oleh petugas kebersihan. Warga membuang begitu saja seluruh sampah yang dihasilkannya tanpa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Sampah organik, non-organik, dan sampah spesifik dicampur menjadi satu. Petugas kebersihan yang mengangkut seluruh sampah warga ke TPS terdekat juga tidak melakukan pemilahan secara menyeluruh. Kegiatan pemilahan yang dilakukan oleh petugas kebersihan hanya sebatas pada barang-barang berukuran besar yang terbuat dari plastik, kaca, dan besi, yang sekiranya memiliki nilai jual yang tinggi. Sampah non-organik lainnya dibiarkan tercampur dengan sampah-sampah lainnya.

Di samping itu, warga yang tidak bersedia membayar iuran sampah atau mengupah petugas kebersihan memilih untuk membuang sampah mereka di lahan kosong atau di tempat sampah milik warga lain. Kecenderungan lain yang merugikan warga adalah perilaku pemulung yang mengaduk-aduk sampah yang ada di tempat sampah warga sehingga sampah-sampah yang awalnya sudah dicampurkan ke dalam kantong plastik menjadi tercecer sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap.

Kegiatan pengelolaan sampah dengan sistem konvensional di wilayah RW 13 Cipinang Melayu berdampak pada beberapa aspek, yaitu aspek kesehatan lingkungan, kualitas tanah, kualitas air, dan kualitas udara. Sampah yang dibuang seringkali menumpuk sebelum diangkut ke TPS. Selain itu, sampah yang dibuang secara sembarangan di selokan dan di lahan kosong telah menyebabkan munculnya sarang vektor penyakit demam berdarah, sehingga banyak terjadi kasus penyakit demam berdarah di wilayah tersebut. Di samping itu, sampah yang dibuang di lahan kosong (TPS ilegal) di wilayah RW 13 Cipinang Melayu telah mengurangi kualitas tanah, air dan udara di sekitarnya. Air lindi dengan kadar konsentrasi organik yang tinggi beserta kandungan B3 yang juga tinggi

akibat sampah tidak dipilah berpotensi mengeraskan tanah dan mencemari air tanah di sekitar lahan tersebut. Di samping itu, hasil pembakaran sampah yang seringkali dilakukan oleh warga untuk mengurangi sampah di lahan tersebut menghasilkan CO₂ dan gas metana yang berbahaya bagi kesehatan pernafasan dan meningkatkan produksi gas rumah kaca yang berakibat pada penipisan lapisan ozon.

4.2.1.3. Pembiayaan

Pada awalnya, kegiatan pengelolaan sampah di RW 13 Cipinang Melayu hanya mengandalkan petugas kebersihan yang bekerja di bawah pengawasan kelurahan Cipinang Melayu. Meskipun menjadi bagian dari prasarana yang disediakan oleh pihak kelurahan, tanpa adanya peraturan tertulis, warga tetap harus mengupah petugas kebersihan yang mengangkut sampah dari rumah mereka. Masing-masing warga dipungut iuran kebersihan sebesar Rp 2.500 – Rp 30.000 setiap bulan, tergantung besar rumah dan sampah yang dihasilkannya. Masing-masing RT memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengatur pembiayaan pengelolaan sampahnya. Secara garis besar terdapat dua bentuk kebijakan, yaitu pengupahan kolektif dan pengupahan perseorangan.

Tabel 4.1. Penggolongan Besar Iuran Kebersihan di RW 13 Cipinang Melayu

No.	Bentuk Rumah Tangga	Besar iuran yang harus dibayar perbulan (Rp)
1	Kecil (2-3 orang)	2.500 – 3.000
2	Sedang (4-6 orang)	5.000 – 10.000
3	Besar (7-10 orang)	15.000 – 20.000
4	Rumah & Tempat Usaha	25.000 – 30.000

(Sumber: Hasil Observasi, 2011)

Di wilayah RT yang mengadopsi kebijakan pengupahan kolektif, pengurus RT memfasilitasi warganya mengupah petugas kebersihan dengan memungut iuran kebersihan yang besarnya ditentukan oleh pengurus RT sesuai dengan jumlah anggota keluarga, kegiatan rumah tangga, dan volume sampah yang dihasilkan. Hasil pungutan dari warga digunakan oleh pengurus RT untuk mengupah jasa petugas kebersihan, yang sudah termasuk peralatan kebersihan dan gerobak. RT yang mengadopsi kebijakan pengupahan perseorangan membebaskan warganya membuat kesepakatan masing-masing dengan petugas kebersihan yang memungut sampah mereka. Besarnya iuran warga tergantung dari hasil kesepakatan dengan petugas kebersihan berdasarkan jumlah sampah yang dihasilkan.

4.2.1.4. Partisipasi

Sebelum terlibat dalam JGC, partisipasi warga RW 13 Cipinang Melayu hanyalah melalui pembayaran iuran kebersihan di RT masing-masing. Warga beranggapan bahwa dengan membayar iuran, mereka sudah turut serta dalam mengelola lingkungan di lingkungan tempat tinggalnya. Warga tidak merasa perlu menjaga kebersihan lingkungannya dan hanya mengandalkan petugas kebersihan untuk mengelola sampah mereka. Merasa sudah membayar iuran kebersihan, warga membuang sampahnya tanpa harus memilah terlebih dahulu dan beranggapan bahwa sampah tersebut nantinya akan dikelola oleh pemerintah.

Partisipasi semacam itu pun terkadang tidak semua warga melakukannya. Terdapat sebagian kecil warga yang tidak bersedia membayar iuran kebersihan. Kelompok kecil warga ini umumnya adalah penghuni rumah kontrakan ataupun penduduk asli yang tidak merasa perlu untuk membayar. Alasan utama dari perilaku mereka adalah keterbatasan ekonomi dan pola hidup. Masyarakat dengan kemampuan keuangan yang terbatas relatif kecil kemungkinan untuk berpartisipasi. Pola hidup yang tidak terbiasa dengan kebersihan juga menjadi penyebab minimnya kesediaan untuk berpartisipasi. Di samping itu, penduduk asli yang merasa sebagai 'pemilik' dari wilayah di RW 13 Cipinang Melayu beranggapan bahwa mereka berhak membuang sampahnya di mana saja. Konsekuensi dari perilaku tersebut adalah sampah rumah tangga yang mereka hasilkan tidak diangkut oleh petugas kebersihan dan harus dikelola oleh mereka

sendiri. Sayangnya, tindakan yang dilakukan oleh warga yang seperti ini justru lebih merugikan karena mereka membuang sampahnya di lahan kosong, yang berubah menjadi TPS ilegal, atau di tempat sampah milik warga lain.

4.2.1.5. Peraturan

Sistem pembiayaan pemungutan sampah secara swadaya oleh warga dilakukan berdasarkan pada Perda Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa Dinas Kebersihan tidak memungut retribusi untuk tingkat perumahan atau tempat tinggal, mengingat tugas Dinas atau Suku Dinas Kebersihan adalah melaksanakan pengangkutan sampah dari TPS Resmi ke TPA. Dengan demikian, pembuangan sampah dari lingkungan tempat tinggal ke TPS adalah tanggung jawab warga dan pengelola lingkungan.

4.2.2. Periode pasca-JGC 2008

4.2.2.1. Kelembagaan/Organisasi

Setelah mengikuti program JGC pada tahun 2008, pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pengelolaan sampah konvensional dan jalur pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Jalur yang disebut terakhir adalah mekanisme baru yang dilakukan oleh RW 13 Cipinang Melayu dilaksanakan dengan menggunakan nama Gerbang Darling sebagai organisasi yang membawahi kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Organisasi ini digerakkan secara sinergis dengan lembaga RW dan PKK, mengingat sebagian besar kader lingkungan Gerbang Darling adalah anggota PKK maupun pengurus RW.

Gerbang Darling didirikan pada tanggal 1 April 2007 berdasarkan Surat Pengesahan dari Lurah Cipinang Melayu, Hj. Uswatun Chasanah S., SH. Pendirian Gerbang Darling dilatarbelakangi oleh keikutsertaan warga RW 13 Cipinang Melayu dalam program JGC pada tahun 2008, dan terus berdiri hingga sekarang. Organisasi ini terdiri dari ± 152 orang warga RW 13 Cipinang Melayu yang terdaftar sebagai kader lingkungan. Kader lingkungan bertanggung jawab untuk



mensosialisasikan program pengelolaan sampah mandiri dan penghijauan kepada seluruh warga RW 13 Cipinang Melayu. Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan melalui Gerbang Darling adalah pengomposan, bank sampah, dan pengelolaan sampah kering.

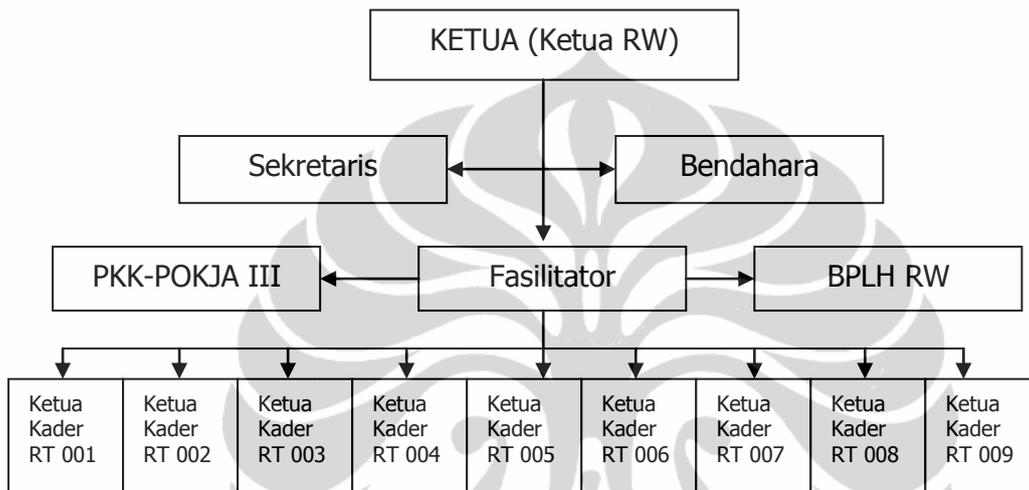
Tabel 4.2. Perbandingan Kegiatan Pengelolaan Sampah RW 13 Cipinang Melayu Sebelum dan Sesudah Program JGC.

Perbedaan	Pra-JGC 2008	Pasca-JGC 2008
Bentuk	Sistem konvensional	Sistem konvensional; Sistem pengelolaan sampah mandiri.
Pembiayaan	Iuran kebersihan	Iuran kebersihan; Penjualan olahan sampah; Dana stimulan dan hadiah JGC.
Pemilahan Sampah	Tidak ada	Ada
Pengolahan Sampah	Tidak ada	Pengomposan; Pengolahan sampah kering; Bank sampah
Partisipasi	Tidak langsung (iuran kebersihan)	Langsung (Kader Lingkungan; Pemilahan sampah; Kerja bakti)
Peraturan	Tidak ada	Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
Perilaku Warga	Membuang sampah di lahan kosong	Sadar kebersihan
Kajian Dampak	Kesehatan; Kualitas tanah; Kualitas air; Kualitas udara.	Kebutuhan terhadap lahan; Limbah B3.

(Sumber: Hasil Observasi, 2011)

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Gerbang Darling, kedaulatan organisasi tersebut berada di tangan warga RW 13 Cipinang

Melayu dan dilaksanakan sepenuhnya oleh musyawarah warga. Gerbang Darling adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan alam serta pengembangannya. Organisasi ini tumbuh dari keinginan warga RW 13 Cipinang Melayu sendiri. Para anggotanya menyebut organisasi ini sebagai organisasi yang mandiri dan independen. Mandiri berarti mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Adapun independen berarti bukan organisasi pemerintah, organisasi politik, maupun organisasi bagiannya.



(Sumber: AD/ART Gerakan Bangsa Sadar Lingkungan RW 13 Cipinang Melayu, 2008)

Gambar 4.3. Susunan Kepengurusan Gerbang Darling RW 13 Cipinang Melayu

Ketua Gerbang Darling adalah ketua RW 13 Cipinang Melayu. Meskipun demikian, yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah musyawarah warga RW 13 Cipinang Melayu. Untuk menentukan kebijakan Gerbang Darling, keputusan musyawarah warga RW 013, dan peraturan organisasi Gerbang Darling dilakukan rapat antar ketua RT dan dipimpin oleh ketua RW.

4.2.2.2. Teknik/Operasional

Setelah bergabung dalam program JGC, warga RW 13 Cipinang Melayu, melalui para kader lingkungannya, mulai mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah mandiri. Oleh sebagian warga dan para kader lingkungan, sampah yang dihasilkan dipilah-pilah, sesuai dengan jenisnya. Mereka memilah

secara langsung sampahnya, dengan menyediakan tempat sampah yang terpisah di rumahnya. Sampah organik dan non-organik yang dapat diolah sendiri disisihkan untuk dikelola di rumah ataupun secara komunal. Sampah spesifik dan sisa sampah lainnya yang tidak dapat diolah dibuang ke tempat sampah yang terdapat di depan rumah masing-masing warga. Sebagian besar wadah sampah yang digunakan berupa drum dan tong plastik karena mudah dipindah-pindah dan tidak permanen sesuai dengan lingkungan jalan yang sebagian besar berupa gang yang tidak terlalu lebar dan tanpa trotoar. Secara rutin, petugas kebersihan dari masing-masing RT mengangkut sampah warga dengan gerobak sampah ke TPS, sebelum kemudian diangkut oleh petugas kebersihan dari Pemda Jakarta Timur untuk dikelola di TPA. TPA Regional yang melayani wilayah timur Jakarta adalah TPA Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

Pengelolaan Sampah Organik

Untuk keperluan pengomposan, sampah organik dari rumah tangga yang dapat diolah umumnya berupa sisa potongan sayur, kulit buah, dan sisa makanan. Para kader menghindari bahan-bahan yang mengandung protein, seperti tulang, daging, ikan, kulit udang, kelapa dan santan, serta susu dan produknya, karena kandungan proteinnya dapat mengundang hewan yang dapat mengganggu proses pengomposan, seperti tikus, kucing, serta lalat dan larvanya. Sisa sampah organik yang tidak ingin digunakan, dibuang ke tempat sampah di depan rumah masing-masing untuk diangkut oleh petugas kebersihan. Para kader lingkungan RW 13 sudah terbiasa memilah langsung sampah organik yang mereka hasilkan dari proses memasak ke dalam tempat sampah khusus bahan-bahan organik. Di samping itu, mereka juga mengumpulkan dedaunan kering yang gugur dari pohonnya serta sisa-sisa potongan dahan dan rumput setelah pemangkasan. Berbagai jenis sampah organik tersebut kemudian dikomposkan sendiri atau dibawa ke tempat pengomposan komunal milik RW 13, yang disebut sebagai Rumah Kompos.

Rumah Kompos sendiri adalah bangunan tanpa dinding, atapnya terbuat dari plastik terpal, dan lantainya berupa *paving block*. Beberapa kader yang memiliki lebih banyak waktu luang memilih untuk mengerjakan sendiri pengomposannya di rumah, namun hampir sebagian besar kader memilih untuk mengerjakannya

secara komunal di Rumah Kompos. Di RW 13, baik di rumah warga yang melakukan sendiri maupun di Rumah Kompos, kegiatan pengomposan menggunakan kaleng bekas cat berukuran 25 liter ataupun tempayan plastik berukuran 30 liter sebagai komposternya. Komposter dilubangi bagian bawahnya untuk aliran udara. Di Rumah Kompos juga terdapat komposter cair yang berupa drum plastik dengan beberapa ukuran, yaitu 60 liter, 30 liter, dan 25 liter.

Pengolahan sampah organik menjadi kompos diawali dengan mencacah sampah menjadi berukuran kecil. Untuk sampah basah dari dapur, hal ini cukup mudah mengingat sisa-sisa bahan masakan umumnya sudah berupa potongan kecil, atau para ibu dapat sekaligus memotongnya di tempat dan langsung mengumpulkannya dalam satu wadah ketika sedang memasak. Kegiatan yang cukup menyita waktu dan tenaga adalah mencacah dedaunan dan ranting pohon. Jika sebelumnya para ibu harus mencacah sampah dedaunan dan ranting pohon dengan golok hingga berukuran $\pm 2 \times 2$ cm agar mudah membusuk, kini warga RW 13 sudah memiliki mesin pencacah sampah yang dibuat sendiri oleh warga dengan biaya swadaya. Dengan demikian, mereka tidak lagi mengalami kesulitan yang berarti dalam hal membuat kompos.

Sampah harus dimasukkan ke dalam komposter setiap hari dan diaduk sampai ke dasar komposter supaya tidak berair di bagian bawah. Pengadukan juga dimaksudkan untuk memperoleh oksigen yang diperlukan untuk pernapasan mikroba kompos. Untuk mengubah sampah organik menjadi kompos juga dibutuhkan kompos yang sudah jadi dengan perbandingan 1:1, ditambah dengan kotoran kambing jika ada. Jika wadah sudah penuh, kompos harus dimatangkan dalam waktu sekitar 10-14 hari dan distabilkan dahulu hingga suhunya menjadi seperti suhu tanah kurang lebih selama dua minggu, kemudian baru dapat dipanen. Agar mencapai suhu tanah, suhu kompos distabilkan dengan menempatkannya di lantai Rumah Kompos yang sudah dialasi dengan plastik terpal dan ditutupi dengan karung beras.

Ketika kompos sudah mencapai suhu yang diinginkan, kompos kemudian diayak terlebih dahulu untuk memisahkan bagian yang kasar, lalu dikemas dengan plastik berukuran 1 kg dan siap dijual. Di Rumah Kompos RW 13 Cipinang Melayu saat ini terdapat lebih dari 30 komposter yang terus menerus digunakan

untuk membuat kompos. Pengomposan dimulai lagi dengan wadah lain, dengan menggunakan kompos kasar sisa ayakan dari wadah pertama sebagai pemicu/aktivator-nya. Kegiatan panen kompos dilakukan seminggu hingga dua minggu sekali, tergantung banyaknya sampah dan kompos yang dihasilkan. Dengan demikian, usia kompos yang sedang diproduksi di Rumah Kompos berbeda-beda tergantung dari waktu pembuatannya.

Adapun dalam pembuatan kompos cair, bahan-bahan yang digunakan tidak jauh berbeda. Hanya saja, jika komposisi bahan organik sebagai bahan dasar kompos padat lebih diutamakan sampah kering seperti dedaunan, ranting, serta potongan rumput, maka bahan baku untuk kompos cair lebih banyak berupa sampah organik yang mengandung banyak air, seperti buah dan sayur. Sampah yang sudah dicacah menjadi berukuran kecil dimasukkan ke dalam komposter cair yang memiliki lubang keran di bagian dasarnya. Komposter tersebut harus dipastikan tertutup rapat untuk menghindari masuknya bakteri-bakteri lain yang tidak diperlukan serta lalat dan belatung. Selanjutnya disemprotkan campuran bioaktivator dan air, dengan perbandingan sebanyak dua sendok makan untuk satu liter air, hingga sampah terlihat berair. Kompos cair juga tidak perlu ditambah dengan kotoran kambing atau kompos yang sudah matang, melainkan cukup dengan campuran bioaktivator cair siap pakai yang dikemas dalam kemasan botol. Bioaktivator yang digunakan oleh RW 13 Cipinang Melayu adalah bioaktivator yang diciptakan khusus untuk membuat kompos cair oleh Sukanto Hadisuwito, yaitu BOISCA (Bioactivator - Organization for Industrial Spiritual and Cultural Advancement).

Setiap kali tutup komposter dibuka dan sampah ditambahkan ke dalam komposter, campuran bioaktivator juga harus disemprotkan untuk mempercepat proses pembusukan dan menghilangkan bau tidak sedap yang ditimbulkan dari proses penguraian oleh bakteri pada proses anaerob. Dalam waktu dua minggu, kompos cair sudah siap dipanen, dengan cara menuangkannya melalui keran ke dalam kemasan botol kaca. Kompos cair yang sudah dituang ke dalam botol harus didiamkan dulu selama dua hari sebelum digunakan. Mengingat kompos cair tersebut masih berupa konsentrat, maka penggunaannya harus dicampur

lagi dengan air sebanyak lima kali jumlah kompos cair sebelum diaplikasikan pada tanaman.

Pengelolaan Sampah Non-organik

Untuk sampah non-organik, RW 13 Cipinang Melayu memiliki beberapa jalur pengelolaan sampah, yakni melalui bank sampah, pengolahan sampah kering, dan jalur konvensional. Sampah non-organik yang dihasilkan rumah tangga warga RW 13 Cipinang Melayu berupa kertas, karton, plastik, logam/kaleng, kaca, dan plastik multilayer. Beberapa jenis sampah non-organik dapat didaur ulang kembali menjadi bahan dasar produk baru melalui industri daur ulang, seperti botol dan gelas plastik, botol kaca, serta kaleng aluminium. Sampah non-organik seperti kertas dan karton juga dapat didaur ulang menjadi produk baru, tanpa harus menggunakan peralatan setingkat industri dan dapat dilakukan di tingkat rumahan. Adapun sampah kemasan plastik multilayer dan kantong plastik kresek (*polyethylene*) adalah jenis sampah non-organik yang sulit untuk didaur ulang menjadi produk baru. Sampah plastik multilayer sulit untuk didaur ulang karena terdiri dari dua jenis plastik atau lebih, namun plastik jenis ini banyak sekali digunakan sebagai kemasan produk isi ulang barang-barang kebutuhan rumah tangga, seperti sabun cair, sabun pencuci piring, detergen, dan sebagainya.

Setelah memilah sampah organik dan non-organik, warga RW 13 Cipinang Melayu memilah kembali sampah non-organik sesuai peruntukannya. Sampah yang dapat didaur ulang dikirim ke bank sampah untuk dikumpulkan dan dijual kepada pengepul/lapak. Bank sampah RW 13 Cipinang Melayu adalah suatu bangunan non-permanen yang tersusun dari bambu dan beratapkan terpal. Bank sampah berdiri di atas lahan kosong milik seorang warga yang sewaktu-waktu dapat mengambil kembali lahan tersebut untuk dialihfungsikan. Bank sampah dilengkapi dengan rak-rak penyimpanan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah-sampah yang siap dijual umumnya sudah dibersihkan, sehingga harganya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sampah yg masih kotor.

Kegiatan menyetorkan sampah di bank sampah dilakukan setiap hari Sabtu siang. Warga cukup datang ke bank sampah dengan membawa sampah non-organik

yang ingin disetorkan, kemudian sampah tersebut diterima oleh kader Gerbang Darling yang bertugas menimbang dan mencatat jumlah sampah yang disetorkan. Untuk meningkatkan harga jual, sampah-sampah tersebut sudah dibersihkan atau dikeringkan sebelum disetorkan ke bank sampah. Sampah kemudian dikelompokkan sesuai jenisnya. Tiap jenis sampah yang ada ditempatkan di dalam karung, kantung plastik sampah ukuran besar, ataupun diikat. Kumpulan sampah-sampah tersebut kemudian disusun di rak penyimpanan sesuai jenisnya. Kader yang bertugas juga bertanggung jawab melakukan transaksi penjualan dengan pengepul/lapak yang secara rutin mendatangi bank sampah.

Di bank sampah RW 13 Cipinang Melayu saat ini terdapat gelas plastik, botol plastik, koran, kertas, serta karton dan kardus. Jenis sampah tersebut adalah jenis yang paling diminati oleh pengepul karena memiliki harga jual yang termasuk tinggi mengingat bahan-bahan tersebut dibutuhkan untuk industri daur ulang.

Di awal berdirinya bank sampah, warga juga menyetorkan kantung plastik kresek untuk dijual. Namun sayangnya, harga kantung plastik kresek tidak setinggi jenis sampah lainnya, sehingga pada perkembangannya, setelah para kader memperoleh pengetahuan mengenai cara mengolah kantung plastik tersebut menjadi kerajinan tangan, bahan tersebut tidak lagi disetorkan ke bank sampah, melainkan diolah di pusat pengolahan sampah kering. Mereka yang terlibat dalam kegiatan membuat kerajinan dari sampah kering biasanya mengumpulkan sendiri bahan baku yang mereka butuhkan, dengan cara memilah sampah yang ada di rumah masing-masing. Selain kantung plastik kresek, bahan baku yang dikumpulkan untuk diolah menjadi kerajinan sampah kering adalah sedotan plastik dan kemasan plastik multilayer. Bahan-bahan ini, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, adalah bahan yang sulit untuk didaur ulang kembali menjadi bahan dasar produksi, sehingga tepat sekali bila digunakan sebagai bahan baku kerajinan tangan.

Tempat pengolahan sampah kering warga RW 13 Cipinang Melayu dipusatkan di rumah ketua PKK RW 13 Cipinang Melayu yang sebelumnya menjabat sebagai fasilitator dalam program Jakarta Green and Clean tahun 2008. Ia menyediakan

lemari khusus bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan pengolahan sampah kering. Bahan baku yang sudah dikumpulkan oleh warga sebagian disimpan di tempat tersebut. Ketua PKK juga menyediakan bahan baku pelengkap, seperti tangkai dan putik bunga yang terbuat dari plastik, serta peralatan keterampilan, seperti lem, gunting, dan selotip. Meskipun kegiatan pengolahan sampah kering telah dipusatkan, warga tidak harus mengerjakan kreasinya di tempat tersebut, melainkan dapat mengolah sendiri sampah kering yang dihasilkannya di rumah, baru kemudian disetorkan ke pusat pengolahan. Mereka juga tidak mengeluarkan biaya untuk bahan baku, karena bahan tersebut dapat diperoleh dari sampah rumah tangganya sendiri ataupun dari warga lain.

Terdapat tiga jenis kerajinan sampah kering yang dihasilkan oleh warga, yaitu rangkaian bunga, anyaman, dan tas. Rangkaian bunga hasil kreasi warga RW 13 Cipinang Melayu terbuat dari kantong plastik kresek, sedotan plastik, dan bagian bawah kemasan plastik multilayer. Tiap jenis bahan tersebut dibentuk hingga menyerupai kelopak bunga, kemudian direkatkan pada tangkai dan putik plastik. Bunga yang sudah jadi dirangkai dengan beberapa bunga lainnya dan ditempatkan pada berbagai jenis vas yang beberapa di antaranya juga diolah dari sampah kering, seperti botol plastik minuman ringan dan kaleng susu.

Untuk kerajinan anyaman, mereka menggunakan kemasan sachet minuman instan, seperti kopi dan susu coklat, berukuran 8 cm x 11 cm. Kemasan yang sudah dibersihkan dari sisa bubuk minuman dilipat dan dianyam sedemikian rupa hingga berbentuk kantong yang kemudian dilengkapi dengan resleting. Kantong tersebut dibuat dengan berbagai macam ukuran sehingga dapat digunakan untuk menyimpan koin, peralatan rias, hingga telepon genggam. Beberapa warga bahkan membuat anyaman tersebut menjadi tas tangan wanita.

Tidak hanya terbuat dari anyaman *sachet* minuman instan, tas tangan wanita juga dibuat dari plastik multilayer yang berasal dari bekas kemasan isi ulang sabun cair, sabun pencuci piring, pelembut pakaian, dan lain-lain. Kemasan plastik multilayer dibersihkan dengan cara direndam dengan cairan pemutih pakaian dan dicuci dengan sabun pencuci piring. Selanjutnya kemasan tersebut digunting sesuai kebutuhan dan dijahit satu sama lain dengan benang nilon hingga berbentuk lembaran yang dapat digunakan sesuai desain yang diinginkan.

Sebelum dijahit hingga menjadi tas tertentu, lembaran plastik multilayer tersebut dilapisi dengan kain perca dan kain kanvas untuk memperkuat kualitas jahitan. Organisasi Gerbang Darling mempekerjakan seorang penjahit yang khusus bertugas untuk menjahit barang-barang dari plastik multilayer tersebut. Barang-barang dari plastik multilayer yang diproduksi oleh Gerbang Darling antara lain berupa tas belanja, tas tangan wanita, tas *laptop*, pelapis agenda, dan dompet.

Kegiatan pengelolaan sampah mandiri membutuhkan adanya lahan yang cukup untuk pelaksanaan teknis secara komunal. Dan hal ini menjadi salah satu perhatian utama bagi warga RW 13 Cipinang Melayu mengingat lahan yang digunakan saat ini adalah lahan pinjaman dari warga. Pelaksanaan teknis pengolahan sampah juga menimbulkan dampak potensial, karena warga belum mampu mengolah limbah B3 yang dihasilkan dari sisa campuran air sabun hasil mencuci plastik dan bahan-bahan lainnya yang akan dikumpulkan ke bank sampah maupun diolah menjadi kerajinan sampah kering. Limbah B3 tersebut ikut terbang bersama dengan limbah cair rumah tangga lainnya ke dalam *septic tank* maupun sistem sanitasi air (selokan, gorong-gorong, dan resapan air).

4.2.2.3. Pembiayaan

Di luar sistem pengelolaan sampah konvensional yang masih berjalan, setelah mengikuti program JGC 2008, RW 13 Cipinang Melayu juga menerapkan sistem pengelolaan sampah mandiri yang berbasis partisipasi warganya sendiri. Sebelum Gerbang Darling didirikan, sebagian besar pembiayaan dilakukan secara individual. Sistem pengelolaan sampah mandiri dirintis oleh beberapa tokoh masyarakat di wilayah tersebut dengan menggunakan dana pribadi. Beberapa ketua RT juga menggunakan dana operasional RT yang diberikan oleh kelurahan. Modal awal yang dikeluarkan oleh beberapa tokoh masyarakat seperti Ibu RIW, Ibu KNR, dan Bapak SDY untuk membangun sistem pengelolaan sampah mandiri di wilayah tempat tinggal mereka cukup besar. Mengingat sistem pengelolaan sampah tersebut membutuhkan berbagai peralatan pengolahan sampah, maka kegiatan pengolahan sampah dimulai dari skala kecil, dengan peralatan manual. Untuk pengolahan sampah kering, Ibu RIW bersama 7 orang tetangganya menghabiskan dana sekitar Rp 2 juta untuk keperluan pembelian bahan baku. Adapun untuk pengolahan khusus sampah plastik multilayer, diperlukan

70

peralatan seperti mesin jahit dan kain pelapis senilai Rp 5 juta. Untuk pengomposan, Ibu KNR mengeluarkan modal Rp 1 juta, yang sebagian besar digunakan untuk membeli komposter dan bioaktivator. Agar lebih hemat, beberapa komposter dibuat dengan memodifikasi kaleng cat, sedangkan sampah keringnya dicacah secara manual oleh warga perempuan di wilayah tersebut.

Sistem pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu baru dapat berkembang setelah meraih gelar juara program JGC pada tahun 2008 dan 2009. Ketika wilayah RW 13 Cipinang Melayu mulai ikut serta dalam program JGC pada tahun 2008, RW 13 Cipinang Melayu mendapatkan dana simultan sebesar Rp 400.000 untuk memulai kegiatan pengelolaan sampah yang mandiri. Dana tersebut juga digunakan untuk memajukan kegiatan penghijauan yang sudah ada dan pembuatan biopori. Pada tahun 2008, RW 13 Cipinang Melayu mendapatkan hadiah uang sebesar Rp 15 juta, dan pada tahun 2009 hadiah uang yang diterima dari program JGC adalah sebesar Rp 35 juta, serta sebuah mesin jahit yang dihibahkan langsung oleh PT. Unilever. Hadiah tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pengelolaan sampah mandiri oleh warga RW 13 Cipinang Melayu, terutama untuk mengembangkan kegiatan pengolahan sampah plastik dan pengomposan. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri dapat diatasi dengan menggunakan hadiah dari program JGC. Warga RW 13 Cipinang Melayu melalui organisasi Gerbang Darling kemudian menggunakan sebagian hadiahnya untuk membuat mesin pencacah kompos dan membeli beberapa komposter. Uang sisa hadiah yang belum terpakai digunakan untuk biaya operasional rutin kegiatan pengelolaan sampah, misalnya mengganti bak sampah yang rusak, memperbaiki bank sampah, dan sebagainya.

Pasca-kemenangan pada program JGC tersebut, keberlanjutan pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah mandiri di wilayah RW 13 Cipinang Melayu dilakukan melalui penjualan bahan-bahan daur ulang dari bank sampah, penjualan kompos, serta penjualan kerajinan hasil olahan sampah kering, termasuk plastik multilayer. Sampah non-organik yang dapat didaur ulang dihargai oleh pengepul/lapak antara Rp 700 – Rp 3.000 per kilogram. Pupuk kompos dijual senilai Rp 1.000 per kilogram. Adapun kerajinan hasil olahan

sampah kering dihargai mulai dari Rp 25.000 hingga Rp 500.000. Hasil penjualan disalurkan ke beberapa pos, yaitu kas Gerbang Darling, kas PKK, dan warga/kader yang memproduksinya. Dengan terus dihasilkannya sampah oleh warga di wilayah tersebut, maka kebutuhan akan sampah sebagai sumber penghasilan utama pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah mandiri akan terus terpenuhi.

4.2.2.4. Partisipasi

Ketika RW 13 Cipinang Melayu mendaftarkan diri sebagai peserta program JGC, masih banyak warga yang skeptis dan tidak peduli terhadap kegiatan program tersebut. Letak geografis juga berpengaruh pada tingkat partisipasi warga. Warga RT 1 dan RT 2 yang wilayahnya terletak di bagian timur jalan alteri Pangkalan Jati memiliki tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini disebabkan karena pusat kegiatan Gerbang Darling berada di sebelah barat jalan alteri Pangkalan jati. Untuk menuju wilayah RT 1 dan RT 2 dari pusat Gerbang Darling, kader harus menyeberangi jalan alteri Pangkalan Jati terlebih dahulu. Begitu pula dengan warga RT 1 dan RT 2 yang ingin menuju pusat kegiatan Gerbang Darling harus mengambil arah yang memutar jika mengendarai motor atau mobil. Letaknya yang sedikit terpisah inilah yang membuat warga RT 1 dan RT 2 enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan Gerbang Darling.

Sulit bagi pengurus RT/RW dan PKK untuk menarik warga menjadi kader lingkungan. Jumlah warga yang bersedia ikut berpartisipasi hanya sampai pada batas minimal persyaratan keikutsertaan program JGC. Namun setelah RW 13 Cipinang Melayu berhasil menjadi runner-up JGC tahun 2008, warga yang melihat hasil nyata secara perlahan mulai bersedia untuk berpartisipasi. Meskipun tidak berpartisipasi sebagai kader Gerbang Darling, sudah semakin banyak warga yang mau terlibat dalam menjaga kebersihan, setidaknya di sekitar rumahnya, dan memilah sampahnya untuk disetorkan ke bank sampah. Di samping itu, partisipasi warga juga terlihat pada kegiatan kerja bakti massal di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, terutama di pusat kegiatan Gerbang Darling, yaitu RT 4, RT 5, dan RT 6. Para ibu rumah tangga yang bukan kader lingkungan juga turut berpartisipasi dalam pengolahan sampah kering melalui kegiatan Bina Keluarga

Balita (BKB) yang bersinergi dengan kegiatan PKK di bawah poksus Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

4.2.2.5. Peraturan

Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di RW 13 Cipinang Melayu, selain didorong melalui program JGC, juga didasarkan pada Pasal 12 Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah rumah tangga, yaitu bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Pasal yang sama juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya diatur dengan peraturan daerah.

Sayangnya, hingga saat ini, Pemda DKI Jakarta belum menyusun peraturan pelaksanaan, baik berupa peraturan gubernur maupun peraturan daerah, yang menjelaskan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Satu-satunya peraturan daerah yang menyinggung tentang persampahan adalah Perda No.5 Tahun 1988 tentang Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah DKI Jakarta yang hanya mengatur kewajiban untuk menjaga kebersihan, serta mengatur retribusi, perizinan, dan pengawasan. Meskipun demikian, pemerintah daerah DKI Jakarta sudah membuat arahan pengembangan sistem prasarana persampahan wilayah melalui pasal 50 Peraturan Daerah No.6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta, yang menyangkut:

- a. Perluasan penggunaan teknik komposting dan alternatif teknologi lainnya dalam pengolahan sampah khususnya pada sebagian WP (wilayah pengembangan) Selatan-Utara dan WP Selatan-Selatan.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan persampahan melalui pelaksanaan konsep *Recycling* (daur ulang), *Reused* (penggunaan kembali), dan *Reduced* (pengurangan sampah).

- c. Perluasan penggunaan metode pemilahan sampah, baik di sumber sampah, dalam proses pengangkutan maupun di TPA.
- d. Pengembangan lokasi pengumpulan sampah B3 sebagai bagian dari sarana pengelolaan sampah B3 serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman sampah B3.

Mengingat tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah, maka RW 13 Cipinang Melayu belum dapat membuat peraturan tertulis yang bersifat mengikat warganya secara hukum. Pengurus RW juga tidak dapat menerapkan sanksi kepada warganya yang tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah mandiri. Meskipun demikian, terdapat kesepakatan tidak tertulis di antara warga yang menyangkut komitmen warga untuk menjaga kebersihan dan mempertahankan kelestarian lingkungan.

Salah satu kesepakatan tersebut adalah menjaga kebersihan rumah dari jentik nyamuk dan sampah. Setiap rumah dibuatkan kartu kontrol jentik dan sampah. Apabila di dalam rumah terdapat jentik pada hasil pemantauan pertama atau sampah di saluran parit depan rumah, maka warga tersebut wajib membayar denda berupa pot dan tanaman sebanyak jumlah jentik atau sampah yang ditemukan. Apabila pada pantauan kedua masih terdapat pelanggaran, maka warga yang bersangkutan akan dipersulit ketika memiliki urusan kependudukan.

Tidak adanya hukum yang mengikat membuat sistem pengelolaan sampah mandiri sulit untuk diterapkan secara menyeluruh. Dengan demikian, kegiatan pengelolaan sampah mandiri di RW 13 Cipinang Melayu sangat bergantung dari kesadaran dan kepedulian warganya untuk ikut berpartisipasi. Pada awalnya peraturan ini diiringi dengan protes warga yang keberatan. Namun setelah melalui proses pengorganisasian masyarakat yang baik, seperti yang akan dijelaskan berikut ini, pada akhirnya warga menyadari bahwa hal tersebut memberikan manfaat baik bagi mereka semua.

4.3. Pengorganisasian Masyarakat RW 13 Cipinang Melayu

4.3.1. Periode Prakarsa Masyarakat

Sebelum menjadi peserta program JGC, warga RW 13 Cipinang Melayu belum mengenal sistem pengelolaan sampah mandiri yang berbasis pada kegiatan 3R. Mereka masih beranggapan bahwa sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga tidak dapat dipergunakan kembali dan tidak memiliki nilai jual. Di samping itu, masih ada anggapan bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Partisipasi warga dirasa cukup dengan membayar iuran kebersihan saja. Sejalan dengan kondisi tersebut, kondisi sosial warga RW 13 Cipinang Melayu juga tidak terlalu menggembirakan. Berbagai kegiatan yang dilakukan di wilayah tersebut, seperti arisan, pengajian, maupun pertemuan rutin bulanan belum mampu menarik minat warga untuk bersosialisasi dengan tetangga mereka. Pengurus RT/RW 13 Cipinang Melayu juga menunjukkan pesimismenya terhadap warga yang disebut sebagai 'penduduk asli', mengacu pada penduduk asli Jakarta yaitu suku Betawi, yang sulit untuk diajak berpartisipasi dan memiliki kepribadian yang keras dan mau menang sendiri. Bagi para pengurus di tingkat RT/RW, sulit untuk mengubah kebiasaan 'penduduk asli' tersebut karena adanya resistensi terhadap warga pendatang yang dianggapnya sebagai ancaman atas tanahnya.

"...Mengubah paradigma mereka yang selama ini tinggal buang, angkut, bayar itu sulit. Bahkan kadang-kadang ada yang *ngga* mau bayar. Seperti misalnya di RT 8 karena mayoritas penduduknya orang asli, itu sulit." (Ibu RIW)

"Lingkungan RT saya saja yang bergerak itu hanya sedikit, Mbak. Saya bingung bagaimana caranya supaya ibu-ibu itu mau berpartisipasi. Apa yang bisa memotivasi orang supaya giat. Sedikit *banget* yang mau keluar." (Ibu DNI)

Sejalan dengan itu, kondisi lingkungan RW 13 Cipinang Melayu juga semakin memburuk. Banyak sampah yang dibuang di selokan yang terbuka. Selain itu, beberapa lahan kosong yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya justru dimanfaatkan sebagai TPS ilegal. Warga yang tidak bersedia membayar iuran petugas kebersihan memilih untuk membuang sampahnya di lahan kosong sehingga sangat berpotensi mencemari tanah dan meninggalkan bau tidak

sedap. Karena keberadaan TPS tersebut ilegal, maka petugas kebersihan di wilayah tersebut tidak menganggap TPS tersebut sebagai bagian dari tanggung jawabnya sehingga seringkali sampah yang ada dibiarkan menumpuk. Sebagai akibatnya, warga yang membuang sampahnya di lahan-lahan tersebut hanya membakar sampahnya untuk mengurangi jumlah sampah di TPS ilegal tersebut. Sampah yang dibakar juga tidak melalui proses pemilahan terlebih dahulu sehingga mencemari udara.

"Ada beberapa warga yang *ngga* mau bayar, ya sudah kita diamankan saja. Rata-rata pengontrak yang di lingkungan sini, alasannya *ngga* punya uang. Mereka buang sampah kadang-kadang di tempat orang...Dari hasil jajan anaknya dibuang di got." (Ibu RIW)

"Itu di depan rumah saya tadinya tanah kosong, belum dibangun sama yang punya...Orang-orang *ngga* mau bayar iuran kebersihan malah buang sampahnya di situ. Naik motor tinggal lempar saja...Kalau sudah banyak sampahnya cukup dibakar saja." (Bapak SDY)

Hal ini disebabkan karena kurang tersedianya sarana pembuangan sampah dan warga belum terbiasa untuk memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar rumah. Tempat sampah yang ditempatkan di depan rumah warga juga seringkali dikais secara sembarangan oleh pemulung untuk mencari sampah non-organik yang masih bernilai jual. Karena sampah tidak dipilah, seringkali pemulung meninggalkan sampah yang tidak diinginkannya berceceran di sekitar tempat sampah. Di samping itu, berjalan di wilayah tersebut terasa gersang dan panas karena tidak adanya tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida pada siang hari sekaligus menaungi para pejalan kaki. Kondisi ini memunculkan keprihatinan beberapa warga yang merasa terganggu dan kemudian ingin berbuat sesuatu untuk lingkungan tempat tinggal mereka tersebut.

"Tadinya *bener-bener* gersang, Mbak. *Kalo* lihat jalanan kotor saya sedih, lihat tanaman pada kering. *Kalo* lingkungan bersih, kan, enak." (Ibu YNT)

"...Memang RW 13 itu sebelumnya ya sebagaimana Jakarta pada umumnya. Kotor... Jalan kita *tuh* jalanan got lebar-lebar, dan gersang dan sangat panas. Sementara anak-anak sekolah *abis* minum es langsung buang ke got. Dibuang di jalan, dicemplungin ke got, itu biasa begitu... *Sampe* kadang got itu penuh dengan plastik. Bagaimana lingkungan rumahku ini enak..." (Ibu AST)

Melihat kondisi lingkungan RW 13 Cipinang Melayu yang semakin gersang dan kotor, serta atas munculnya keluhan beberapa warga, Ibu RIW yang saat itu menjabat sebagai ketua RT 4, juga merasa prihatin dan ingin melakukan perubahan di lingkungannya. Di awal tahun 2006, bersama dengan tetangganya di RT 6, yaitu Ibu KNR, mereka berdua mendatangi wilayah-wilayah yang pernah diliput oleh media karena keberhasilannya melakukan penghijauan dan pengelolaan sampah. Salah satu wilayah tersebut adalah RT 2/RW 15 Kampung Bulak, Klender. Kunjungan yang dilakukan oleh kedua perempuan ibu rumah tangga tersebut kemudian dilaporkan pada pertemuan bulanan perangkat RT/RW 13 Cipinang Melayu. Ide mengenai kegiatan pengelolaan lingkungan yang diusung oleh Ibu RIW disambut baik oleh para pengurus RT/RW 13 Cipinang Melayu untuk kemudian dilanjutkan dengan perencanaan kegiatan.

"...Kita lihat di TV ada lingkungan di Bulak di RW 15, kita ke sana, kita foto..." (Ibu RIW)

"...Nah, kita *pengen banget* seperti RT 15. Pertama yang dikerjakan adalah penghijauannya dulu..." (Ibu AST)

Mendekati perayaan Hari Kemerdekaan RI di tahun yang sama, atas usul Ibu RIW, RW 13 Cipinang Melayu mengadakan perlombaan penghijauan antar RT, dengan hadiah tanaman hias beserta potnya. Lomba penghijauan menjadi inisiatif awal dari perkembangan praktik pengelolaan lingkungan hidup di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, dengan tujuan utamanya untuk mengubah kondisi lingkungan RW yang gersang dan kotor. Diawali dengan perlombaan di tingkat dasawisma, yaitu satuan masyarakat terkecil setingkat di bawah RT yang terdiri dari 10-20 KK, dan dilanjutkan dengan perlombaan di tingkat RT.

Adapun dukungan dari pemerintah tidak banyak dan tidak secara langsung, antara lain berasal dari dana operasional RT dan RW yang diberikan oleh pemerintah, yang sebagian digunakan untuk merintis kegiatan pengelolaan lingkungan di RW 13 Cipinang Melayu. Selebihnya, warga menggunakan fasilitas yang sebelumnya memang sudah disediakan oleh pemerintah, seperti gerobak sampah, petugas kebersihan, dan TPS. Dibandingkan dengan wilayah RW lain yang memang dipersiapkan oleh pemerintah sebagai proyek percontohan, wilayah RW 13 Cipinang Melayu berkembang menjadi salah satu kiblat

pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan upaya warganya sendiri dan keberhasilan tersebut bukan berasal dari dukungan langsung pemerintah.

"Memang pemerintah mendukung juga, tapi *ngga* banyak, dan *ngga* secara langsung. Kita memang lebih banyak swadaya. RW 5 dijadikan proyek percontohan wilayah terpadu oleh walikota, dari pot bunga, semua dari Pemda. *Kalo* kita *kan* beli sendiri. 80% merangkak. Dana dari pemerintah ada tapi terbatas." (Bapak SDY)

Upaya penghijauan di wilayah RW 13 Cipinang Melayu bukannya tanpa hambatan. Banyak warga yang tidak mendukung upaya tersebut karena merasa keberatan jika harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membeli tanaman dan pot. Meskipun demikian, para ketua RT dan tokoh masyarakat sangat berperan dalam memberikan contoh kepada warganya dengan memelopori penempatan tanaman-tanaman hias di jalan depan rumah mereka. Banyak warga yang kemudian mengikuti langkah para tokoh masyarakat tersebut dengan sukarela membeli pot dan tanaman hias untuk ditempatkan di depan rumahnya. Sebagai hasilnya, hampir sebagian besar jalan di wilayah RW tersebut dihiasi dengan pot tanaman hias dan bersih dari sampah.

"Awalnya susah sekali. Banyak yang komentar, 'Buat apa beli pot, beli tanaman, cari makan *aja* susah.' Ya sudah saya jalan saja. Sedikit-sedikit. Saya ganti pot, saya *tanamin*, saya *ngurusin* sendiri tanamannya. Memerintah *tuh ngga* bisa, tapi memberi contoh *tuh* baru bisa." (Bapak SDY)

"*Macem-macem lah omongan* orang, 'Tanah, tanah gue' ...Kalo diajak, '*Boro-boro* buat beli pot, buat makan *aja* susah'" (Ibu RIW)

"Kita *bikin* lomba penghijauan untuk dasawisma. Mereka yang kalah *ngasih* pot ke yang menang. *Lama-lama* satu RW jadi hijau *kan*." (Ibu WTN)

"*Cuma* memang kalau warga tanpa pemimpin itu tidak ada yang merespon. '*Lu* siapa sih?' ...*Kan*, begitu ya. Tapi kalo dari pemimpinnya melakukan, terus kita mendukung, warga yang lain yang tidak suka pun minimal dia sungkan." (Ibu AST)

Tidak cukup sampai di situ, salah satu tokoh masyarakat, Bapak SDY, bersama dengan Ibu RIW dan Ibu KNR, mencoba mencari informasi mengenai wilayah lain yang dapat dijadikan tempat belajar. Selanjutnya, didapatkan tempat pelatihan yang dianggap tepat untuk belajar mengelola lingkungan. Selain RT 2/RW 15 Kampung Bulak, lokasi lainnya adalah Kebun Kompos Karinda, yaitu

tempat belajar mengolah sampah organik menjadi kompos. Beberapa warga RW 13 Cipinang Melayu kemudian diajak oleh ketiga tokoh masyarakat tersebut untuk mengunjungi kedua lokasi itu. Dari hasil kunjungan, warga kemudian memiliki pengetahuan baru mengenai cara menghijaukan lingkungan dan mengolah sampah organik yang mereka hasilkan menjadi kompos. Namun, tidak semua warga RW 13 Cipinang Melayu yang ikut dalam kunjungan tersebut langsung mempraktikkan apa yang mereka pelajari di sana. Warga masih terfokus pada upaya penghijauan di sekitar tempat tinggalnya dan merasa belum perlu untuk membuat komposnya sendiri. Di sisi lain, internalisasi nilai-nilai lingkungan terus dilakukan walaupun masih secara sporadis dan belum terstruktur. Beberapa pengurus RT lebih memusatkan perhatian pada warga yang bersedia untuk berpartisipasi dan mengupayakan adanya kemunculan nilai-nilai baru di lingkungan RW yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, yang diharapkan dapat memberikan tekanan sosial bagi warga lainnya untuk berpartisipasi.

"Kita perwakilan beberapa orang *diajarin* cara membuat kompos begini...*terus* kita *praktekin* di rumah dan berhasil. *Cuman* ya itu, bukan semua orang yang ikut itu langsung praktek. *Cuman* beberapa" (Ibu WTN)

"...Yang *ngga* mau didiamkan, saya berpikir *lama-lama* dia akan tertekan sama lingkungan..." (Ibu RIW)

4.3.2. Periode Intervensi dari Luar

Setelah sukses dengan gerakan penghijauan di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, RT 4 dan RT 6 berupaya mengintensifkan kegiatan pengelolaan lingkungan dengan mendaftarkan diri menjadi peserta JGC tahun 2007. RT 6 berhasil meraih posisi sepuluh besar dan menyempurnakan pengetahuan pembuatan komposnya sehingga dibangunlah Rumah Kompos, yang hingga kini digunakan secara komunal oleh RW 13 Cipinang Melayu. Di saat yang sama, RT 4 juga berhasil mewakili RW 13 Cipinang Melayu menjadi juara dalam beberapa perlombaan bertemakan pengelolaan lingkungan, seperti Lomba Kebersihan, Keindahan, Ketertiban (K3) dan Lomba Taman PKK. Melihat keberhasilan RT 4 dan RT 6 tersebut, pada tahun 2008, ketika program JGC berubah menjadi tingkat RW, seluruh wilayah RW 13 Cipinang Melayu ikut sebagai peserta. Untuk kepentingan

penjurian, didirikanlah organisasi Gerbang Darling sebagai wadah kegiatan pengelolaan lingkungannya.

Pengurus RT/RW, pengurus PKK, para tokoh masyarakat dan warga pada umumnya terlibat dari mulai proses perumusan AD/ART, persiapan rencana pelaksanaan, pengadaan peralatan dan perlengkapan kegiatan, sampai kepada pelaksanaan kegiatan, pengupayaan sumber dana, bantuan teknis serta pembinaan, maupun pemantauan dan evaluasi. Mereka juga terlibat dalam pemecahan masalah yang dihadapi dalam penerapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini. Salah satu dari mereka diangkat sebagai fasilitator, dan sisanya diwajibkan menjadi kader lingkungan, bersama dengan beberapa warga lainnya yang bersedia untuk berpartisipasi.

Keberadaan fasilitator ditujukan untuk menunjukkan peran pemimpin di masyarakat yang kemudian diharapkan dapat secara aktif mengajak warga masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam mengelola lingkungan. Ibu RIW diangkat sebagai fasilitator untuk RW 13 Cipinang Melayu, dengan pertimbangan bahwa ia adalah warga yang pertama kali merintis kegiatan lingkungan di wilayah tersebut, aktif di berbagai kegiatan RW/PKK, serta memiliki jaringan sosial yang luas. Ia dianggap sebagai tokoh yang mampu mengubah kondisi lingkungan hidup di wilayah RW 13 Cipinang Melayu. Ibu RIW juga mendapatkan berbagai dukungan dari pihak lain di luar RW 13 Cipinang Melayu, seperti dari fasilitator pemenang JGC sebelumnya, motivator program JGC, dan pihak kelurahan.

"...Sebelum Bu RIW berinisiatif dengan kegiatan lingkungan ini, daerah ini gersang dan tidak tertata. Perbedaannya jauh dari sekarang ini. Dulu jangankan ada tanaman pot, *ngga* ada tanaman sama sekali." (Ibu WTN)

"...Sejak dipimpin sama Bu RIW...Diadakan lomba penghijauan...Jadi sekarang *kemana-mana* penghijauannya. RW 13 jadi *ikutan* semua dari RT 1 *sampe* RT 9..." (Ibu YNT)

"...Sebelumnya belum pernah dengar apa itu JGC. Kebetulan Bu RIW ini adalah orang yang sangat aktif, baik di lingkungan maupun dalam mencari nafkah. Dia cari tahu apa itu JGC..." (Ibu AST)

"...Mungkin karena berkah dari Tuhan juga, saya jadi fasilitator atas dukungan dari rekan-rekan juga...Padahal saya juga *ngga* punya banyak modal..." (Ibu RIW)

Adapun untuk perekrutan kader lingkungan di luar kepengurusan RW/PKK dilakukan dengan melakukan kaderisasi pada tingkat dasawisma. Dari tiap kelompok dasawisma dipilih beberapa perwakilan dari mereka untuk dibina menjadi kader lingkungan. Hal ini mempermudah Gerbang Darling dalam melakukan sosialisasi, penerapan, dan pengawasan program karena kader dapat langsung diterjunkan ke unit terkecil dalam kelembagaan di RW 13 Cipinang Melayu, yaitu rumah tangga atau keluarga. Sistem kaderisasi dari kelompok dasawisma mendorong kegiatan Gerbang Darling berlangsung secara lebih efektif karena kader lingkungan lebih mengenal tetangga dekat dan lingkungan di sekitar rumahnya.

"Secara lingkungan kita punya label Gerbang Darling, tetapi kadernya melalui kelompok dasawisma. Karena kelompok dasawisma itu, kan, terdiri dari 10 sampai 20 kk. Nah, itu dikepalai *sama* satu kelompok. Pengelolannya lewat situ, sebelum kita komunkan..." (Ibu RIW)

"...Setelah ada kader, ada yang menyebar. Jadi yang *ngga* terawasi bisa dibantu sama kader..." (Bapak SDY)

"...Dari kita dulu kader yang *diinikan*. Beberapa orang, *paling* 10-20 dikumpulkan. Untuk satu RW. Nah, dari 10-20 orang itu mereka semua yang mensosialisasikan di rapat-rapat PKK RT." (Ibu AST)

Kader yang sudah terpilih diikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan sampah mandiri di bawah bimbingan ACT, sebagai salah satu persyaratan dalam program JGC. Pelatihan tersebut bertujuan untuk menanamkan pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam hal pengelolaan sampah, kepada para peserta program. Terdapat empat dasar kegiatan pengelolaan sampah yang diajarkan oleh ACT, yang terkait dengan kegiatan 3R, yaitu pemilahan sampah, pengomposan, pengolahan sampah kering, dan pendirian bank sampah. Rangkaian kegiatan pengelolaan sampah tersebut adalah bagian dari penilaian dalam perlombaan JGC. Pelatihan tersebut diharapkan dapat membuat warga di wilayah peserta JGC dapat berbuat lebih baik lagi terhadap lingkungannya, selain hanya sebatas melakukan penghijauan.

Kader yang sudah mengikuti pelatihan kemudian bertugas untuk mensosialisasikan kepada warga RW 13 Cipinang Melayu mengenai praktik pengelolaan sampah mandiri yang ilmunya mereka dapatkan. Kegiatan sosialisasi dilakukan oleh kader Gerbang Darling secara terus menerus selama program JGC berlangsung, dengan harapan agar warga RW 13 Cipinang Melayu dapat memahami serta mempraktikkan sistem pengelolaan sampah mandiri, baik secara individual maupun kolektif. Meskipun hadiah uang yang ditawarkan melalui program JGC cukup besar, motivasi yang dimiliki oleh warga RW 13 Cipinang Melayu bukan untuk memenangkan hadiah tersebut, melainkan untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggal mereka.

"Dulu kita *ngga mudeng* ya soal pemilahan sampah. Sosialisasi *ngga* berhenti. Tapi namanya kalau belum melakukan *tuh* lama pahamnya. Kita sudah mulai diadakan sosialisasi, kita sudah belajar memilah sampah, mengumpulkan sampah istilahnya di sini." (Ibu AST)

"Saya tidak ingin ikut lomba, cuma ingin meningkatkan kebersihan lingkungan rumah saya. Niat lomba kan mau cari untung ya, kalo kita sih *ngga, cuma biar* segar saja lingkungannya." (Bapak SDY)

Adapun dalam hal pembiayaan dan teknis, upaya merintis kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu oleh RW 13 Cipinang Melayu tidaklah terlalu sulit karena dibantu oleh pihak penyelenggara JGC melalui dana simultan dan berbagai pelatihan. Dana simultan digunakan untuk memulai program dengan pengadaan infratraktur serta peralatan dan perlengkapan. Pihak penyelenggara JGC juga mengirimkan seorang motivator yang berasal dari ACT untuk mendampingi RW 13 Cipinang Melayu menjalankan program tersebut. Karena berbentuk perlombaan, maka program JGC juga melakukan pemantauan dan evaluasi dalam bentuk penjurian yang mencakup penghijauan, pembuatan biopori, pengelolaan sampah mandiri, dan replikasi. Keikutsertaan RW 13 Cipinang Melayu dalam program JGC secara nyata menjadi motivasi bagi warganya untuk memajukan sistem pengelolaan lingkungan hidup di wilayah mereka.

"Mungkin kalau kita *ngga* ikut JGC *ngga* ada yang dorong juga ya, *ngga* ada yang bantu dana *sama* pelatihan." (Bapak SDY)

Atas hasil jerih payah dan kerja sama antara kader lingkungan dan warga masyarakat, RW 13 Cipinang Melayu pada program JGC berhasil meraih posisi *runner-up* di tahun 2008 dan juara umum di tahun 2009. Di samping itu, beberapa prestasi lain juga diraih oleh RW tersebut terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah DKI Jakarta, antara lain mewakili Provinsi DKI Jakarta dalam Lomba Penghijauan dan Konservasi Sumber Daya Alam yang diselenggarakan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2009 dan sebagai RW pendamping kelurahan Cipinang Melayu yang meraih *runner-up* II pada program JGC tahun 2010. Keberhasilan ini kemudian membuat RW 13 Cipinang Melayu dikunjungi oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat daerah lainnya yang ingin melakukan studi banding atau mengadakan kunjungan dinas. Selain itu, mereka juga seringkali dikunjungi oleh media cetak maupun elektronik yang datang untuk meliput kegiatan pengolahan sampah.

4.3.3. Periode Pengembangan dan Perluasan Jaringan

Setelah meraih juara umum program JGC pada tahun 2009, RW 13 Cipinang Melayu tidak diperkenankan untuk ikut serta kembali dalam program tersebut sebagai peserta tunggal, melainkan harus menjadi RW pendamping dan membuktikan hasil replikasinya ke wilayah lain. Selama tahun 2008, setelah berhasil menjadi runner-up program JGC untuk kategori wilayah berkembang, RW 13 Cipinang Melayu berupaya untuk masuk ke kategori wilayah maju yang mensyaratkan adanya replikasi ke wilayah lainnya. Untuk itu, mereka berusaha untuk menyebarkan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah mandiri ke beberapa RW yang berbatasan langsung dengan wilayahnya.

Kader lingkungan RW 13 Cipinang Melayu berhasil melakukan replikasi ke RW 5 dan RW 12 di kelurahan yang sama pada tahun 2008, sebelum akhirnya keduanya turut serta dalam program JGC tahun 2010 membawa nama kelurahan Cipinang Melayu. RW 6, RW 9, dan RW 10 Cipinang Melayu juga berhasil menjadi bagian dari replikasi RW 13 pada tahun 2009. Keberhasilan tersebut cukup membanggakan bagi warga RW 13 Cipinang Melayu karena sudah mencakup hampir seluruh wilayah yang berbatasan dengannya. Bahkan dengan didampingi oleh RW 13, RW 12 dan RW 5 berhasil membawa Kelurahan Cipinang Melayu

meraih *runner-up* program JGC di tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa RW 13 Cipinang Melayu telah mencapai target lima tahun mereka untuk meraih gelar juara dan mereplikasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ke wilayah RW lainnya.

Sebagai hasil dari replikasi yang dilakukan oleh RW 13 Cipinang Melayu, RW 12 Cipinang Melayu kini menjadi salah satu RW unggulan DKI Jakarta. Meskipun demikian, kader lingkungan RW 13 Cipinang Melayu tidak begitu saja melepaskan pembinaan di wilayah replikasinya tersebut. Salah satu bentuk pengolahan sampah yang masih dipelajari oleh kader lingkungan RW 12 Cipinang Melayu adalah membuat rangkaian bunga dari sampah kering. Pasca JGC tahun 2010, mereka masih mengunjungi wilayah RW 13 Cipinang Melayu untuk mempelajarinya dari ibu WTN, sebagai penanggung jawab pengolahan sampah kering.

Kemenangan RW 12 Cipinang Melayu telah menunjukkan bahwa RW 13 Cipinang Melayu berhasil memperluas jaringan sistem pengelolaan sampah mandiri hingga mencakup sebagian besar wilayah kelurahan Cipinang Melayu. Keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di RW 13 Cipinang Melayu yang berbasis masyarakat tidak terlepas dari dukungan moral warga dan pihak lainnya, serta kualitas kepemimpinan dari fasilitator di wilayah tersebut. Skeptisme warga mengenai pengelolaan sampah mandiri semakin berkurang setelah kemenangan tersebut. Ditambah dengan sikap altruistik para kader lingkungan yang menyumbangkan sebagian hadiah uang yang didapatkan oleh RW 13 Cipinang Melayu kepada warga yang tidak mampu yang tinggal di wilayah tersebut, sebagian warga yang awalnya tidak mendukung kegiatan tersebut mulai menaruh hati.

“Memang selama ini warga mendukung kegiatan kami karena kami tidak memisahkan diri dari warga. Ketika ada *ini itu*, kami sangat kompak untuk melakukan perbaikan. Jadi mereka berpikir, ‘Bagus bener ibu-ibu ini, bukan sekedar senang-senang. Dapat hadiah itu bukan *cuma* kader yang menikmati. Kami pernah dapat hadiah 25 juta *cash*, dari kader sampai ketua RW, ketua RT, semua kita bagi. Anak yatim, tukang sampah pun kita bagi.” (Ibu AST)

Di awal tahun 2011, suami Ibu RIW terpilih sebagai ketua RW 13 Cipinang Melayu periode 2011-2016. Dengan demikian, secara otomatis Ibu RIW diangkat

sebagai ketua tim PKK RW 13 Cipinang Melayu untuk periode jabatan yang sama. Jabatan baru fasilitator sebagai ketua PKK mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari warganya sendiri, pihak Kelurahan Cipinang Melayu, maupun dari pihak Unilever. Ketua RW 13 Cipinang Melayu periode yang baru juga dianggap mampu melanjutkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut, sekaligus mempertahankan posisi RW 13 Cipinang Melayu sebagai tempat belajar pengelolaan lingkungan hidup bagi wilayah lain. Banyaknya dukungan terhadap fasilitator tersebut juga mengarah pada dukungan terhadap program-program yang dijalankan oleh fasilitator melalui tim PKK yang juga berperan di kegiatan Gerbang Darling.

"...Kalo lihat (ketua) RW-nya insya Allah bisa berlanjut kegiatannya. Tinggal masalah limbah rumah tangganya saja. Kalau masing-masing rumah bisa konsekuen *gitu*, memilah-milah sampah basah sampah kering. Sudah ada tapi belum 100%..."(Bapak SDY)

"...Sampai tingkat kelurahan tetep mengakuinya. *Welcome banget*, Mbak, karena mereka tahu selama ini yang bekerja otaknya disini, jadi *ngga* masalah malah lebih mudah. Jadi sampai mereka bilang, 'Enak banget ya, Bu, jadi aksesnya gampang'. Sekarang pun program jadi banyak yang mendukung. Jadi *enteng lah* banyak yang *mikirin*." (Ibu RIW)

Pada saat yang sama, kegiatan pengelolaan sampah di Kampung Bulak, Klender, yang pernah menjadi tempat belajar para kader lingkungan di RW 13 Cipinang Melayu, terhenti. Hal ini disebabkan karena fasilitator yang merintis kegiatan tersebut memiliki kesibukan lain dan proses kaderisasi di Kampung Bulak tidak berhasil. Kondisi di Kampung Bulak memunculkan keprihatinan di antara para kader Gerbang Darling. Mereka tidak ingin mengalami hal yang sama di RW 13 Cipinang Melayu. Kekhawatiran tersebut cukup beralasan mengingat sebagian dari kader lingkungan adalah penduduk tidak tetap yang mengontrak rumah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, seperti Ibu ELS, Ibu YTI, dan Ibu AST. Sebagaimana masyarakat pada umumnya, mereka bercita-cita memiliki rumah sendiri. Sayangnya, rumah yang tersedia dengan harga yang terjangkau bagi mereka berada di pinggiran luar Jakarta, sehingga sulit untuk tetap berada di sekitar pusat kegiatan Gerbang Darling.

"Saya *inget* itu pertama kali kita datang ke RT 15 di Klender (Kampung Bulak), yang sekarang sudah *ngga* (aktif) lagi, karena selama ini

memang Bu T yang menggerakkan, jadi setelah Bu T sibuk, mungkin *ngga* ada proses regenerasi. Itu sayang. Itu yang sekarang ini kita antisipasi supaya tidak terjadi yang seperti itu.” (Ibu AST)

“Saya ada rencana pindah, punya rumah sendiri di cikarang.” (Ibu YNT)

“*Pengen* mbak punya rumah sendiri, sekarang kan masih *ngontrak*.” (Ibu ELS)

Hal ini menjadi tantangan baru bagi Ibu RIW sebagai fasilitator, untuk mengintensifkan proses kaderisasi di wilayah RW 13 Cipinang Melayu. Ia berpendapat bahwa kegiatan yang konsisten dalam skala kecil lebih baik bila dibandingkan dengan kegiatan berskala besar namun tidak berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan mendorong para kadernya untuk lebih mandiri, terutama dalam menghadapi media ataupun ketika memberikan pelatihan kepada masyarakat awam. Hal ini penting untuk proses kaderisasi, selain meningkatkan kemandirian dan kepercayaan diri, juga mengasah kemampuan kader ketika berbicara di hadapan publik (*public speaking*).

Ibu RIW selalu terjun langsung dalam setiap kegiatan pengelolaan sampah yang dirintisnya, meskipun terdapat banyak kader yang dibawahinya. Ia berupaya untuk mengetahui seluk beluk kegiatan yang sedang ia tekuni dengan harapan dapat membagi ilmunya kepada para kader dan warga lainnya. Di samping itu, Ibu RIW juga berusaha mendapatkan hasil yang sebaik mungkin dari berbagai kegiatan tersebut. Sebagai contohnya, dalam hal pengolahan sampah plastik multilayer, ia mempelajari terlebih dahulu berbagai bahan yang diperlukan serta cara pembuatan untuk kerajinan sampah plastik multilayer. Walaupun proses pembuatannya dilakukan oleh salah seorang kader, Ibu RIW tetap mengawasi kualitas produknya.

“...Kebetulan saya *ngerti*, dipelajari dulu komponennya apa. Misalnya tas ini. Aturan *bikimnya* saya tahu. Suatu usaha apapun kalau kita *ngga* terjun langsung jadinya buruk...Kita sudah punya ilmunya, sudah ada timnya, tapi mereka sekarang masih tergantung sama saya. Jadi *kadang-kadang* walaupun ada saya, saya mendorong mereka untuk *ngomong*. Memang awalnya *ngga* terstruktur, tapi *lama-lama* jadi percaya diri dan terbiasa menjawab pertanyaan. Saya tinggal menyimak, kalau ada keterangan yang kurang tepat. Saya juga masih membantu.”(Ibu RIW)

Fasilitator bersikap membimbing dan mengayomi tanpa mengintimidasi kader untuk melakukan hal yang terlampau berat bagi mereka. Ia mendorong mereka untuk mencoba memecahkan permasalahan terlebih dahulu berdasarkan kemampuan mereka sendiri, karena baginya, usaha kader untuk memecahkan permasalahan adalah proses belajar bagi kader untuk lebih mandiri, berinisiatif, dan kreatif. Para kader terbiasa untuk berupaya memecahkan permasalahan yang dihadapi, terkait dengan kegiatan Gerbang Darling, tanpa bantuan fasilitator. Adapun segala kesulitan yang tidak mampu dipecahkan akan mereka laporkan kepada fasilitator untuk dipecahkan bersama. Hasil akhir dari tiap kegiatan, baik yang melibatkan fasilitator maupun tidak, harus dilaporkan kepada fasilitator, yang bertanggung jawab atas Gerbang Darling. Hal ini penting karena fasilitator bertanggung jawab terhadap kebijakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh kader lingkungan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup.

"...Kami sudah dididik untuk menyelesaikan persoalan. Ya kalau ada persoalan yang kami tidak mampu kami pasti akan konsultasi ke beliau (Ibu RIW). Kami mampu menyelesaikan pun kami pasti memberitahu beliau. Kami tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahu beliau. Karena kalo ada kekurangan atau salah kami, beliau yang akan bertanggung jawab." (Ibu AST)

Pertanggungjawaban fasilitator dalam kegiatan Gerbang Darling disampaikan pada pertemuan rutin RW13 Cipinang Melayu setiap hari jumat pada akhir bulan, yang kemudian diubah oleh pengurus RW yang baru terpilih menjadi hari sabtu pada akhir bulan. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pengurus RT/RW, tokoh masyarakat, pengurus PKK, kader lingkungan, dan pihak lainnya yang terkait. Pertemuan rutin ini sangat diperlukan untuk perkembangan sistem pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu karena dapat digunakan sebagai wadah evaluasi rutin terkait sistem pengolahan sampah mandiri yang sudah berjalan selama lima tahun terakhir. Sesuai dengan AD/ART Gerbang Darling, pertemuan rutin perangkat RT/RW 13 Cipinang Melayu digunakan untuk menentukan kebijakan Gerbang Darling dan peraturan organisasi Gerbang Darling. Pertemuan rutin juga menjadi salah satu bagian dari mekanisme musyawarah warga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi tersebut.

Pertemuan rutin RW 13 Cipinang Melayu juga mempermudah mekanisme pengorganisasian masyarakat mengingat segala kegiatan yang diusung oleh

Gerbang Darling selalu disinergikan dengan kegiatan lainnya di lingkungan RW 13 Cipinang Melayu, yang berada di bawah pengawasan RW maupun PKK. Selain kegiatan BKB dan poksus UP2K, program kegiatan Gerbang Darling juga sinergis dengan pokja III dan pokja IV dalam organisasi PKK, seperti kegiatan pemilahan sampah, penghijauan dan pengomposan. Program PSN yang berada di bawah pengawasan RW juga dilakukan berbarengan dengan pengawasan pemilahan sampah dan penghijauan. Dengan demikian, tidak mengherankan jika beberapa warga memiliki jabatan rangkap di dalam dua atau tiga organisasi yang berbeda.

Selain evaluasi dan pengawasan internal yang dilakukan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu sendiri, pengawasan juga dilakukan oleh pihak-pihak di luar wilayah tersebut. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur ikut mengontrol keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah RW 13 Cipinang Melayu secara rutin. Pihak Suku Dinas Kebersihan Jakarta Timur seringkali membawa tamu dari kota/daerah lain berkunjung ke wilayah tersebut untuk memperlihatkan keberhasilan RW 13 Cipinang Melayu dalam mengelola sampah mereka. Pengawasan lain dilakukan oleh paguyuban fasilitator JGC, mengingat Gerbang Darling adalah salah satu pesertanya. Fasilitator sebagai perwakilan dari Gerbang Darling harus menyampaikan perkembangan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu kepada forum paguyuban. Media juga secara tidak langsung melakukan pengawasan dengan membuat liputan mengenai kegiatan pengelolaan sampah di wilayah ini, dan hasil publikasinya membantu publik melihat perkembangan kegiatan tersebut.

Sintesis hasil wawancara terkait dengan sub-bab 4.3 adalah sebagai berikut:

- a. Sulit untuk mengubah paradigma warga agar dapat lebih terlibat di dalam kegiatan pengelolaan sampah; partisipasi warga kurang.
- b. Munculnya TPS ilegal akibat kurangnya kesadaran warga dalam mengelola sampah mereka.
- c. Kondisi lingkungan yang buruk memicu pandangan kritis sebagian warga untuk memperbaiki lingkungan tempat tinggalnya.
- d. Pentingnya kepemimpinan di dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu.

- e. Pemimpin memberikan tekanan sosial kepada warga mereka agar bersedia berpartisipasi langsung.
- f. Pemerintah belum berperan secara langsung di dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu.
- g. Program JGC sebagai pendorong pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah; JGC juga meningkatkan pengetahuan warga mengenai pengelolaan lingkungan.
- h. Kaderisasi dilakukan melalui dasa wisma; kader bertugas mensosialisasikan kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah.
- i. Status sebagian warga sebagai penduduk tidak tetap di wilayah RW 13 Cipinang Melayu menjadi hambatan bagi proses kaderisasi.
- j. Kegiatan di dalam lembaga-lembaga sosial di RW 13 Cipinang Melayu dilakukan secara sinergis
- k. Fasilitator harus memiliki kualitas kepemimpinan yang baik, jaringan yang luas dan dukungan dari semua pihak.

4.4. Peran Perempuan dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah di RW 13 Cipinang Melayu

Terkait dengan sinergi PKK dan Gerbang Darling, peran perempuan warga RW 13 Cipinang Melayu sangat besar di dalam perkembangan kegiatan pengelolaan sampah mandiri. Kedua lembaga tersebut telah menjadi wadah kegiatan sosial para perempuan di wilayah tersebut. Organisasi PKK mengusung kegiatan yang dekat dengan peran perempuan di masyarakat. Adapun Gerbang Darling adalah suatu lembaga yang terbentuk dari kepedulian warga RW 13 Cipinang Melayu di dalam pengelolaan lingkungan, yang sebagian besar kadernya adalah perempuan.

4.4.1. PKK dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebelum melaksanakan program JGC, para perempuan warga RW 13 Cipinang Melayu sudah memiliki wadah formal untuk pemberdayaan perempuan, yaitu gerakan PKK. Gerakan PKK adalah salah satu wahana nasional untuk meningkatkan peranan perempuan dalam upaya menyejahterakan keluarga,

mulai dari tingkat nasional hingga dasawisma. Kehadiran PKK selain diharapkan mampu membawa keluarga pada kondisi sejahtera dan mandiri, juga untuk membebaskan perempuan dari belenggu patriarki. Gerakan ini tidak hanya mendidik perempuan, melainkan membina dan membangun keluarga di bidang mental spiritual dan fisik material serta peningkatan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Tujuan PKK ini tercantum dalam sepuluh program kerja, yaitu:

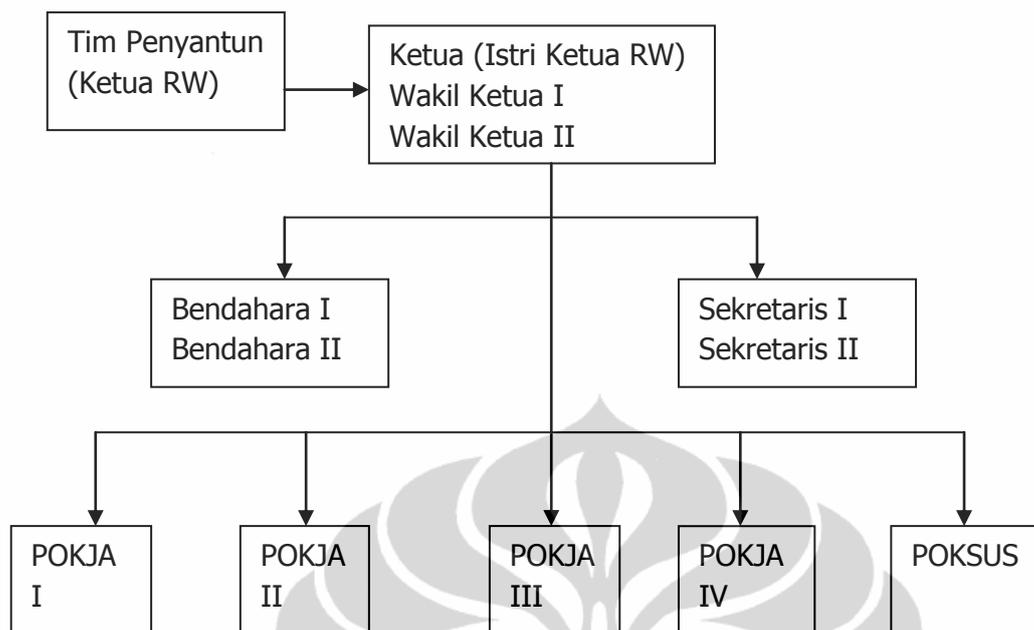
1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

Gerakan PKK dikelola oleh tim penggerak PKK, yaitu warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga, atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali gerakan PKK. Tim penggerak PKK berada pada tiap tingkatan administrasi di Indonesia, mulai dari tingkat pusat, propinsi, kotamadya/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Untuk mendekatkan jangkauan pemberdayaan kepada keluarga-keluarga secara langsung, dibentuk kelompok-kelompok PKK RW, RT dan kelompok Dasa Wisma. Kelompok dasa wisma berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang masing-masing terdiri atas 10-20 KK (d disesuaikan dengan kondisi masing-masing RT).

Di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, tim penggerak PKK terdiri atas para perempuan yang mengisi beberapa kelompok kerja (pokja), yaitu:

1. Pokja I, sebagai pelaksana kegiatan program penghayatan dan pengamalan Pancasila dan gotong royong. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja I adalah pengajian rutin, penyuluhan narkoba, santunan dan kunjungan bagi orang lanjut usia (lansia) dan anak yatim yang kurang mampu di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, kelompok oikumene, dan sosialisasi mengenai Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga (PIK).
2. Pokja II, sebagai pelaksana kegiatan program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkoperasi. Kegiatan yang dilakukan dalam Pokja II adalah BKB serta pelatihan keterampilan dan penyelenggaraan berbagai kursus sehari bagi para ibu di RW 13 Cipinang Melayu.
3. Pokja III, sebagai pelaksana kegiatan program sandang, pangan, serta perumahan dan tata laksana rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan melalui Pokja III adalah lomba penghijauan tingkat RT dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI, lomba kebersihan lingkungan tingkat Dasa Wisma, lomba pemilahan sampah tingkat Dasa Wisma, penanaman tanaman bermanfaat di lahan kosong, dan sosialisasi penanaman tanaman obat keluarga (toga) di tiap rumah.
4. Pokja IV, sebagai pelaksana kegiatan program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Kegiatan yang dilakukan oleh Pokja IV adalah pos pelayanan terpadu (posyandu) balita, posyandu lansia, dan PSN.
5. Kelompok khusus (poksus), sebagai kegiatan program-program khusus yang berada di dalam lingkungan sekretaris umum/pokja-pokja yang bersangkutan. Kegiatan yang dilakukan melalui Poksus adalah penyelenggaraan bazaar dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan RI, penjualan baju layak pakai untuk kegiatan sosial, dan pelaksanaan UP2K.

Selain mengisi pokja-pokja, para ibu rumah tangga di RW 13 Cipinang Melayu juga merangkap menjadi kader khusus yang terdiri atas kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Posyandu Balita, Posyandu Lansia, dan BKB yang pendataannya dicatat pada kegiatan pokja masing-masing. Adapun susunan kepengurusan Tim PKK RW 13 Cipinang Melayu adalah sebagai berikut:



(Sumber: SK Ketua TP PKK Kel. Cipinang Melayu No 05/KEP/PPK.Cip.Mel/III/2007)

Gambar 4.4. Susunan Kepengurusan PKK RW 13 Cipinang Melayu

Sejak awal, gerakan PKK sudah memiliki kepedulian yang mengakar terhadap permasalahan lingkungan. Dengan dibentuknya Pokja IV, dapat dikatakan bahwa gerakan PKK mengakui pentingnya pengelolaan lingkungan hidup terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya melalui peningkatan peran perempuan. Program pengelolaan lingkungan hidup pada Pokja IV bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup bagi manusia, penyuluhan mengenai polusi udara dan pencemaran lingkungan hidup, pemberantasan sarang nyamuk, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat). Pokja lain tidak secara langsung mengusung isu lingkungan hidup namun memiliki program yang sejalan dengannya, seperti pada Pokja III yang membina tata laksana rumah tangga memiliki program kerja seperti pemilahan sampah rumah tangga dan pemanfaatan lahan.

Kelompok PKK RW 13 Cipinang Melayu mengawali kegiatan pengelolaan lingkungan di wilayah mereka dengan melakukan penghijauan yang menyeluruh di wilayahnya. Terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh para kader PKK

untuk mendukung keberhasilan program penghijauan tersebut. Strategi pertama adalah bekerja sama dengan kepengurusan RW menyelenggarakan lomba penghijauan tingkat RT pada Peringatan Hari Kemerdekaan RI. Lomba penghijauan adalah bentuk sosialisasi awal pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Setelah sukses dalam menumbuhkan minat warga, sedikit demi sedikit para kader PKK kemudian mengajak warganya untuk menanam toga di pekarangan rumah masing-masing. Ajakan tersebut disambut hangat oleh para perempuan setempat, bahkan mereka bersedia untuk menyisihkan sebagian uang belanja rumah tangganya untuk membeli pot dan tanaman.

Untuk meningkatkan motivasi di antara para anggotanya, maka kelompok PKK RW 13 Cipinang Melayu juga mengikuti berbagai perlombaan yang bertemakan lingkungan hidup, seperti Lomba PHBS, Lomba Lingkungan Hijau dan Bersih se-Jakarta Timur, dan Lomba Lingkungan RW Bersih dan Sehat se-DKI Jakarta. Untuk warga di wilayah RW 13 Cipinang Melayu sendiri juga diadakan berbagai perlombaan hasil kerjasama RW dan PKK, seperti Lomba Penghijauan antar RT, Lomba Timbang Sampah Kering tingkat dasawisma, dan Lomba Pemilahan Sampah tingkat dasawisma. Berbagai perlombaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepedulian warga terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan memperkenalkan kegiatan yang paling mendasar dalam pengelolaan sampah mandiri.

“Kita analogikan di sebuah kampung. Bagaimana orang mau menengok, kampungnya saja kotor, *jorok*, tidak hijau. Dibuat konsep, yang namanya sebuah lomba penghijauan antar RT.” (Ibu RIW)

Berbagai kegiatan yang mengangkat kepedulian para anggota PKK tersebut menggambarkan pandangan yang kritis terhadap perubahan yang terjadi pada lingkungan hidup tempat tinggal mereka. Mengingat kegiatan para perempuan sebagian besar dihabiskan di rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya, tidak mengherankan jika merekalah yang lebih memperhatikan kondisi lingkungan hidup di wilayahnya. Mereka kemudian mengeluhkan wilayah RW 13 Cipinang Melayu yang kotor dan tidak teratur, sehingga mencoba mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup tersebut.

"...Rata-rata warga itu sambil minum es, ya, bungkus plastiknya dibuang *aja* di situ...*Sampe* got itu penuh dengan plastik. Dan di sini sangat biasa itu begitu, dan kita dulu berpikir, bisa *ngga* ya *ngga* begini." (Ibu AST)

"Saya mau ikut kegiatan ini karena ibadah dan cinta *sama* lingkungan. Kalau lingkungan bersih, *kan*, enak. Kalau lihat jalanan kotor saya sedih, lihat tanaman pada kering." (Ibu YNT)

"Kalau untuk lingkungan, saya sebetulnya apa *aja* mau, yang penting bisa *ngerjainnya*." (Ibu KNR)

Ditambah dengan adanya rasa ingin tahu yang tinggi serta banyaknya minat terhadap lingkungan, maka muncul ide untuk belajar dari wilayah lain sekaligus memperluas jaringan sosial para anggota PKK tersebut. Berbagai bentuk observasi di media cetak dan elektronik dilakukan oleh para anggota PKK hingga akhirnya mereka mendapati suatu liputan mengenai penghijauan di RT 15 Kampung Bulak, Klender. Melalui Ibu RIW, kelompok PKK RW 13 Cipinang Melayu kemudian melakukan survei ke wilayah Kampung Bulak untuk studi banding perihal penghijauan di daerah tersebut. Mereka sangat terkesan dengan keberhasilan Kampung Bulak dalam menata lingkungannya, sehingga berharap dapat mencontoh keberhasilan wilayah tersebut. Fasilitator di wilayah Kampung Bulak-lah yang kemudian memperkenalkan program JGC kepada Ibu RIW dan kawan-kawannya di kelompok PKK Cipinang Melayu.

"...Saya dan Bu KNR mulai keluar jalan-jalan...Di *tv* ada lingkungan yang bagus. Memang dari dulu hobinya foto. Jadi *kalo* lihat lingkungan yang bagus kita ambil fotonya..." (Ibu RIW)

"..Kita nonton di *tv* pertama kali tentang RT 15...Pertama kali kita ke sana itu, ya Allah, heran sekali. Memang di sana *sih* jalannya hanya untuk motor, MHT. Daerahnya juga berdempetan dengan pasar. Kita *sampe kaya gini*, 'Masa, ya, yang lingkungannya *kaya gitu aja* bisa, kita yang lingkungannya orang-orangnya *ngga gitu-gitu amat ngga* bisa.'" (Ibu AST)

4.4.2. Peran Perempuan RW 13 Cipinang Melayu dalam Gerbang Darling

Pada tahap inisiasi program JGC, para perempuan lebih banyak berperan dibandingkan dengan laki-laki. Tahapan ini lebih banyak diisi dengan kegiatan perencanaan dan pelatihan. Keterlibatan perempuan dalam hal perencanaan dan

evaluasi di lingkungan RW bukan menjadi hal baru. Ibu RIW dan Ibu KNR adalah beberapa perempuan yang memangku jabatan strategis dalam organisasi RW/PKK. Ibu RIW menjabat sebagai ketua RT 4 sebelum suaminya terpilih sebagai ketua RW 13 Cipinang Melayu dan dirinya secara otomatis menjabat sebagai ketua tim PKK RW 13 Cipinang Melayu. Adapun Ibu KNR sudah dua kali menjabat sebagai wakil ketua tim PKK RW 13 Cipinang Melayu hingga periode sekarang.

Perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di RW 13 Cipinang Melayu dipelopori oleh Ibu RIW ketika menghadiri pertemuan rutin tingkat RW. Di dalam pertemuan tersebut ia menyampaikan pendapat dan usulannya terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup berdasarkan hasil laporannya seputar kunjungannya ke Kampung Bulak. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat maupun usulan berdasarkan aspirasi yang dimilikinya, terutama menyangkut kepentingan umum. Sebagai perempuan, usulan dan pendapat fasilitator tersebut ditanggapi serius oleh peserta lainnya. Bahkan ketua RW yang sedang menjabat saat itu sangat mendukung aspirasi fasilitator dan berniat untuk menindaklanjuti usulan tersebut.

"Kebetulan setiap Jumat kita evaluasi, ketemu kita sampaikan, RT *nyambut* RW-nya merespon. Diajaklah setiap RT, ditanya mau *ngga dibikin* seperti ini. Kalau mau saya *bikin* konsep, dan wacanannya adalah tahun 2006 acara *hut* RI itu yang biasanya kita rayakan dengan olah raga dan sebagainya, kali ini kita adakan lomba penghijauan antar RT." (Ibu RIW)

Di dalam struktur organisasi Gerbang Darling, para perempuan juga menduduki jabatan yang penting, seperti fasilitator, sekretaris, dan bendahara. Beberapa ketua kader lingkungan di tiap RT juga dijabat oleh perempuan. Gerbang Darling juga berkoordinasi langsung dengan PKK Pokja III dan BPLH RW, yang juga dijabat oleh perempuan. Dapat dikatakan juga bahwa peran PKK semakin besar dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ketika RW 13 Cipinang Melayu mulai berpartisipasi dalam program JGC. Sebagian besar anggotanya juga aktif menjadi kader lingkungan. Arisan PKK di masing-masing RT juga menjadi ajang sosialisasi program JGC.

Dari 150 kader Gerbang Darling yang terdaftar di dalam program JGC, perempuan yang menjadi kader mencapai angka 70%, dan 60% di antara kader perempuan tersebut adalah warga yang juga aktif di organisasi PKK. Adapun kader yang aktif dalam keseluruhan program, baik ketika penilaian di wilayah RW 13 Cipinang Melayu maupun pada Malam Apresiasi JGC yang bertempat di luar wilayah tersebut, adalah sebesar 20% dari total kader lingkungan yang terdaftar dan seluruhnya adalah perempuan menikah, yang sebagian besar aktif di organisasi PKK. Dengan demikian, mereka sudah terbiasa dengan kesibukan di lembaga RW maupun PKK, sehingga tidak lagi canggung ketika menjalankan kebijakan Gerbang Darling untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang mandiri.

"...Yang ikut JGC itu perempuan semua. Ada 30-40 orang." (Ibu WTN)

Para perempuan tersebut aktif dalam beberapa kegiatan sekaligus, seperti juru pemantau jentik, guru PAUD, dan pengrajin hasil olahan sampah kering. Mereka juga tidak hanya terdiri dari para ibu rumah tangga, tetapi justru 80% di antara mereka memiliki mata pencaharian sendiri, antara lain ada yang bekerja sebagai guru les privat, guru mengaji, agen asuransi, pemilik warung kelontong, dan sebagainya. Berbagai jenis pekerjaan tersebut tidak menuntut perempuan untuk bekerja di kantor sepanjang hari, melainkan dapat disesuaikan dengan kesibukan lainnya.

"..Kegiatan saya *ngajar* les privat, ketua PAUD...Saya istri ketua RT 6...*Kadang-kadang ngurusin* urusan RW juga, jumantik juga..." (Ibu DNI)

"...Masing-masing kita punya kegiatan...Saya guru ngaji, bu DNI guru, bu ELS punya warung kelontong...masing-masing punya usaha. Tapi *alhamdulillah* dari kesibukan itu saya masih sempat. Saya siang *ngajar*, baru jam 9 malam saya bisa ketemu ibu-ibu..." (Ibu AST)

"...Selain *ngajar* di PAUD...saya dan suami punya warung kelontong di dekat rumah..." (Ibu ELS)

Para kader menikmati kegiatan mereka dalam organisasi Gerbang Darling karena mereka dapat sekaligus berkumpul dengan tetangga-tetangga mereka yang lain. Mereka menyukai kebersamaan di antara para kader ketika sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan Gerbang Darling. Mengingat sebagian besar dari

mereka berasal dari daerah lain di luar Jakarta, sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh para kader antara lain muncul sebagai upaya mereka mengobati perasaan sedih karena tinggal jauh dari kampung halaman. Tetangga dianggap sebagai saudara yang terdekat. Di samping itu, karena seringkali terlibat dalam berbagai kegiatan yang sama sebelumnya, maka hubungan kekeluargaan di antara mereka semakin erat dan saling mendukung satu sama lain.

"Ini saudara yang paling dekat, lah, Mbak. Saudara-saudara kita, *kan*, di kampung. Apalagi kalau *ngumpul*, ramainya itu yang membuat kita merasa kehilangan." (Ibu DNI)

"...Semua perantauan, tapi saudaranya banyak, se-RW. Makanya kita selalu *kangen* kalau sudah lama *ngga ngumpul*." (Ibu ELS)

"Kita sebenarnya bukan bersaudara, ya, kita bersaudara karena kita *ketemu* di sini. Kami kalau lama *ngga ketemu kangen*." (Ibu AST)

Rasa persaudaraan juga memunculkan solidaritas di antara para kader, yang tentunya berakibat positif bagi perkembangan organisasi Gerbang Darling. Rasa solidaritas tersebut terlihat ketika mereka sama-sama bersedia untuk belajar mengelola sampah secara mandiri, suatu hal yang sebelumnya asing bagi mereka. Pada satu sisi, solidaritas di antara para kader membuat mereka ingin memperluas pengalaman bermasyarakat tanpa meninggalkan seorang kaderpun di belakang. Di sisi lain, masing-masing kader tidak ingin menanggung malu jika kapasitas dirinya tertinggal di antara yang lain. Oleh karena itu, kader menjadi terpacu untuk mempelajari dan membuka diri atas hal-hal baru yang terjadi di lingkungannya untuk meningkatkan kapasitas diri.

"Jangan sampai mencuat satu orang, *ngga lucu, gitu lho*. Kalau pintar bersama, *kan*, lebih manis. *Masa*, kita pintar sendiri *ngomong* sendiri, teman-teman kita, '*Ngga tahu!*'" (Ibu AST)

"Biar semuanya pintar, pintar *bareng-bareng*. Dan semua ide, semua *kerjaan* itu kita sama-sama." (Ibu DNI)

Keinginan untuk belajar dan aktualisasi diri telah memberikan dampak positif bagi perkembangan kegiatan Gerbang Darling. Sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya hanya berkegiatan di lingkungan domestik, kemandirian kader masih rendah. Pada awal pelaksanaan program JGC, para kader Gerbang Darling masih bergantung pada arahan Ibu RIW sebagai fasilitator dan belum dapat

memunculkan inisiatifnya sendiri. Berlatar belakang ekonomi menengah ke bawah membuat mereka tidak memiliki keyakinan diri bahwa mereka dapat berbuat lebih bagi lingkungannya jika tanpa didukung oleh warga yang lebih mampu. Pasca kemenangan RW 13 Cipinang Melayu, sedikit demi sedikit kader sudah mulai belajar untuk bertindak tanpa bergantung dari arahan fasilitator, khususnya ketika memenuhi undangan atau berbicara sebagai narasumber. Usaha kader untuk memecahkan permasalahan adalah proses belajar bagi kader untuk lebih mandiri, berinisiatif, dan kreatif.

"Kita tinggal lapor...Ya sudah, kita sudah tahu tugasnya...Bu RIW *ngga* harus *nongkrongin gitu*." (Ibu WTN)

"Coba saja dulu. Ya kalau *ngga* bisa yang penting sudah dicoba." (Ibu AST)

Para kader saling bertukar pikiran atas ide-ide yang mereka miliki untuk kemudian menyempurnakannya menjadi suatu ide besar yang mengawali suatu program kegiatan. Masing-masing kader memiliki kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan mereka, serta sifat-sifat dari rekan-rekan mereka. Dengan saling memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain, kader dapat mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat ketidaksepahaman maupun menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi akibat persepsi dan sikap yang berbeda. Bagi mereka, ikut terlibat di dalam kegiatan Gerbang Darling adalah salah satu cara yang efektif untuk belajar bermasyarakat. Agar berhasil dalam membina hubungan yang harmonis dengan para tetangga yang tinggal di lingkungan yang sama dengan dirinya, kader juga memiliki semangat untuk memperbaiki diri sesuai dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki olehnya. Kemampuan para kader untuk memahami satu sama lain membuat mereka lebih mudah mencapai suara bulat ketika mendiskusikan suatu isu atau rencana program.

"Tapi jangan dipandang kami orang-orang yang *perfect*. Kami semua punya kekurangan masing-masing...Satu kelebihan orang-orang di sini. Kami sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing..." (Ibu AST)

"...Saya itu senang dan jiwanya jiwa mengajak. Tetapi ketika saya marah, saya tidak mau melakukan apa-apa. Benar-benar *ngga* ada gerakan apapun..." (Ibu RIW)

"...Satu sama lain *nyambung*...Si *ini* spesialisasinya apa, si *ini* jagonya apa, si *ini* bisanya apa..." (Ibu ELS)

"Itu kelebihan dari kami yang bisa memahami banyak orang...Coba yang di rumah *sendirian* tanpa bergaul dengan lingkungan, ya, belum tentu bisa memahami temannya yang suka marah. Jadi, *kan*, kita juga belajar untuk memahami" (Ibu DNI)

Keinginan para kader untuk sebisa mungkin mengembangkan diri bersama-sama dalam setiap kegiatan yang mereka jalani telah membawa mereka kepada suatu komunitas solid yang inklusif yang didasarkan pada semangat kekeluargaan. Para kader lingkungan menyebut diri mereka sebagai kader yang inklusif, baik dalam kegiatan Gerbang Darling maupun PKK. Setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua lembaga tersebut selalu disosialisasikan kepada warga RW 13 Cipinang Melayu, khususnya mereka yang menjadi sasaran utama diadakannya kegiatan tersebut. Para kader juga berusaha mendekati diri dengan warga yang tidak terlibat langsung di dalam Gerbang Darling maupun PKK, dengan tujuan agar tidak terkesan eksklusif dan mudah menarik dukungan warga terkait dengan program kegiatan yang mereka jalankan.

"Memang selama ini warga mendukung kegiatan kami karena kami tidak memisahkan diri dari warga. Kadang, *kan*, ibu-ibu PKK suka eksklusif, *gitu ya*. Kami *ngga*. Apapun kegiatan kami, kami berusaha mensosialisasikan kepada mereka. Kadang dulu suka begini, ada ibu-ibu PKK kalau *ketemu* suka *ngga* menoleh. Untung *ngga* ada di sini." (Ibu AST)

Keterlibatan kader dalam organisasi Gerbang Darling, terutama semenjak menjadi juara umum dalam program JGC tahun 2009, telah memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Setelah menjadi juara pada program JGC, kader lingkungan di RW 13 Cipinang Melayu seringkali diundang untuk mengisi acara yang bertema lingkungan, baik secara *off-air* maupun *on-air*. Dengan dikenal sebagai wilayah yang berhasil mengelola lingkungannya secara terpadu, kader lingkungan RW 13 Cipinang Melayu berkesempatan untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika berbicara dihadapan menteri dan selebritis untuk menerangkan kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah yang dilakukan di lingkungannya. Di samping itu, semakin banyak tamu yang mengunjungi wilayah RW 13 Cipinang Melayu untuk melihat langsung kegiatan pengelolaan lingkungan hidup oleh warga di wilayah tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari lembaga

pemerintahan, tetapi juga swasta, komunitas RW di wilayah lain, bahkan dari luar negeri.

Kedatangan tamu dari luar juga menambah kesempatan bagi para kader lingkungan untuk membangun jaringan yang luas terkait dengan pelestarian lingkungan hidup, terutama menyangkut pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Wilayah ini juga menjadi objek peliputan media yang ingin mengulas mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bentuk publikasi yang baik yang kemudian dimanfaatkan oleh RW 13 Cipinang Melayu untuk memperluas jaringan dengan menciptakan program kunjungan, baik berupa kunjungan ke wilayah lain maupun kunjungan dari wilayah lain. Program kunjungan dari warga di luar wilayah RW 13 Cipinang Melayu yang juga ingin belajar mengenai pengelolaan sampah mandiri. Untuk program kunjungan dari wilayah lain, Gerbang Darling menyediakan paket tur dan pelatihan (hanya berlaku untuk kunjungan kelompok), termasuk konsumsi, dengan biaya Rp 25.000 per orang. Demikian halnya dengan program kunjungan ke luar diadakan atas undangan warga dari daerah lain, yang berminat dalam kegiatan pengelolaan sampah mandiri dan ingin mempelajari lebih lanjut kegiatan tersebut dari kader lingkungan Gerbang Darling.

Para kader diundang untuk memberikan pelatihan-pelatihan di berbagai tempat. Dengan memberikan pelatihan mengenai kegiatan pengelolaan sampah mandiri, mereka dapat menikmati penghasilan tambahan, yang didapatkan dari organisasi atau komunitas yang mengundang mereka. Biaya pelatihan yang dibebankan kepada pengundang umumnya disesuaikan dengan jumlah kader yang memberikan pelatihan, serta bentuk dan kemampuan organisasi pengundang. Dengan pertimbangan bahwa organisasi setingkat kelurahan, RW, atau perumahan umumnya memiliki anggaran untuk pelatihan, maka ditetapkan tarif sekitar Rp. 2 juta untuk 5 orang kader yang memberikan pelatihan. Untuk lembaga pendidikan, seperti sekolah dasar dan menengah, kader Gerbang Darling tidak menentukan tarif dengan pertimbangan bahwa pendidikan lingkungan lebih penting bagi usia dini.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh kader Gerbang Darling menjadi kebanggaan tersendiri bagi masing-masing kader, terutama bagi mereka yang

berpendidikan rendah, seperti Ibu WTN dan Ibu YNT yang hanya lulusan SMP. Meskipun berpendidikan rendah, mereka mampu mengajarkan kepada orang lain yang pendidikannya lebih tinggi dari mereka, perihal pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Mereka merasakan perubahan tersebut sebagai sesuatu yang positif karena tidak hanya meningkatkan prestasi baik secara individu maupun kolektif, tetapi juga menghadirkan pandangan positif di mata masyarakat umum sebagai perempuan yang produktif.

"...Dulu kita *cuma* ibu rumah tangga, *ngurus* anak aja, paling, ya, *ikut* majlis taklim.. Dulu suka ikut olah raga, senam, apa voli. Sekarang semenjak menang JGC jadi sibuk. Saya terus terang, ya, saya, *tuh*, bukan orang yang sekolah dulu. SMP. Saya *sampe* rumah, *tuh*, suka cerita sama anak saya, sarjana pendidikan...Saya pernah diundang...Mereka beli tas-tas *gini, nih*, suka *banget*, laku *banget*." (Ibu WTN)

Para kader yang aktif hingga saat ini tanpa disadari sudah menunjukkan diri sebagai kader yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap kegiatan Gerbang Darling. Meskipun sebagian besar kegiatan pengelolaan sampah mandiri di wilayah RW13 Cipinang Melayu dikerjakan oleh warga perempuan dan baru sampai di tingkat RW saja, para kader sangat menjunjung tinggi profesionalisme sebagai salah satu nilai yang mendasari perilaku mereka. Mereka bekerja dengan keras dengan harapan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi lingkungan.

"Kita juga kerjanya bertanggung jawab. *Ngga* ada yang saling menyalahkan, tapi saling menambahkan. Kalau kita *dimarahin*, ya, memang sudah pantas *dimarahin, gitu*. Menyadarilah. Kita juga kerjanya profesional, sudah tahu posisinya masing-masing." (Ibu ELS)

"*Ngerjainnya* juga bukan *asal-asalan*. *Ngerjainnya* sosial tapi profesional." (Ibu DNI)

Keinginan para kader untuk sebisa mungkin mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak di lingkungan tempat tinggal mereka umumnya didasari oleh religiusitas mereka yang cukup besar. Keterlibatan aktif para kader dalam kegiatan Gerbang Darling bukan didasarkan pada alasan yang material seperti dorongan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, melainkan dilakukan dengan ikhlas dan disertai dengan rasa syukur untuk menolong sesama. Sikap ikhlas dan bersyukur lebih didasarkan pada religiusitas dari para kader, yang menjunjung tinggi ketakwaan dan ibadah kepada Tuhan sebagai

landasan bagi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka percaya bahwa agama yang mereka anut telah mengajarkan umatnya untuk berhubungan baik dengan Tuhan dan manusia lainnya. Mereka percaya bahwa hubungan sosial yang baik adalah salah satu cara untuk membentuk kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan. Keseimbangan antara kedua hubungan tersebutlah yang harus dipenuhi oleh manusia selama hidup di bumi. Kepercayaan mereka kemudian membawa mereka pada sikap dan perilaku aktif dan altruistik.

"...*Kaya* saya, kalau saya *ngga* mau peduli, *sih*, ya sudah *males-malesan* di rumah *aja*. Tapi karena saya suka dan peduli saya ikut aktif." (Ibu DNI)

"...Dan alhamdulillah kami menikmatinya. Pegel apa, ya, itu biasanya namanya orang *capek*, tapi kami tidak mengeluh. Karena kami sadar betul apa yang kami lakukan ini bukan hanya dengan manusia tapi dengan yang di atas. Di samping kehidupan saya sendiri, saya ingin hidup saya ini dikenang dalam diam oleh orang-orang...Kalau *cape gini* saya *ngga* boleh *ngeluh*, karena ini adalah jawaban atas doa-doa saya..." (Ibu AST)

"...Ya *ngga* masalah, kita, *kan*, istilahnya sudah kontrak mati dengan sampah. Kita *nyebar* ilmunya di situ. Biarkan itu urusannya Allah." (Ibu RIW)

"...Saya mau ikut kegiatan ini karena ibadah dan cinta sama lingkungan..." (Ibu YNT)

"...Kalau hatinya senang, *cape* juga *ngga dirasain*, Mbak. Kita ini mau *nunjukin* kalau ada, lho, warga di Jakarta yang tidak hanya sekedar *kumpul-kumpul ngga* bermanfaat." (Ibu ELS)

Besarnya antusiasme perempuan dalam mengelola lingkungan tempat tinggal mereka sayangnya belum diimbangi oleh peran warga laki-laki yang justru tidak terlalu signifikan. Pada struktur organisasi Gerbang Darling, hanya sedikit jabatan yang diduduki oleh laki-laki, seperti ketua pelaksana dan beberapa ketua kader. Jabatan tersebut juga dianggap sebagai formalitas mengingat ketua RW yang terpilih secara otomatis juga menjabat sebagai ketua Gerbang Darling. Di samping menduduki jabatan struktural, peran lain dari para laki-laki adalah sebagai pelaksana, terutama dalam hal pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik seperti membuat penutup selokan, mengangkat pot tanaman, maupun memindahkan mesin pencacah sampah.

"...Ibu PKK *benar-benar* kerja sendiri. Laki-lakinya *cuman paling* kalau kita minta tolong kalau kita mau *ngangkat* pot yang berat, *bikin gantungan-gantungan gitu*." (Ibu WTN)

"Peran bapak-bapak biasanya membuat tatakan pot untuk menutup got, mengangkat tatakan dan pot tanaman, pokoknya yang *ngga* bisa dikerjakan oleh ibu-ibu." (Ibu AST)

"Bapak-bapaknya sekarang pada ikut turun...*bersihin* got, *mindahin* pot kerjanya bapak-bapak..." (Bapak SDY)

Tidak terlalu berperannya laki-laki dalam kegiatan Gerbang Darling juga diakui oleh perangkat RW, yang mayoritas adalah laki-laki. Mereka berpendapat bahwa kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup akan lebih efektif bila ditangani oleh perempuan, dengan anggapan bahwa waktu luang perempuan lebih banyak dan lebih memahami lingkungan sekitarnya. Laki-laki berpendapat bahwa dirinya sudah banyak menghabiskan waktunya di luar rumah untuk bekerja, sehingga tidak memiliki banyak waktu luang untuk menangani permasalahan lingkungan hidup di wilayah tempat tinggal mereka.

"Memang lebih baik ibu-ibu yang mengerjakan karena bapak-bapaknya, *kan, pada* kerja. Ibu-ibu, *kan*, lebih *telaten* dan waktunya lebih banyak. Bapak-bapaknya, *sih paling-paling cuma bantu-bantu* saja." (Bapak SDY)

Pandangan yang demikian kemudian membangun suatu prinsip pembagian kerja yang didasarkan pada stereotipe gender, dengan menyetengahkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga, meskipun perempuan juga memiliki mata pencahariannya sendiri. Laki-laki masih mempertahankan stereotip sebagai alat untuk mendorong perempuan bersedia berperan aktif mengelola lingkungan tempat tinggal mereka. Perempuan juga tidak mempertanyakan secara kritis perihal kurangnya keterlibatan laki-laki dalam pengelolaan sampah di wilayah tempat tinggal mereka. Mereka justru bangga apabila mampu menyelesaikan tugas rumah tangga, bekerja, dan sekaligus aktif dalam kegiatan di lingkungan dalam waktu yang bersamaan.

"Karena kita *seneng* ya daripada kita *bengong* ada kegiatan ini ya *ikut-ikut aja*. Saya sehari-harinya ibu rumah tangga. Setelah masak, *beberes* rumah, mau *ngapain?*" (Ibu WTN)

"...Kalau soal yang di rumah, *tuh*, kami boleh berbangga. Kami tahu prioritas kewajiban kami. Rumah itu wajib, *ngga* ada ceritanya keluar

rumah terus suami atau anak-anak terlantar. Itu *ngga* ada ceritanya. Itu berarti kami tidak paham dengan apa yang kami lakukan..." (Ibu AST)

Budaya yang masih bersifat patriarkal juga tergambar dalam persepsi perempuan mengenai posisi mereka di dalam rumah tangga. Bagi para kader perempuan, terlepas dari besar atau tidaknya partisipasi laki-laki di dalam kegiatan Gerbang Darling, peran terpenting dari para laki-laki adalah memberikan dukungan moral. Di satu sisi, sebagai perempuan menikah, dukungan dan izin dari suami sangat penting bagi mereka dalam hal menjaga hubungan keluarga supaya tetap harmonis. Di sisi lain, peran aktif perempuan dalam pengelolaan sampah di RW 13 Cipinang Melayu tanpa mengabaikan tugas rumah tangga dianggap oleh laki-laki telah memberikan manfaat bagi kenyamanan tempat tinggal tanpa harus mengubah posisi mereka sebagai kepala keluarga ataupun mengancam harga diri mereka sebagai laki-laki.

"Alhamdulillah suami mendukung kegiatan saya, yang penting di rumah beres." (Ibu DNI)

"Saya boleh ikut kegiatan ini karena bapak juga kerja. Yang penting *kerjaan* sudah beres." (Ibu YNT)

"...Alhamdulillah, *sih*, selama ini suami mendukung *aja*, *ngga* pernah ada masalah *gara-gara* aktif di lingkungan. Kita malah pernah pulang jam 1 pagi, sehabis *dubbing* untuk acara JGC. Suami *ngga* marah...Yang penting, *sih*, hidup seimbang, suami istri harmonis, jadi bisa terus di sini." (Ibu ELS)

"Meskipun hampir semuanya yang mengerjakan adalah ibu-ibu, yang terpenting adalah izin suami. Kita perlu ini perlu itu, *kan*, uangnya juga dari suami. Kalaupun uang kita sendiri juga atas sepengetahuan suami. Peran laki-laki jadi lebih mengawasi dan dukungan..." (Ibu AST)

Kegiatan di Gerbang Darling tidak menjadi suatu ancaman terhadap posisi laki-laki di dalam rumah tangga jika lingkungan organisasi didominasi oleh perempuan. Keberadaan fasilitator perempuan juga dianggap sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi dukungan suami, karena suami tidak perlu mengkhawatirkan istrinya memiliki hubungan kerja dengan laki-laki lain, salah satu hal yang dapat memicu rasa ketidakamanan dirinya. Perempuan juga merasa lebih nyaman bekerja dengan rekan perempuan lainnya, antara lain karena persamaan gender dan peran sosial mereka di dalam masyarakat.

"...Kalau bantuin bu RIW boleh sama suami..." (Ibu YNT)

"...Ibu-ibu sini *mau* kerja *repot-repot* tapi senang *ramai-ramai*...Bayarannya, ya, kesenangan itu aja..." (Ibu WTN)

Fenomena demikian menjadi dua sisi mata uang. Pada satu sisi, pembagian kerja semacam ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi pengelolaan lingkungan hidup karena peran perempuan tidak terhambat oleh munculnya konflik yang disebabkan oleh sensitivitas gender. Warga perempuan tidak berkeberatan untuk bertindak sebagai agen dalam pengelolaan lingkungan hidup dan laki-laki juga tidak merasa terancam posisi sosialnya di dalam rumah tangga maupun di masyarakat sekaligus mendapatkan manfaat atas peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggalnya. Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan dengan baik meskipun lingkungan sosial RW 13 Cipinang Melayu masih bersifat patriarkal.

Di sisi lain, dari sudut pandang kajian gender, peran aktif perempuan masih belum mampu mengubah posisi tawar perempuan karena masih diharuskan untuk mengutamakan kerja domestik. Laki-laki masih memiliki kekuasaan yang lebih besar sehingga posisi perempuan di dalam lingkup sosial RW 13 Cipinang Melayu masih berada di tingkatan subordinasi. Perempuan masih sebatas menjadi agen pengelola lingkungan yang kesediaannya dalam kegiatan pengelolaan sampah mandiri terkesan dimanfaatkan oleh warga laki-laki yang diuntungkan oleh kondisi ini. Pembagian kerja yang ada masih didasarkan pada stereotipe gender, sebagai akibat dari nilai-nilai patriarki yang ada di masyarakat, seperti laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan-lah harus mengurus anak dan kebutuhan keluarga.

Di dalam dunia yang masih dalam proses menuju kesetaraan gender yang sesubstantif mungkin, masih banyak stereotipe yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki, misalnya terkait peran, posisi dan tanggung jawab mereka. Pada perempuan, stereotipe yang banyak dilekatkan adalah sebagai pengurus rumah tangga, sehingga mereka berupaya menyesuaikan diri dengan memilih aktivitas yang sedapat mungkin dekat dengan tempat tinggalnya. Karenanya, pengelolaan sampah di lingkungan hunian kemudian menjadi aktivitas yang dianggap cocok untuk dilakukan perempuan, bermanfaat untuk semua pihak di lingkungan, juga

tidak harus 'mengancam eksistensi kaum bapak'. Pemecahan masalah hubungan kekuasaan dan pembagian kerja yang masih didasarkan pada stereotipe gender baru dapat diperoleh apabila laki-laki dan perempuan mulai bersedia untuk terbuka terhadap pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga mereka tidak lagi bersandar pada pembagian peran yang sangat kaku.

Sintesis hasil wawancara yang terkait dengan subbab 4.4 adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan memiliki pandangan kritis terhadap kondisi lingkungan hidup tempat tinggal mereka.
- b. Perempuan ikut terlibat di dalam perencanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah RW 13 Cipinang Melayu.
- c. Semua kader lingkungan yang aktif dalam organisasi Gerbang Darling adalah perempuan menikah dan juga aktif dalam kegiatan sosial lainnya.
- d. Sebagian besar kader perempuan memiliki mata pencaharian dengan waktu yang fleksibel.
- e. Rasa persaudaraan membuat para kader menikmati kebersamaan di antara mereka.
- f. Para kader lingkungan memiliki kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan kader lainnya.
- g. Kader lingkungan menganggap kegiatan yang dijalankan di dalam organisasi Gerbang Darling sifatnya inklusif.
- h. Kader merasakan banyaknya manfaat yang didapatkan oleh mereka dengan terlibat aktif di dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah RW 13.
- i. Kader memiliki religiusitas yang besar.
- j. Peran laki-laki hanya sebatas melakukan pekerjaan yang membutuhkan fisik yang kuat yang seringkali tidak mampu dilakukan oleh kader perempuan.
- k. Kader perempuan membutuhkan izin dari suami dan memprioritaskan kegiatan rumah tangga sebelum melakukan kegiatan di luar rumah.
- l. Laki-laki mempercayai kegiatan pengelolaan sampah di RW 13 Cipinang Melayu kepada perempuan karena mereka menganggap bahwa perempuan menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan tempat tinggal mereka.

4.5. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di RW 13 Cipinang Melayu

Masyarakat yang tinggal di kota besar, seperti yang terjadi di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, kurang peka terhadap perubahan lingkungan mengingat mereka tidak secara langsung bergantung terhadap sumber daya alam. Mayoritas warga di wilayah tersebut memiliki mata pencaharian sebagai pegawai, buruh, serta guru, sehingga jarang berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik di tempat mereka tinggal. Gaya hidup masyarakat di kota metropolitan yang cenderung individualistik dan berorientasi pada kepentingan ekonomi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tingginya tingkat persaingan membuat penduduk mengabaikan lingkungan tempat tinggal mereka. Dengan demikian, tingkat kepedulian mereka terhadap lingkungan hidup rendah. Di samping itu, sistem pengelolaan sampah konvensional tidak mampu mengatasi jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat. Kurang efisiennya pengelolaan sampah pada lingkungan buatan mengakibatkan keseimbangan lingkungan alam menjadi terganggu. Hal ini dapat dilihat dari perilaku warga yang membuang sampah di sembarang tempat karena menolak membayar iuran kebersihan, sehingga berpotensi mencemari tanah dan udara.

Suatu kegiatan pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berlanjut apabila kegiatan tersebut telah mencakup ketiga komponennya, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, ketiganya memiliki karakteristik sebagaimana lingkungan hidup di kota besar. Lingkungan alam/fisik meliputi segala sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia yang tinggal di wilayah tersebut, yang berupa tanah, air, udara, serta makhluk hidup lain. Lingkungan buatan di wilayah tersebut adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia, dalam bentuk jalan, pemukiman, sarana pengelolaan sampah, sekolah, tempat usaha, maupun tempat ibadah. Adapun lingkungan sosial adalah masyarakat yang terbentuk di dalam wilayah geografis RW 13 Cipinang Melayu, yang dalam hal ini adalah satuan RT/RW itu sendiri. Ketiga komponen lingkungan hidup tersebut saling berhubungan satu sama

lainnya, sehingga eksekusi yang dihasilkan oleh suatu komponen akan berakibat terhadap komponen lainnya.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu, maka dibangunlah suatu lingkungan sosial yang sadar lingkungan, melalui organisasi Gerbang Darling. Pembangunan lingkungan sosial dapat menjadi langkah awal dalam upaya mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada hunian di wilayah kota besar. Prioritas utama kehidupan warga di RW 13 Cipinang Melayu adalah peningkatan kualitas ekonomi, serta menempatkan kualitas lingkungan tempat tinggal di urutan bawah. Pola pikir semacam ini dapat diubah dengan pembangunan lingkungan sosial, melalui internalisasi nilai-nilai lingkungan yang benihnya terlebih dahulu ditanamkan pada nilai-nilai sosial.

Strategi para perintis kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di RW 13 Cipinang Melayu adalah memberikan tekanan sosial bagi warganya untuk meningkatkan kepedulian mereka terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai hasilnya, wilayah tersebut berhasil mengatasi permasalahan lingkungan yang mereka hadapi, sekaligus menjadi salah satu kiblat pengelolaan sampah berbasis masyarakat kota besar. Namun keberhasilan ini hanya dapat bertahan apabila didukung oleh pelaksanaan sistem pengelolaan sampah yang terpadu yang diwujudkan melalui pengorganisasian masyarakat.

Sistem pengelolaan sampah terpadu yang dilakukan oleh RW 13 Cipinang Melayu adalah serangkaian kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh warganya dengan menggabungkan sistem pengelolaan konvensional dan sistem pengelolaan sampah mandiri. Sampah yang dihasilkan oleh warga sebisa mungkin diolah sendiri atau dijual kepada pengepul untuk diolah di pabrik daur ulang. Sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kemudian dibawa ke TPS oleh petugas kebersihan. Di tengah minimnya bantuan dana dari pemerintah untuk membangun sistem ini, pembiayaan dilakukan secara swadaya dan dibantu oleh pihak penyelenggara JGC untuk keperluan teknisnya. Setelah seluruh rangkaian kegiatan sudah berjalan, sistem pengelolaan sampah secara terpadu ini juga sudah memiliki sistem pembiayaan yang berkelanjutan, karena pemanfaatan sampah yang ada ternyata mampu menghasilkan pemasukan.

Sistem semacam ini baru diterapkan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu semenjak wilayah tersebut ikut serta dalam program JGC. Keahlian kader Gerbang Darling dan warga lainnya didapatkan dari hasil pelatihan pengolahan sampah yang diberikan oleh penyelenggara program. Proses sosialisasi yang tidak terputus dari para kader Gerbang Darling kepada warga RW 13 Cipinang Melayu telah membantu wilayah ini meraih juara umum dan diakui kemampuannya dalam pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pasca kemenangan di tahun 2009, kegiatan pengelolaan lingkungan tidak berhenti, tetapi terus dilakukan hingga memasuki tahun 2011.

Keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah di RW 13 Cipinang Melayu juga dilihat dari enam dimensi keberlanjutan program, yaitu logistik, ekonomi, komunitas, kesetaraan, kelembagaan, dan lingkungan hidup. Dalam hal logistik, pada saat kegiatan ini dimulai, dengan keikutsertaan RW 13 Cipinang Melayu dalam program JGC, kader lingkungan mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan sampah dalam program JGC. Wilayah RW 13 Cipinang Melayu juga mendapatkan dukungan finansial dan sarana pengelolaan sampah dari pihak swasta (melalui JGC) dan pemerintah. Di samping itu, RW 13 Cipinang Melayu juga mendapatkan manfaat sosial dari kegiatan pengorganisasian masyarakat yang dibangun sebagai bagian dari inisiasi kegiatan.

Secara ekonomi, pembiayaan kegiatan RW 13 Cipinang Melayu diawali dengan menggunakan hasil swadaya warga serta dana stimulan dan hadiah uang tunai dari program JGC. Setelah program JGC berakhir, pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah di wilayah ini sudah berhasil dilakukan secara swadana, melalui penjualan hasil kegiatan pengolahan sampah seperti kompos, olahan sampah kering, dan sampah non-organik yang masih dapat didaur ulang. Selain itu pembiayaan juga datang dari iuran kebersihan warga, kegiatan pelatihan ke wilayah lain, serta kunjungan dari wilayah lain.

Keberlanjutan dari aspek partisipasi masyarakat dapat terlihat dari keterlibatan warga RW 13 Cipinang Melayu sebagai kader lingkungan. Warga yang tidak ikut berperan sebagai kader lingkungan tetap terlibat di dalam kegiatan pemilahan sampah dengan menjadi nasabah bank sampah, konsumen kompos, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti membersihkan wilayah mereka. Warga

RW 13 Cipinang Melayu juga terlibat dalam evaluasi kegiatan pengelolaan sampah melalui pertemuan rutin RW yang diadakan sebulan sekali.

Tabel 4.3. Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di RW 13 Cipinang Melayu

Aspek Lingkungan Hidup	Lingkungan Alam	Lingkungan Buatan	Lingkungan Sosial
Aspek Keberlanjutan			
Logistik	Pelatihan kader mengenai pengelolaan sampah dalam program JGC.	Dukungan finansial dan sarana dari swasta (JGC) dan pemerintah.	Pengorganisasian masyarakat
Ekonomi	Penjualan kompos, olahan sampah kering, sampah non-organik.	Pelatihan dan kunjungan terkait dengan sarana pengelolaan sampah.	Iuran kebersihan dari warga; dana stimulan dan hadiah uang tunai dari program JGC.
Komunitas	Kader lingkungan; kegiatan pemilahan sampah, konsumen kompos, pengolahan sampah kering.	Kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan pemukiman.	Kaderisasi dalam Gerbang Darling; evaluasi; dan pertemuan rutin tingkat RW.
Kesetaraan	UU No.18/2008: Setiap orang wajib mengelola sampahnya.	Wilayah yang bersih dan hijau.	Peningkatan peran perempuan.
Kelembagaan	Gerbang Darling; Koordinasi RT/RW.	Pengawasan melalui paguyuban JGC, media, dan Dinas Kebersihan DKI Jakarta.	Internalisasi nilai-nilai lingkungan hidup.
Lingkungan Hidup	Pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Perbaikan sarana pengelolaan sampah.	Sinergi program kerja RW, PKK, dan Gerbang Darling.

Kesetaraan di dalam kegiatan pengelolaan sampah oleh warga RW 13 Cipinang Melayu diatur melalui Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan setiap orang untuk mengelola sampah rumah tangganya. Dengan demikian, setiap orang wajib untuk ikut serta di dalam

kegiatan ini. Manfaat yang didapatkan dari kegiatan tersebut juga dirasakan oleh seluruh warga tanpa terkecuali karena pengelolaan sampah dilakukan di seluruh wilayah RW 13 Cipinang Melayu. Perempuan juga tidak terpinggirkan dalam hal ini, terlebih karena merekalah yang memiliki peran terbesar di dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayahnya.

Dalam hal kelembagaan, secara umum kegiatan pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu dikoordinasikan oleh Gerbang Darling dan pengurus RT/RW. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilakukan secara internal, oleh warga, dan secara eksternal, oleh Suku Dinas Kebersihan DKI Jakarta, paguyuban fasilitator JGC, dan media. Nilai-nilai lingkungan juga diinternalisasikan ke dalam nilai-nilai sosial masyarakat melalui jalur-jalur kelembagaan sosial, baik formal maupun informal. Hal ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah mereka.

Keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah yang terpenting adalah pengaruhnya terhadap lingkungan hidup. Terkait dengan lingkungan alam, kegiatan ini telah berhasil mengembalikan daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah RW 13 Cipinang Melayu setelah sebelumnya terbebani oleh banyaknya sampah yang tidak dikelola secara baik. Dari aspek lingkungan buatan, terdapat perbaikan sarana pengelolaan sampah, sebagai bentuk dukungan dari penyelenggara JGC, dan tambahan pengadaan sarana pengumpulan sampah dari pihak pemerintah kota Jakarta Timur. Keberlanjutan dari segi lingkungan sosial terlihat dan dipertahankan melalui sinergi program kerja di antara tiga lembaga utama RW 13 Cipinang Melayu, yaitu RW, PKK dan Gerbang Darling.

Keberhasilan seluruh proses pelaksanaan sistem pengelolaan sampah terpadu yang mulai dirintis pada tahun 2006 tidak terlepas dari pengorganisasian masyarakat yang baik, dengan perencanaan yang dilakukan secara bertahap dan kepemimpinan yang baik dari para tokoh di wilayah tersebut, terutama fasilitator, ketua RW, serta para ketua RT di wilayah RW 13 Cipinang Melayu. Di samping itu, berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilaksanakan secara sinergis oleh ketiga lembaga sosial di wilayah tersebut, yaitu RW, PKK, dan Gerbang Darling. Kegiatan pengolahan sampah

kering, misalnya, mampu menambah keahlian para ibu yang masih memiliki anak balita melalui kegiatan BKB-PAUD. Sambil mengawasi balita mereka belajar dan bermain dalam kelompok belajar PAUD, para ibu tersebut diajarkan cara membuat kerajinan dari olahan sampah kering dan hasil kerajinan tangan mereka kemudian dibeli oleh Gerbang Darling. Kegiatan PSN yang diselenggarakan oleh lembaga RW juga dibarengi dengan pengawasan kebersihan dan pemilihan sampah di tiap rumah tangga oleh kader jumatik yang sekaligus merangkap sebagai kader penghijauan dan pemilahan sampah. Sinkronisasi berbagai program dari ketiga lembaga sosial yang berbeda telah membentuk suatu sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang efektif dan efisien dalam suatu pembangunan lingkungan sosial.

Pengorganisasian masyarakat juga menjadi lebih mudah jika dimulai dari unit yang sekecil mungkin di masyarakat, seperti misalnya melalui dasa wisma. Lewat unit dasa wisma, warga yang masih awam dengan konsep kelembagaan akan lebih mudah mempelajari prinsip-prinsip berorganisasi sebelum tergabung ke dalam lingkup yang lebih luas, yaitu RW dan RW. Selanjutnya, di dalam ketiga unit masyarakat tersebut, warga masih cenderung lebih mudah mengorganisasikan dirinya secara mandiri, karena belum banyak tersentuh oleh birokrasi negara. Masih banyak aturan dan nilai-nilai lingkungan hidup yang dapat dibentuk secara mandiri oleh masyarakat dan sanksi sosial juga dapat diterapkan secara lebih efektif.

Hal lain yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa para perintis kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah tersebut mayoritas adalah perempuan menikah dan memiliki pekerjaan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan suami mereka. Perempuan lebih peka terhadap perubahan lingkungan hidup yang terjadi di sekitar tempat tinggal mereka, mengingat dibandingkan dengan para pria yang menjadi suami mereka, para perempuan tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah untuk mengurus anak serta melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya. Dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seringkali mereka mengalami secara langsung akibat yang ditimbulkan oleh perubahan lingkungan. Hal yang paling nyata adalah selokan di depan rumah yang dipenuhi sampah, perbuatan pemulung yang mengais sampah mereka

secara sembarangan, jalanan yang gersang dan panas, serta TPS ilegal di dekat rumah mereka yang berbau tidak sedap.

Kepekaan para perempuan-lah yang kemudian mendorong mereka untuk merintis kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, dengan harapan dapat memperbaiki kualitas tempat tinggal mereka sehingga lebih bagi keluarga mereka. Upaya tersebut juga didukung oleh keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan di lingkungan RW 13 Cipinang Melayu. Lingkungan sosial di wilayah tersebut masih tersusun atas persepsi tradisional patriarkal yang memandang bahwa perempuan sebaiknya lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Peran sosial perempuan yang masih didasarkan pada stereotipe gender tersebut membuat perempuan berusaha untuk membangun suatu kondisi yang membuat dirinya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, untuk mengurus rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan sosial mereka, para perempuan tersebut memilih untuk bersosialisasi di dalam lingkup wilayah tempat tinggalnya, antara lain melalui pengajian, arisan, serta kegiatan PKK. Pilihan ini diambil karena kegiatan-kegiatan tersebut umumnya cukup dilakukan di wilayah tempat tinggal mereka dan tidak banyak menyita waktu mereka. Melalui kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan, mereka mendiskusikan berbagai isu yang terjadi di seputar wilayah tempat tinggal mereka, tidak ketinggalan mengenai ketidaknyamanan yang mereka rasakan seputar lingkungan hidup di wilayah tersebut.

Dari hanya sebatas diskusi inilah muncul inisiatif untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di wilayah RW 13 Cipinang Melayu. Kegiatan PKK menjadi wadah awal di dalam upaya tersebut. Melalui PKK, para perempuan tersebut mengawali inisiatif mereka dengan mengikuti beberapa perlombaan yang menyangkut pengelolaan lingkungan hidup, terutama penghijauan, sebagai langkah yang paling sederhana yang dapat mereka lakukan. Untuk memberikan pengaruh yang lebih besar, beberapa di antara para perempuan tersebut menggunakan posisinya di dalam kepengurusan RT/RW 13 Cipinang Melayu untuk mengajak warga lainnya agar ikut terlibat dalam kegiatan yang sama. Pergerakan para perempuan tersebut mendapatkan respon yang positif dari kepengurusan RT/RW yang didominasi oleh laki-laki.

Pengorganisasian dalam kegiatan Gerbang Darling juga menggambarkan upaya perempuan dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis mereka, namun belum memiliki pandangan yang kritis mengenai hubungan kekuasaan dan pembagian peran berdasarkan stereotipe gender. Secara kasat mata, kegiatan pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu telah menciptakan hubungan kekuasaan yang seimbang melalui praktik yang demokratis atas pembagian kepemimpinan, pembuatan keputusan, kewenangan, dan tanggung jawab. Di dalam struktur organisasi telah banyak perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting di dalam kegiatan sosial RW. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang yang lebih kritis lagi, dominasi laki-laki dalam kepengurusan RT/RW serta dominasi perempuan dalam PKK dan organisasi Gerbang Darling di wilayah RW 13 Cipinang Melayu masih menggambarkan distribusi peran yang disesuaikan dengan stereotipe gender.

Perempuan RW 13 Cipinang Melayu masih berpegang teguh pada pandangan tradisional, sehingga belum menyadari pentingnya pencapaian kepentingan strategis gender yang menekankan pada pembagian kerja dan hubungan kekuasaan yang setara. Upaya untuk mencapai kepentingan strategis tersebut tidaklah mudah karena lingkungan sosial di wilayah tersebut masih menganut pandangan yang lebih tradisional dan belum dapat menerima perubahan terkait dengan kesetaraan gender. Oleh karena itu, di tengah-tengah posisi subordinasi perempuan, perlu dilakukan gerakan yang dapat membantu perempuan memenuhi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Dalam hal ini, pengorganisasian perempuan melalui Gerbang Darling menjadi salah satu wahana yang efektif untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar perempuan.

Model pengorganisasian yang terpusat pada perempuan menekankan bahwa kedekatan emosional perempuan dengan keluarganya mempengaruhi komitmen keseharian mereka di masyarakat dan prioritas mereka mengenai tujuan apa yang sesuai bagi upaya perubahan sosial. Kegiatan pengelolaan sampah di wilayah RW 13 Cipinang Melayu sesuai dengan model ini karena memperluas batas rumah tangga dan memasukkannya ke dalam lingkungan tempat tinggal, yang berujung pada buramnya batasan yang jelas antara kehidupan publik dan pribadi, antara rumah tangga dan masyarakat. Hal ini tergambar dalam kegiatan

Gerbang Darling yang dilaksanakan secara informal, seperti misalnya para ibu yang mengerjakan kerajinan di pusat pengolahan sampah kering sambil menyuapi makan siang anak mereka, atau jadwal kegiatan Gerbang Darling yang seringkali disesuaikan dengan jadwal pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian. Para ibu terkesan tidak membatasi kehidupannya di rumah dan di dalam organisasi Gerbang Darling karena tujuan awal dari pendirian organisasi tersebut juga didasarkan pada kebutuhan rumah tangga akan kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal mereka.

Kebutuhan praktis perempuan yang dapat dipenuhi melalui kegiatan pengelolaan sampah dan lingkungan hidup di wilayah RW 13 Cipinang Melayu antara lain adalah tempat tinggal yang bersih, lingkungan sosial yang guyub, pengetahuan yang luas mengenai lingkungan hidup, serta penghasilan tambahan dari berbagai kegiatan Gerbang Darling. Secara lebih mendalam, perempuan RW 13 Cipinang Melayu juga mengalami pembangunan suatu konsep diri dan kepercayaan diri yang lebih positif, serta mulai memiliki pandangan yang lebih kritis. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa para ibu tersebut sudah terbiasa mengemukakan pendapatnya kepada laki-laki pasangan mereka namun belum memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk melakukan hal yang sama pada lingkungan sosial yang lebih luas, seperti misalnya pada pertemuan rutin RT/RW 13 Cipinang Melayu. Suara para perempuan biasanya disampaikan melalui Ibu RIW yang dianggap sebagai salah satu tokoh perempuan yang diteladani di wilayah tersebut. Selanjutnya, keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Gerbang Darling mengubah mereka menjadi pribadi yang lebih asertif. Atas dorongan Ibu RIW pula, perempuan yang aktif menjadi kader Gerbang Darling kini dapat membangun kemandirian dan kepercayaan diri mereka dengan membiasakan diri menerima kunjungan dari pihak luar dan berbagai media.

Program JGC dan pendirian Gerbang Darling juga menjadi titik awal bagi para kader atas bertambahnya wawasan mereka mengenai lingkungan. Para ibu rumah tangga yang pada awalnya hanya sebatas mengeluhkan buruknya kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya, kini telah memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai pentingnya pengelolaan sampah mandiri. Sebagai hasilnya, pandangan mereka terhadap perubahan lingkungan menjadi jauh lebih

kritis dibandingkan dengan sebelumnya. Bagi mereka, sampah yang dibuang ke selokan atau lahan kosong tidak lagi dianggap hanya merusak pemandangan atau menimbulkan bau yang tidak sedap, tetapi mereka juga mengetahui bahwa sampah dapat menjadi berbahaya dan mencemari sumber daya terpenting yang mereka miliki, yaitu air, tanah, dan udara. Pandangan kritis para kader juga membuat mereka semakin giat untuk membagi pengetahuan yang mereka miliki tersebut kepada warga lainnya, termasuk yang tinggal di wilayah lain, melalui kegiatan pelatihan. Hal ini mengarah pada penguatan komitmen para kader untuk terus berupaya mempertahankan paradigma baru mereka terhadap sampah rumah tangga sehingga proses pengembangan dan perluasan jaringan kegiatan pengelolaan sampah yang terpadu dapat terus berjalan.



5. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan yang mendasar di dalam kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 13 Cipinang Melayu sesudah mengikuti program JGC, baik dari segi teknis, kelembagaan, pembiayaan, partisipasi, maupun peraturan. Sebelum mengikuti JGC, warga masih mengandalkan sistem pengelolaan sampah konvensional, yaitu membuang seluruh sampahnya tanpa dipilah ke TPS. Setelah mengikuti JGC, warga melakukan pengelolaan sampah mandiri, yaitu sampah dipilah dan diolah sesuai dengan jenisnya, melalui kegiatan pengomposan, pengolahan sampah kering, dan bank sampah. Adapun sisa sampah yang tidak dapat diolah, termasuk sampah spesifik, dikelola dengan sistem konvensional.
2. Upaya pengorganisasian masyarakat diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, agar dapat memfasilitasi dan mengimplementasikan pemberdayaan dan peningkatan akses masyarakat kepada sumber daya lingkungan hidup yang penting. Pengorganisasian masyarakat di RW 13 Cipinang Melayu terdiri dari proses-proses sebagai berikut: (1) Pelibatan warga di dalam kompetisi untuk mendorong rasa kepemilikan; (2) Kaderisasi di antara warga; dan (3) Internalisasi nilai-nilai lingkungan hidup ke dalam nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat di wilayah tersebut. Keberhasilan pengorganisasian masyarakat di wilayah RW 13 Cipinang Melayu dicapai melalui pendekatan pada unit terkecil di masyarakat, yaitu dari tingkat dasa wisma, RT, dan RW.
3. Perempuan sangat berperan dalam mengorganisasikan masyarakat RW 13 Cipinang Melayu menuju pembentukan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Di dalam kegiatan ini, perempuan baru mampu mengakses sumber daya untuk memenuhi kebutuhan praktisnya, sedangkan kepentingan strategis mereka untuk mencapai kesetaraan gender

belum dapat terpenuhi karena pembagian peran masih didasarkan pada stereotipe gender. Selama masyarakat belum bersedia untuk terbuka menerima perspektif gender yang berbeda, kepentingan strategis perempuan masih sulit untuk diwujudkan.

4. Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah RW 13 Cipinang Melayu dapat berlanjut karena adanya aspek-aspek sebagai berikut:
 - (1) Dukungan finansial dan pembangunan sarana pengelolaan sampah melalui kemitraan dengan swasta dan pemerintah;
 - (2) Kompetisi antarwilayah sebagai stimulus awal membangun rasa kepemilikan (*sense of belonging*) warga atas lingkungan tempat tinggal mereka;
 - (3) Internalisasi nilai-nilai lingkungan ke dalam norma sosial masyarakat;
 - (4) Partisipasi masyarakat yang didorong oleh rasa kepemilikan dan kepatuhan atas nilai sosial;
 - (5) Kaderisasi untuk menjamin kelanjutan generasi penerus kegiatan;
 - (6) Peran perempuan menikah yang memiliki mata pencaharian dengan waktu yang fleksibel sebagai kader lingkungan; serta
 - (7) Evaluasi dan pengawasan rutin dari berbagai pihak.

5.2. Saran

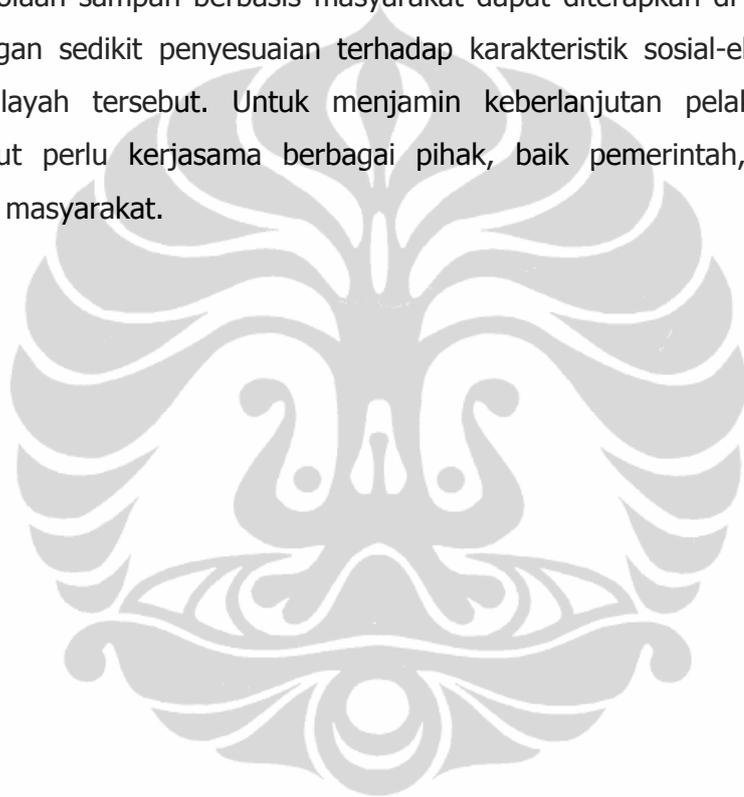
Mengingat sampah rumah tangga adalah hasil sampingan dari kegiatan manusia, maka campur tangan manusia untuk mengatasi permasalahan yang timbul darinya sangat diperlukan. Sesuai dengan hasil penelitian ini, maka secara konseptual dapat disusun beberapa rekomendasi mengenai penerapan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah lainnya, yaitu:

1. Bagi pembuat kebijakan dan sektor swasta (melalui kegiatan CSR korporasi), perlu memberikan dukungan finansial dan pembangunan sarana pengelolaan sampah melalui kemitraan yang dijalin dengan suatu unit komunitas akar rumput, baik dasa wisma, RT, ataupun RW. Untuk menjamin keberlanjutan atas hasil kemitraan tersebut, harus ada upaya untuk membangkitkan rasa kepemilikan para anggota komunitas terhadap wilayah tempat tinggal mereka melalui penyelenggaraan kompetisi antarwilayah.

2. Bagi pemimpin komunitas, rasa kepemilikan warga dapat dibangkitkan dengan mengadakan kompetisi intrawilayah. Selain itu, pemimpin juga perlu menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan hidup ke dalam nilai-nilai sosial yang ada di dalam komunitasnya, untuk mengubah persepsi warga menjadi lebih sadar lingkungan hidup. Rasa kepemilikan dan kepatuhan akan norma sosial di lingkungannya akan membuat warga terdorong untuk terlibat langsung di dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tempat tinggalnya. Untuk menjamin keberlanjutan partisipasi dari generasi yang akan datang, pemimpin harus terus aktif melakukan kaderisasi yang difokuskan pada generasi yang lebih muda. Kader memiliki peran yang sangat besar dalam menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan hidup di dalam masyarakat.
3. Bagi warga perempuan, terlibat aktif di dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayah tempat tinggalnya dapat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan praktis mereka, antara lain kesehatan keluarga, kebersihan dan kenyamanan tempat tinggal, serta pendapatan tambahan. Meskipun kegiatan ini belum dapat sepenuhnya membantu perempuan mencapai kepentingan strategisnya, yaitu mencapai kesetaraan gender, perempuan masih berkesempatan untuk aktualisasi diri dan memenuhi kebutuhan untuk bersosialisasi.
4. Bagi seluruh pihak, diperlukan pengawasan dan evaluasi rutin menyangkut kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah masing-masing. Pengawasan dan evaluasi yang baik adalah memastikan bahwa kegiatan tersebut dijalankan sesuai dengan perencanaan, peraturan pemerintah, dan prinsip kelestarian lingkungan hidup. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara kunjungan dari pihak luar wilayah, publikasi oleh media, dan pengawasan rutin oleh kader lingkungan di wilayah tersebut. Adapun evaluasi dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin warga komunitas tersebut, diskusi terbuka dari berbagai pihak yang terkait, dan penerapan sanksi sosial kepada mereka yang melanggar.
5. Bagi seluruh pihak, kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat harus dikembangkan secara serius menjadi kegiatan produksi yang mendatangkan keuntungan yang tetap bagi kader dan warga secara umum, bukan lagi

hanya menjadi usaha sampingan warga. Kegiatan ini sangat potensial sebagai sarana pemenuhan kebutuhan praktis perempuan, karena mampu memberikan penghasilan tambahan dan sarana bermasyarakat yang baik bagi pengembangan diri perempuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemasaran yang baik dan meluas, antara lain dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet, dan peningkatan kualitas produksi, misalnya dengan kontrol kualitas yang lebih ketat dan inovasi bisnis yang lebih menarik.

Kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat diterapkan di wilayah manapun, dengan sedikit penyesuaian terhadap karakteristik sosial-ekonomi-geografis di wilayah tersebut. Untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Ackelsberg, M. 1988. "Communities, resistance, and women's activism: Some implications for a democratic policy," dalam Ann, B. dan M. Sandra (ed.). *Women and the politics of empowerment*. Temple University Press, Philadelphia.
- Acker, J. 1995. "Feminist goals and organizing practices," dalam Feree, M.M. dan P.Y. Martin (Eds.). *Feminist organizations: Harvest of the new woman's movement*. Temple University Press, Philadelphia.
- Alston, M. dan W. Bowles. 1998. *Research for social worker: Introduction to methods*. Allen and Unwin Pty.Ltd., Canberra.
- Ascher, W. 1995. *Communities and sustainable forestry in developing countries*. ICS Press, San Francisco.
- Bernard, J. 1981. *The female world*. Free Press, New York.
- Bhide, A.D. dan B.B.Sundaresan. 1984. "Street cleansing and waste storage and collection in India," dalam Holmes, J.R. (Ed.). *Managing solid waste in developing countries*. John Wiley & Sons, New York.
- Bretherton, C. 1996. "Gender and environmental change", dalam Vogler, J. dan M.F. Imber, *The environment and international relations*. Routledge, London.
- Cointreau, S.J., C.G. Gunnerson, J.M. Huls, dan N.N Seldman. 1985. *Integrated resource recovery: Recycling from municipal refuse – A state-of-the-art review and annotated bibliography*. UNDP Project Management Report Number 1. The World Bank, Washington D.C.
- Collins, P.H. 2000. *Black feminist thought: Knowledge, consciousness, and then politics of empowerment, 2nd edition*. Routledge, New York.
- Creswell, J.W. 1994. *Research design: Qualitative and quantitative approaches*. Sage, Thousand Oaks, CA.
- DeVault, M.L. 1991. *Feeding the family: The social organization of caring as gender work*. University of Chicago Press, Chicago.
- Djuarnani, N, Kristian, dan B.S. Setiawan. 2005. *Cara cepat membuat kompos*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Education Center for Community Organizing (ECCO). 1989. *Women on the advance: Highlights of a national conference on women and organizing*. Stony Point, New York.
- Ezzy, D. 2002. *Qualitative analysis: Practice and innovation*. Allen & Unwin, Crows Nest, New South Wales.
- Gandy, M. 1994. *Recycling and the politics of urban waste*. Earthscan, Publ.Ltd, London.
- Gelbert M, Prihanto D, dan A. Suprihatin. 1996. *Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup: Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan "Wall Chart"*. PPPGT/VEDC, Malang.
- Hadiwiyoto, S. 1993. *Penanganan dan pemanfaatan sampah*. Yayasan Idayu, Jakarta.
- Indriani, Y.H. 2000. *Membuat kompos secara kilat*. Cetakan II. Penebar Swadaya, Jakarta.

- Joseph, B. 2005. *Environmental studies*. Tim McGraw-Hill Publishing Company, Ltd, New Delhi.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2008a. *Panduan praktis pemilahan sampah*. JICA, Jakarta.
- Krueger, R. A. 1994. *Focus groups: the practical guide goes applied research* (2nd ed.). Sage Publications, Thousand Oaks.
- John Kretzmann. 2006. "Community organizing in the eighties: Toward a post-Alinsky agenda." Charles Dobson (ed.) *The citizen's handbook*. Vancouver Citizens Committee, Vancouver.
- McCormack. 1980. "Nature, culture, and gender: A critique," dalam McCormack, C. dan M. Stathern (ed.). *Nature, culture and gender*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Miles, M. dan A. Huberman. 1994. *An expanded Source Book: Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). Sage Publications, London.
- Mellor, M. 1997. *Feminism and ecology*. Polity Press, Cambridge.
- Muta'ali, L. 2003. *Peran wanita dalam pengelolaan sampah di perkotaan* (Studi kasus kota Yogyakarta). Lembaga Penelitian UGM, Yogyakarta.
- Ostrom, E., 1990. *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press, U.S.A.
- Patton, M. Q. 1990. *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.). Sage Publications, Newbury Park, CA.
- Potter, R.B. dan S. Lloyd-Evans. 1998. *The city in the developing world*. Longman, Harlow.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B. and E. Wangari. 1996. "Gender and Environment: A Feminist Political Ecology Perspective," dalam Rocheleau, D. dan B. Thomas-Slayter. *Feminist Political Ecology*. Routledge, London.
- Seager, J. 1993. *Earth follies: coming to feminist terms with the global environment crisis*. Routledge, New York.
- Shikaze, K. 1991. "Solid Waste Management – Issues, Priorities and Progress," dalam Haight, M.E. (ed.) *Municipal Solid Waste Management: Making Decisions in the Face of Uncertainty*. University of Waterloo Press, Waterloo.
- Shiva, 1989. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. Zed Books, London.
- Simamora, S., Salundik, S. Wahyuni, dan Surajudin. 2006. Membuat biogas pengganti bahan bakar minyak dari kotoran ternak. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Sontheimer, S. (ed.) 1991. *Women and environment*. Earthscan, London.
- Sutanto, R. 2002. Penerapan pertanian organik. Kanisius, Yogyakarta.
- World Bank. 2001. *Engendering development: Through gender equality in rights, resources, and voice*. Oxford University Press, New York.
- Yin, R. 1994. *Case study research: Design and methods* (2nd ed.). Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Jurnal/Surat Kabar:

- Agarwal, B. 1992. "The gender and environment debate: Lessons form India." *Feminist Studies* 18.
- Bisnis Indonesia, 13 November 2008.

- Dominelli, L. 1995. "Women in the community: Feminist principles and organizing in community work." *Community Development Journal* 30(2).
- Douglas, M., Lee, Y.S., dan K. Lowry. 1994. "Urban poverty and environmental management in Asia." *Asian Journal of Environmental Management* 2(1).
- Gilligan, C. 1977. "In a different voice: Women's conceptions of self and morality." *Harvard Educational Review* 47.
- Jurnal Nasional, 8 Maret 2010.
- Kant, S. dan A.Berry. 2001. "A theoretical model of optimal forest resource regimes." *Journal of Theoretical and Institutional Economics* 157.
- Kastaman, R. 2004. *Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat*. Pikiran Rakyat, 13 Mei 2004.
- Martin, P.Y. 1990. "Rethinking Feminist Organizations." *Gender & Society* 4:2, June 1990.
- Mwangi, S.W. 2000. "Partnerships in urban environmental management: An approach to solving environmental problems in Nakuru, Kenya." *Environment and Urbanization* 12(2).
- Trochim, W. 1989. "Outcome pattern matching and program theory". *Evaluation and Program Planning*, 12(4).

Tesis/Hasil Penelitian:

- Anschütz, J. 1996. *Community-based Solid Waste Management and Water Supply Projects: Problems and Solutions Compared – a survey of the literature*. Urban Waste Expertise Programme (UWEP) Nieuwehaven. UWEP Working Document 2.
- Artiningsih, N.K.A. 2008. *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang)*. Tesis. Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bulle, S., 1999. *Issues and Results of Community Participation in Urban Environment: Comparative Analysis of Nine Projects on Waste Management*. Urban Waste Expertise Programme (UWEP) Nieuwehaven. UWEP Working Document 11.
- Djatmiko, W. 2009. *Strategi pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir Bantargebang, Bekasi*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Handayani, R.D. 2008. *Pengelolaan sampah rumah tangga perkotaan berbasis masyarakat*. Tesis. Program Magister studi pembangunan Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Khan, M.A. 2000. *Planning for and monitoring of project sustainability: A guideline of concepts, issues, and tools*. Monitoring and Evaluation News.
- Kristiyanto, T. 2007. *Pengelolaan persampahan berkelanjutan berdasarkan peran saerta masyarakat kota Kebumen*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kusumastuti, D.S.R. 2003. *Kajian manfaat biaya pengolahan sampah terpadu skala kawasan (Studi kasus di TPS Rawa Kerbau, Jakarta Pusat)*. Tesis. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

- Mockler, M. 1998. *Community-based solid waste management in Indonesia*. Background Paper for World Bank, Jakarta.
- Moningka, L. 2000. *Community participation in solid waste management factors favouring the sustainability of community participation: A literature review*. UWEP Occasional Paper.
- Noorkamillah. 2005. *Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah padat berbasis masyarakat: Studi di kampung Sukunan, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta*. Tesis. Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sukaedi, U. 1996. *Faktor-faktor penentu kualitas pengelolaan sampah padat rumah tangga (Studi kasus masyarakat permukiman kumuh di Kelurahan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara)*. Tesis. Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tobing, ISL. 2005. *Dampak sampah terhadap kesehatan lingkungan dan manusia*. Makalah pada Lokakarya "Aspek lingkungan dan legalitas pembuangan sampah serta sosialisasi pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku pembuatan kompos" kerjasama Universitas Nasional dan Dikmenti DKI, Jakarta.
- Wardhani, C. 2004. *Partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah rumah tangga (Studi kasus di Kampung Banjarsari, Cilandak, Jakarta Selatan)*. Tesis. Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.

Terbitan terbatas:

- BPS Provinsi DKI Jakarta. 2009. *Keadaan ketenagakerjaan DKI Jakarta 2009*. No. 44/12/31/Th. XI, 1 Desember 2009.
- Departemen Pekerjaan Umum. *SKSNI 19-2454-2002: Tata cara pengelolaan teknik sampah perkotaan*. Yayasan LPMB, Bandung.
- Darto, K.A, E. Setyaningrum, B. Hakim, I. Yudiarti, D.H.Kodri, A. Reinaldo, A. Saiful, L. Amanah. 2007. *Kisah sukses pengelolaan persampahan di berbagai wilayah di Indonesia*. Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Ismansyah. 2009. *Kriteria teknis pembangunan dan operasional TPA sampah*. Standar Nasional Indonesia (SNI) bidang persampahan Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Stalker, P. 2008. *Let Speak Out for MDGs: Achieving the Millennium Development Goals in Indonesia*. TARGET MDGs Project.
- UNESCO. 2003. *UNESCO gender lens: Development of terms of reference of UNESCO surveys and research*. UNESCO.
- World Commission on Environment and Development (WCED). 1987. *Our common future*. Oxford University Press, Oxford.

Undang-Undang/Peraturan:

- Keputusan Menteri Kesehatan No.852/Menkes/ SK/IX/2008/2008
- Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah

Situs Internet:

- ACT. 2007. *Dari JGC menuju IGC (Indonesia Green and Clean)*.
<http://act.eramuslim.com/berita/detail/272/-jgc-menuju-igc-indonesia-green-and-clean.htm>. 12 Januari 2011, pukul 21.14 WIB.
- Arifin, M. 2009. *Pengorganisasian dan pengembangan masyarakat*.
<http://helpingpeopleideas.com/publichealth/pengorganisasian-dan-pengembangan-masyarakat/>. 13 Januari 2011, pukul 23.25 WIB.
- Arisyono. 2009. *Membangun CSR berbasis masyarakat*.
http://www.csrbusinessindonesia.com/2009/08/membangun-csr-berbasis-masyarakat_13.html. 16 Desember 2010, pukul 23.31 WIB.
- Asfiansyah. 2009. *Belajar dari RW 013 Cipinang Melayu*. <http://kelklandasanilir.blogspot.com/2009/01/belajar-dari-rw13-cipinang-melayu.html>. 8 Maret 2010, pukul 11.09 WIB.
- BPLHD DKI Jakarta. 2009a. *Sosialisasi UU No. 18 / 2008 tentang Pengelolaan Sampah - Balaikota Jakarta*. <http://bplhd.jakarta.go.id/beritaDetail.php?&idg=54>. 21 Desember 2010, pukul 15.27 WIB.
- BPLHD DKI Jakarta. 2009b. *Jakarta Green and Clean targetkan 500 RW*.
<http://bplhd.jakarta.go.id/beritaDetail.php?&idg=39>. 8 Maret 2010, pukul 10.25 WIB.
- BPLHD DKI Jakarta, 2010. *Apresiasi JAKARTA GREEN AND CLEAN (JGC) tahun 2010*. <http://bplhd.jakarta.go.id/beritadetail.php?&idg=98>. 12 Januari 2011, pukul 11.38 WIB.
- BPS Provinsi DKI Jakarta. 2008. *Penduduk berumur 15 Tahun ke atas menurut jenis kegiatan dan jenis kelamin, tahun 2008*.
<http://jakarta.bps.go.id/abstract/index.html>. 7 Oktober 2010, pukul 13.35 WIB.
- Budisantoso, I. 2011. *Pengelolaan sampah dan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kasus sampah di DKI Jakarta*.
<http://hukum.kompasiana.com/2011/03/15/pengelolaan-sampah-dan-kebijakan-pemerintah-dalam-penanggulangan-kasus-sampah-dki-jakarta/>. 3 Juli 2011 pukul 14.27 WIB.
- JakTV. 2010. *Kampung wisata agro Rawajati: Kampung hijau di tengah kota Jakarta*. <http://www.jak-tv.com/index.php?modul=detailnews&catID=25&key=1851>. 3 Juli 2011 pukul 13.32 WIB.
- Junaedy, E. 2009. *Penggunaan kantong plastik akan dibatasi*.
<http://www.dml.or.id/dml5/content/view/155/1/>. 5 Juli 2010, pukul 15.13 WIB.
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2008. *Gender dan lingkungan hidup*.
http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=2916:GENDER-DAN-LINGKUNGAN-HIDUP&catid=43:berita&Itemid=73&lang=en. 7 Oktober 2010, pukul 11.25 WIB.
- Kompas.com. 2009. *RW 12 Kebayoran Lama Selatan yang "Green and Clean"*.
<http://kesehatan.kompas.com/read/2009/11/10/1529384/RW.12.Kebayoran.Lama.Selatan.yang..quot.Green.and.Clean.quot>. 12 Januari 2011, pukul 20.15 WIB.

- Kompas.com. 2010. *Contohnya pengomposan di Cipinang Melayu*.
<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/12/21/11140778/Contohnya.Pengomposan.di.Cipinang.Melayu>. 22 Desember 2010 pukul 07.13 WIB.
- Kompas.com. 2010a. *Mengolah sampah kawasan ala TPST Rawasari*.
<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/04/08213492/Mengolah.Sampah.Kawasan.ala.TPST.Rawasari>. 3 Juli 2011 pukul 13.26 WIB.
- Nasir, R.Y. 2010. *Jakarta ibukota sampah Indonesia*.
<http://sosbud.kompasiana.com/2010/02/12/jakarta-ibukota-sampah-indonesia/> 5 Juli 2010, pukul 14.49 WIB.
- Nurhayati, D. 2009. *Housewives find it easy to run green business*.
<http://www.thejakartapost.com/news/2009/07/15/housewives-find-it-easy-run-green-business.html>, 8 Maret 2010, pukul 10.15 WIB.
- Republika Online. 2009a. *500 RW ramaikan Jakarta Green & Clean*
http://koran.republika.co.id/koran/0/84791/500_RW_Ramaikan_I_Jakarta_Green_Clean_I. 12 Januari 2011, pukul 11.19 WIB.
- Republika Online. 2009b. *Pemenang JGC 2009 terpilih*.
http://republika.co.id:8080/koran/123/84699/Pemenang_JGC_2009_Terpi
[lih](http://republika.co.id:8080/koran/123/84699/Pemenang_JGC_2009_Terpi). 8 Maret 2010, pukul 10.12 WIB.
- Salim, E. 2005. *Hidup dari sampah*. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0506/23/opini/1721047.htm>. 8 Maret 2010, pukul 10.18 WIB.
- Sutandyo-Buchholz, A. 2005. *How essential is Community-based Solid Waste Management in Periurban Indonesia?* <http://www.forum-urban-futures.net/files/complete%20paper.doc>. 15 Desember 2010, pukul 15.07 WIB.
- Triyono, H. 2010. *BPS: Jumlah lelaki lebih banyak ketimbang perempuan*.
<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2010/08/19/brk,20100819-272282,id.html>. 7 Oktober 2010, pukul 09.12 WIB.
- Unilever. 2008. *Grand Final "Jakarta Green and Clean 2008", apresiasi bagi warga peduli lingkungan*.
<http://www.unilever.co.id/id/aboutus/newsandmedia/siaranpers/2008/JGC.aspx>. 12 Januari 2011, pukul 20.24 WIB.
- Wibowo, A. dan D.T.Djajawinata. 2004. *Penanganan sampah perkotaan terpadu*.
www.kkpi.go.id. 19 Desember 2010, pukul 23.15 WIB.

Partisipan 1: Perangkat RT/RW

Tujuan Penelitian	Topik	Pertanyaan
Menjelaskan kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 013 Cipinang Melayu sebelum dan sesudah mengikuti program Jakarta <i>Green and Clean</i> .	1. Kondisi umum lingkungan RW 013 Cipinang Melayu	1. Bagaimana keadaan lingkungan di RW Anda sebelum dan sesudah mengikuti program?
	2. Bentuk dan struktur organisasi yang jelas dan tertulis. 3. Pengelola dan personalia yang terstruktur. 4. Tata laksana kerja yang jelas dan tertulis.	2. Bagaimana bentuk dan struktur organisasi yang mewadahi kegiatan pengelolaan sampah di RW 013? – Bagaimana pembagian kerja dalam kegiatan tersebut? – Apa saja peran Anda sebagai ketua RW 013 dalam pengelolaan sampah di sini?
	5. Proses pewadahan, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. 6. Proses penempatan, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. 7. Proses pemanfaatan dan daur ulang sampah, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah.	3. Apa saja bentuk pengolahan sampah yang dilakukan oleh warga RW 013? – Apa saja sampah yang dibuang oleh rumah tangga Anda? – Bagaimana alur pengelolaan sampah di RW 013? – Apa saja kesulitan teknis yang dihadapi oleh warga dalam pengelolaan sampah di RW 013?
	8. Sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan. 9. Dana operasional yang transparan. 10. Dana pemeliharaan yang transparan. 11. Dana investasi yang transparan.	4. Siapa yang membiayai kegiatan pengelolaan sampah di RW 013? – Kesulitan apa yang menghambat kegiatan tersebut, terkait dengan faktor pembiayaan?
	12. Adanya perubahan sikap warga terkait dengan pengelolaan sampah. 13. Perubahan perilaku warga dalam mengelola sampahnya. 14. Bentuk partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.	5. Perubahan perilaku apa saja yang Anda lihat pada tetangga Anda setelah mengikuti program? – Apa saja bentuk partisipasi yang Anda lihat dalam kegiatan pengelolaan sampah di RW Anda? – Mengapa ada warga yang tidak terlibat?
	15. Adanya peraturan pemerintah menyangkut pengelolaan sampah.	6. Apa saja regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat?

Tujuan Penelitian	Topik	Pertanyaan
Menjelaskan upaya pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh warga RW 013 Cipinang Melayu sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program Jakarta <i>Green and Clean</i> tahun 2008, 2009, dan 2010.	1. Batas wilayah yang jelas	7. Dapatkah Anda menjelaskan batas-batas wilayah RW Anda?
	2. Peraturan yang sesuai dengan kondisi setempat	8. Adakah peraturan yang dibuat oleh dan berlaku untuk komunitas RW Anda sendiri? Pertimbangan-pertimbangan apa yang muncul ketika membuat peraturan tersebut?
	3. Pengaturan pilihan kolektif	9. Bagaimana mekanisme penyusunan peraturan oleh warga? Apa saja aspirasi warga yang dimunculkan dalam peraturan tersebut?
	4. Pengawasan	10. Apa saja bentuk pengawasan yang diterapkan dalam peraturan tersebut?
	5. Penggolongan sanksi	11. Sanksi-sanksi apa saja yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut?
	6. Mekanisme resolusi konflik	12. Mekanisme seperti apa yang dijalankan oleh warga RW 013 untuk menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan kegiatan tersebut?
	7. Pengakuan atas hak untuk mengorganisasikan diri dari pemerintah.	13. Apa saja bentuk dukungan dari pemerintah dalam kegiatan tersebut? Bagaimana hubungan warga RW 013 dengan pemerintah terkait dengan kegiatan tersebut?

Partisipan 2: Fasilitator JGC

Tujuan Penelitian	Topik	Pertanyaan
Menjelaskan kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 013 Cipinang Melayu sebelum dan sesudah mengikuti program Jakarta <i>Green and Clean</i> .	1. Kondisi umum lingkungan RW 013 Cipinang Melayu	1. Bagaimana keadaan lingkungan di RW Anda sebelum dan sesudah mengikuti program?
	2. Bentuk dan struktur organisasi yang jelas dan tertulis. 3. Pengelola dan personalia yang terstruktur. 4. Tata laksana kerja yang jelas dan tertulis.	2. Bagaimana bentuk dan struktur organisasi yang mewadahi kegiatan pengelolaan sampah di RW 013? – Bagaimana pembagian kerja dalam kegiatan tersebut? – Apa saja peran Anda sebagai fasilitator dalam pengelolaan sampah di sini?
	5. Proses pewadahan, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. 6. Proses penempatan, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. 7. Proses pemanfaatan dan daur ulang sampah, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah.	3. Apa saja sampah yang dibuang oleh rumah tangga Anda? – Apa saja bentuk pengolahan sampah yang dilakukan oleh warga RW 013? – Bagaimana alur pengelolaan sampah di RW 013? – Apa saja kesulitan teknis yang dihadapi oleh warga dalam pengelolaan sampah di RW 013?
	8. Sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan. 9. Dana operasional yang transparan. 10. Dana pemeliharaan yang transparan. 11. Dana investasi yang transparan.	4. Siapa yang membiayai kegiatan pengelolaan sampah di RW 013? – Kesulitan apa yang menghambat kegiatan tersebut, terkait dengan faktor pembiayaan?
	12. Adanya perubahan sikap warga terkait dengan pengelolaan sampah. 13. Perubahan perilaku warga dalam mengelola sampahnya. 14. Bentuk partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.	5. Perubahan perilaku apa saja yang Anda lihat pada tetangga Anda setelah mengikuti program? – Apa saja bentuk partisipasi yang Anda lihat dalam kegiatan pengelolaan sampah di RW Anda? – Mengapa ada warga yang tidak terlibat?
	15. Adanya peraturan pemerintah menyangkut pengelolaan sampah.	6. Apa saja regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat?

Tujuan Penelitian	Topik	Pertanyaan
Menjelaskan upaya pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh warga RW 013 Cipinang Melayu sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program Jakarta <i>Green and Clean</i> tahun 2008, 2009, dan 2010.	1. Batas wilayah yang jelas	1. Dapatkah Anda menjelaskan batas-batas wilayah RW Anda?
	2. Peraturan yang sesuai dengan kondisi setempat	2. Adakah peraturan yang dibuat oleh dan berlaku untuk komunitas RW Anda sendiri? Pertimbangan-pertimbangan apa yang muncul ketika membuat peraturan tersebut?
	3. Pengaturan pilihan kolektif	3. Bagaimana mekanisme penyusunan peraturan oleh warga? Apa saja aspirasi warga yang dimunculkan dalam peraturan tersebut?
	4. Pengawasan	4. Apa saja bentuk pengawasan yang diterapkan dalam peraturan tersebut?
	5. Penggolongan sanksi	5. Sanksi-sanksi apa saja yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut?
	6. Mekanisme resolusi konflik	6. Mekanisme seperti apa yang dijalankan oleh warga RW 013 untuk menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan kegiatan tersebut?
	7. Pengakuan atas hak untuk mengorganisasikan diri dari pemerintah.	7. Apa saja bentuk dukungan dari pemerintah dalam kegiatan tersebut? Bagaimana hubungan warga RW 013 dengan pemerintah terkait dengan kegiatan tersebut?

Partisipan 3: Tim Pengelola Sampah

Tujuan Penelitian	Topik	Pertanyaan
<p>Menjelaskan kegiatan pengelolaan sampah yang ditampilkan oleh warga RW 013 Cipinang Melayu sebelum dan sesudah mengikuti program Jakarta <i>Green and Clean</i>.</p>	1. Kondisi umum lingkungan RW 013 Cipinang Melayu	1. Bagaimana keadaan lingkungan di RW Anda sebelum dan sesudah mengikuti program?
	2. Bentuk dan struktur organisasi yang jelas dan tertulis. 3. Pengelola dan personalia yang terstruktur. 4. Tata laksana kerja yang jelas dan tertulis.	2. Bagaimana bentuk dan struktur organisasi yang mewadahi kegiatan pengelolaan sampah di RW 013? – Bagaimana pembagian kerja dalam kegiatan tersebut? – Apa saja peran Anda sebagai anggota tim dalam pengelolaan sampah di sini?
	5. Proses pewadahan, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. 6. Proses penempatan, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah. 7. Proses pemanfaatan dan daur ulang sampah, sesuai dengan yang diatur oleh pemerintah.	3. Apa saja sampah yang dibuang oleh rumah tangga Anda? – Apa saja bentuk pengolahan sampah yang dilakukan oleh warga RW 013? – Bagaimana alur pengelolaan sampah di RW 013? – Apa saja kesulitan teknis yang dihadapi oleh warga dalam pengelolaan sampah di RW 013?
	8. Sumber pendanaan yang jelas dan berkelanjutan. 9. Dana operasional yang transparan. 10. Dana pemeliharaan yang transparan. 11. Dana investasi yang transparan.	4. Siapa yang membiayai kegiatan pengelolaan sampah di RW 013? – Kesulitan apa yang menghambat kegiatan tersebut, terkait dengan faktor pembiayaan?
	12. Adanya perubahan sikap warga terkait dengan pengelolaan sampah. 13. Perubahan perilaku warga dalam mengelola sampahnya. 14. Bentuk partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.	5. Perubahan perilaku apa saja yang Anda lihat pada tetangga Anda setelah mengikuti program? – Apa saja bentuk partisipasi yang Anda lihat dalam kegiatan pengelolaan sampah di RW Anda? – Mengapa ada warga yang tidak terlibat?
	15. Adanya peraturan pemerintah menyangkut pengelolaan sampah.	6. Apa saja regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat?

Tujuan Penelitian	Topik	Pertanyaan
<p>Menjelaskan upaya pengorganisasian masyarakat dalam pengelolaan sampah oleh warga RW 013 Cipinang Melayu sehingga dapat mempertahankan posisinya sebagai tiga besar dalam program Jakarta <i>Green and Clean</i> tahun 2008, 2009, dan 2010.</p>	1. Batas wilayah yang jelas	1. Dapatkah Anda menjelaskan batas-batas wilayah RW Anda?
	2. Peraturan yang sesuai dengan kondisi setempat	2. Adakah peraturan yang dibuat oleh dan berlaku untuk komunitas RW Anda sendiri? Pertimbangan-pertimbangan apa yang muncul ketika membuat peraturan tersebut?
	3. Pengaturan pilihan kolektif	3. Bagaimana mekanisme penyusunan peraturan oleh warga? Apa saja aspirasi warga yang dimunculkan dalam peraturan tersebut?
	4. Pengawasan	4. Apa saja bentuk pengawasan yang diterapkan dalam peraturan tersebut?
	5. Penggolongan sanksi	5. Sanksi-sanksi apa saja yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut?
	6. Mekanisme resolusi konflik	6. Mekanisme seperti apa yang dijalankan oleh warga RW 013 untuk menyelesaikan konflik yang berhubungan dengan kegiatan tersebut?
	7. Pengakuan atas hak untuk mengorganisasikan diri dari pemerintah.	7. Apa saja bentuk dukungan dari pemerintah dalam kegiatan tersebut? Bagaimana hubungan warga RW 013 dengan pemerintah terkait dengan kegiatan tersebut?

Partisipan 4: Perempuan Ibu Rumah Tangga

Tujuan Penelitian	Topik	Pertanyaan
Menjelaskan pemberdayaan perempuan ibu rumah tangga RW 013 dalam kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya.	1. Latar belakang partisipan	1. Nama, usia, pekerjaan, pekerjaan suami, pendidikan
	2. Fisik: memiliki pandangan positif mengenai kondisi fisiknya. 3. Psikologis: menyadari kelebihan & kelemahannya. 4. Atribut sosial: menyadari suatu peran sosial yang dimilikinya.	2. Bagaimana Anda melihat diri Anda sendiri? 3. Apa kekuatan/kelemahan yang Anda miliki? 4. Apa rutinitas kegiatan Anda selama satu minggu, baik di rumah maupun di luar rumah?
	5. Memandang diri sendiri sebagai orang yang kompeten. 6. Memandang diri sendiri sebagai orang yang dapat mengontrol hidupnya sendiri. 7. Memandang diri sendiri sebagai orang yang dapat melakukan hal yang ingin dilakukan.	5. Apa rutinitas kegiatan suami Anda selama satu minggu, baik di rumah maupun di luar rumah? 6. Bagaimana suami Anda menanggapi partisipasi Anda di dalam pengelolaan sampah di RW Anda?
	8. Rasa ingin tahu mengenai kondisi lingkungan hidup. 9. Reaksi terhadap kerusakan lingkungan hidup. 10. Rasa ingin tahu mengenai adanya upaya pengelolaan lingkungan tempat tinggal supaya lebih baik.	7. Apa alasan Anda hingga bersedia menjadi kader lingkungan? 8. Setelah RW Anda berhasil mempertahankan posisi tiga besar, apa yang ingin Anda capai selanjutnya?
	11. Memiliki pengetahuan mengenai pengolahan sampah di tingkat rumah tangga dan dapat mengaplikasikannya. 12. Memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan sampah di tingkat komunitas dan dapat mengaplikasikannya.	9. Apa saja bentuk sampah rumah tangga yang Anda temui di RW Anda? 10. Bagaimana cara mengelola sampah tersebut?
	13. Ikut serta dalam rapat kegiatan di RW 013 Cipinang Melayu. 14. Ikut memberikan pendapat dalam rapat kegiatan di RW 013 Cipinang Melayu. 15. Memiliki jabatan dalam struktur organisasi pengelolaan sampah	11. Apa bentuk partisipasi Anda ketika warga RW Anda melakukan perencanaan pengelolaan sampah?

	<p>16. Adanya pembagian peran dan tanggung jawab tertulis.</p> <p>17. Pembagian peran dan tanggung jawab tidak berdasarkan stereotipe gender.</p> <p>18. Kepuasan individu perempuan terhadap pembagian peran dan tanggung jawab yang ada.</p>	<p>12. Apa peran laki-laki dalam pengelolaan sampah di RW Anda?</p> <p>13. Strategi apa yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan laki-laki dalam hal tersebut?</p>
	<p>19. Perempuan ikut serta dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>20. Perempuan dan laki-laki sama-sama diberikan penghargaan jika hasil evaluasi baik.</p> <p>21. Perempuan dan laki-laki mendapatkan konsekuensi yang setara jika hasil evaluasi buruk.</p>	<p>14. Bagaimana keadaan lingkungan di RW Anda sebelum dan sesudah mengikuti program?</p>
	<p>22. Adanya nilai-nilai bersama dalam kegiatan pengelolaan sampah.</p> <p>23. Diadakannya dialog rutin menyangkut kegiatan pengelolaan sampah dan masalah yang muncul dalam kegiatan tersebut.</p> <p>24. Adanya mekanisme resolusi konflik terkait dengan kegiatan pengelolaan sampah.</p>	<p>15. Apa yang mendorong Anda untuk terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah?</p> <p>16. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari pertemuan dengan sesama kader?</p>
	<p>25. Perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap dana finansial untuk mengelola sampah.</p> <p>26. Perempuan memiliki akses dan kontrol dalam pengalokasian sumber daya manusia, seperti pekerja yang diupah, dan sebagainya.</p> <p>27. Perempuan memiliki akses terhadap pendapatan tambahan yang didapatkan dari pengelolaan sampah.</p>	<p>17. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari pembagian kerja dalam kegiatan pengelolaan sampah?</p> <p>18. Apa manfaat yang Anda dapatkan dari partisipasi Anda mengelola sampah?</p>

DAFTAR CODING

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
1.	Program dilakukan bertahap (perencanaan baik)	1	RE	3	RIW	17
2.	Tahap awal kegiatan pengelolaan lingkungan: lomba penghijauan	1	RE	0	WTN	88
3.	Pusat kegiatan Gerbang Darling: RT 4,5,6	1	RE	0	SDY	194
4.	Dari rumah dibiasakan memilah	1	TE	3	KNR	214
5.	Menyumbangkan sampahnya di bank sampah	1	TE	3	AST	187
6.	Pemulung mengotori tempat sampah	1	TE	1	AST	188
7.	Kompos digunakan sendiri dan sisanya dijual	1	TE	0	WTN	106
8.	Pengomposan berkembang dari mencacah dengan tangan menjadi menggunakan mesin	1	TE	3	KNR	210
9.	Pembiayaan (<i>finance</i>)	1	BI	3	RIW	40
10.	Modal pribadi merintis penghijauan	1	BI	2	KNR	211
11.	Modal awal pribadi untuk pengomposan cukup besar	1	BI	1	KNR	207
12.	Kegiatan Gerbang Darling lebih banyak dibiayai atas swadaya warga.	1	BI	3	SDY	205
13.	Pembiayaan awal	1	BI	3	RIW	41
14.	Pembiayaan awal: Pengolahan sampah kering	1	BI	3	RIW	42
15.	Pembiayaan awal: Pengomposan	1	BI	3	RIW	43
16.	Pembiayaan awal: Pengolahan sampah plastik multilayer	1	BI	3	RIW	44
17.	Hadiah digunakan untuk pembiayaan operasional Gerbang Darling.	1	BI	0	AST	151
18.	Biaya pengelolaan sampah cukup besar	1	BI	1	AST	153
19.	Sebelumnya gersang dan tidak tertata	2	SE	0	WTN	97
20.	RW 13 Cipinang Melayu sebelum mengikuti JGC: kotor, gersang, selokan dipenuhi sampah	2	SE	0	AST	174
21.	Sebelum JGC wilayah RW gersang	2	SE	1	YNT	216
22.	Lahan kosong digunakan untuk TPS ilegal	2	SE	0	SDY	206A

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
23.	Warga menyukai lingkungan yang bersih dan hijau	2	KR	3	WTN	90
24.	Kenyamanan tempat tinggal	2	KR	3	YNT	231
25.	Keinginan akan lingkungan yang nyaman	2	KR	3	AST	175
26.	Banyak waktu luang lebih banyak memperhatikan lingkungan tempat tinggal	2	KR	3	SDY	195
27.	Inisiatif Ibu RIW	2	JG	3	WTN	96
28.	Tujuan utama perlombaan untuk memperbaiki lingkungan, bukan mengejar	2	JG	3	SDY	193
29.	Program JGC sebagai pendorong pelaksanaan kegiatan pengelolaan	2	JG	3	SDY	198
30.	Program JGC menambah pengetahuan warga mengenai pengelolaan lingkungan	2	JG	3	AST	176
31.	Pelatihan	2	JG	3	AST	177
32.	Pelatihan pengomposan melalui JGC	2	JG	3	KNR	212
33.	Kegiatan dirintis dari dasawisma	2	KD	3	YNT	217
34.	Kaderisasi melalui dasa wisma	2	KD	3	RIW	68
35.	Kaderisasi	2	KD	3	AST	179
36.	Kader mensosialisasikan kegiatan penghijauan dan pengelolaan sampah	2	KD	3	SDY	199
37.	Sosialisasi	2	KD	3	AST	178
38.	Internalisasi nilai-nilai lingkungan	2	KD	0	RIW	16
39.	Sosialisasi terus menerus	2	KD	3	AST	155
40.	Kesabaran fasilitator dan kader	2	KD	3	RIW	15
41.	Kegagalan dalam proses kaderisasi menjadi ancaman terbesar dalam keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah mandiri	2	KD	1	AST	181
42.	Kader belum cukup berani (mandiri)	2	KD	1	RIW	30
43.	Kader belum mandiri	2	KD	1	RIW	37
44.	Percaya diri dan inisiatif masih kurang	2	KD	1	RIW	58
45.	Kader enggan memasarkan sendiri	2	KD	1	RIW	31
46.	Kader tidak dapat meninggalkan anak di rumah	2	KD	1	RIW	32
47.	Punya anak kecil	2	KD	1	ELS	235

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
48.	Kader tidak semuanya aktif	2	KD	1	RIW	52
49.	Ibu rumah tangga memiliki mobilitas rendah	2	KD	1	RIW	54
50.	Sebagian kader lingkungan adalah penduduk tidak tetap	2	KD	1	RIW	53
51.	Ingin punya rumah sendiri	2	KD	1	YNT	228
52.	Ingin memiliki rumah sendiri	2	KD	1	ELS	249
53.	Dukungan warga	2	DK	3	AST	156
54.	Semangat warga	2	DK	3	RIW	47
55.	Kesamaan visi dengan pemimpin penting.	2	DK	0	RIW	3
56.	Dukungan pemerintah tidak banyak dan tidak secara langsung.	2	DK	1	SDY	204
57.	Evaluasi rutin	2	LE	3	RIW	6
58.	Konsistensi penting	2	LE	0	RIW	18
59.	Kegiatan sinergis	2	LE	3	RIW	21
60.	Skala kecil diutamakan	2	LE	0	RIW	19
61.	Hadiah seringkali dibagikan kepada warga yang kurang mampu (Filantropis)	2	LE	3	AST	152
62.	Manajemen kurang baik	2	MJ	1	RIW	69
63.	Kurang pemasaran	2	MJ	1	DNI	134
64.	Manajemen kurang terencana dengan baik	2	MJ	1	DNI	135
65.	Pembukuan kurang terperinci	2	MJ	1	RIW	70
66.	Perputaran modal tersendat	2	MJ	1	RIW	71
67.	Pemasaran melalui internet kurang dioptimalisasikan	2	MJ	1	RIW	73
68.	Usaha Gerbang Darling bukan murni bisnis	2	MJ	1	RIW	74
69.	Kepemimpinan dan reputasi saling berkaitan	2	PM	3	RIW	24
70.	Kualitas pemimpin menjadi teladan	2	PM	3	AST	180
71.	Pemimpin menjadi teladan	2	PM	3	SDY	197
72.	Pemimpin mempersiapkan penerus	2	PM	3	SDY	203

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
73.	Kewenangan menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan diterapkannya suatu ide.	2	PM	3	RIW	45
74.	Kepemimpinan sebagai ketua RT	2	PM	3	RIW	49
75.	Kepemimpinan dalam paguyuban fasilitator JGC.	2	PM	3	RIW	48
76.	Fasilitator memiliki pengetahuan yang luas mengenai kegiatan yang	2	FA	3	RIW	25
77.	Fasilitator memberikan dorongan	2	FA	3	RIW	34
78.	Percaya pada komunitasnya	2	FA	3	RIW	10
79.	Dukungan dari berbagai pihak kepada fasilitator	2	FA	3	RIW	46
80.	Pentingnya laporan kegiatan kepada fasilitator	2	FA	0	AST	170
81.	Waktu fasilitator terbatas	2	FA	1	RIW	29
82.	Fasilitator sibuk	2	FA	1	RIW	36
83.	Jaringan sosial yang baik	2	FA	3	RIW	23
84.	Fasilitator sadar teknologi	2	FA	3	RIW	27
85.	Kelebihan fasilitator bermanfaat untuk kemajuan program	2	FA	3	RIW	28
86.	Pentingnya karakter ketua PKK yang tegas dan bertanggung jawab.	2	FA	3	AST	159
87.	Fasilitator bertanggung jawab atas kader dan kegiatan Gerbang Darling	2	FA	3	AST	171
88.	Fasilitator mendorong kader untuk berkembang	2	FA	3	AST	172
89.	Kepercayaan terhadap fasilitator	2	FA	3	YNT	227
90.	Adanya warga yang tidak mendukung (Dukungan Warga)	2	PA	1	RIW	12
91.	Warga yang tidak bersedia membayar iuran	2	PA	1	RIW	13
92.	Paradigma warga belum pro-lingkungan	2	PA	1	RIW	11
93.	Kesadaran dan kepedulian kurang	2	PA	1	RIW	14
94.	Masalah lingkungan bukan prioritas	2	PA	1	SDY	196
95.	Kurangnya sense of belonging	2	PA	1	RIW	66
96.	Kurang dapat memotivasi	2	PA	1	DNI	136
97.	Partisipasi warga masih kurang	2	PA	1	DNI	137

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
98.	Resistensi penduduk asli	2	PA	1	RIW	64
99.	Minat pemuda rendah	2	PA	1	RIW	55
100.	Letak geografis menghambat partisipasi	2	PA	1	RIW	65
101.	Letak geografis mempengaruhi partisipasi	2	PA	1	WTN	89
102.	Kesibukan di pelatihan membuat beberapa kegiatan terbengkalai	2	TE	1	WTN	84
103.	Semangat menurun	2	TE	1	RIW	72
104.	Potensi bisnis bubur kertas tidak dikembangkan	2	TE	1	WTN	85
105.	Kurang tenaga kerja	2	TE	1	WTN	86
106.	Kader sulit meneruskan karena keterbatasan tenaga fisik	2	TE	1	WTN	87
107.	Warga malas melakukan pengomposan karena dianggap merepotkan	2	TE	1	WTN	91
108.	Hasil penjualan perorangan di bank sampah dirasa sebagian warga kurang menjanjikan	2	TE	1	WTN	92
109.	Ancaman ketiadaan lahan menjadi hambatan.	2	TE	1	WTN	103
110.	Terdapat konflik antara Ketua RW lama dan warganya	2	BR	1	WTN	95
111.	Birokrasi PKK yang berbelit-belit dan tidak konsisten.	2	BR	1	RIW	78
112.	Lomba yang diselenggarakan pemerintah hanya rekayasa	2	BR	1	AST	183
113.	Pemerintah hanya memanfaatkan hasil binaan dari fasilitator.	2	BR	1	RIW	51
114.	Kader merasa dimanfaatkan oleh pemerintah	2	BR	1	AST	184
115.	Hadiah lomba banyak mendapat potongan	2	BR	1	AST	185
116.	Lebih senang lomba oleh swasta	2	BR	1	AST	186
117.	Ibu YNT adalah ibu rumah tangga	3	RT	2	YNT	219
118.	Suami bekerja di luar rumah	3	RT	2	YNT	220
119.	Waktu istri di rumah lebih banyak dari suami	3	RT	3	YNT	221
120.	Waktu istri di rumah lebih banyak	3	RT	3	ELS	232
121.	Ibu WTN lulusan SMP	3	RT	1	WTN	101
122.	Pendidikan terakhir SMP	3	RT	2	YNT	218

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
123.	Suami dan istri adalah guru	3	RT	2	DNI	130
124.	Mendampingi suami yang menjabat sebagai ketua RW (peran sebagai istri)	3	RT	3	RIW	50
125.	Diskusi antara suami dan istri diutamakan	3	RT	3	DNI	128
126.	Perbedaan tingkat pendidikan tidak mencolok	3	RT	2	DNI	129
127.	Posisi sejajar dengan suami	3	RT	3	DNI	127
128.	Perbedaan tingkat pendidikan suami dan istri tidak mencolok	3	RT	2	ELS	234
129.	Suami dominan	3	RT	1	YNT	225
130.	Dukungan suami untuk berkegiatan di lingkungan RW (Dukungan Keluarga)	3	PD	3	RIW	1
131.	Dukungan suami	3	PD	3	DNI	111
132.	Dukungan keluarga	3	PD	3	AST	146
133.	Dukungan keluarga	3	PD	3	AST	157
134.	Izin suami penting	3	PD	3	AST	190
135.	Dukungan dana dan moral dari suami	3	PD	3	AST	191
136.	Dukungan suami	3	PD	3	YNT	226
137.	Dukungan suami	3	PD	3	ELS	237
138.	Aktif sejak tahun 1983	3	RE/EV	3	RIW	2
139.	Kader yang aktif di berbagai kegiatan	3	RE/EV	3	RIW	20
140.	Aktif dalam berbagai kegiatan	3	RE/EV	3	DNI	131
141.	Aktif dalam berbagai kegiatan	3	RE/EV	3	KNR	208
142.	Aktif di lingkungan RW	3	RE/EV	3	ELS	236
143.	Aktif di kegiatan PKK/RW	3	RE/EV	3	YNT	222
144.	Ibu rumah tangga produktif : tidak melulu hanya menonton televisi di rumah.	3	RE/EV	3	AST	173
145.	Pekerjaan fleksibel	3	PD	3	AST	145
146.	Menyusun jadwal kegiatan berdasarkan prioritas	3	PD	0	AST	147
147.	Rumah tangga dan aktivitas di luar rumah seimbang	3	PD	3	ELS	238

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
148.	Kader Gerbang Darling yang aktif di JGC semuanya perempuan, sebagian besar juga aktif di PKK.	3	PR	3	WTN	93
149.	Para ibu rumah tangga mengerjakan hampir seluruh program	3	PR	3	AST	192
150.	Perempuan lebih banyak berperan daripada laki-laki	3	PR	3	SDY	201
151.	Laki-laki berperan untuk membantu pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik	3	PR	3	SDY	202
152.	Laki-laki hanya sekedar membantu	3	PR	2	WTN	94
153.	Peran laki-laki : mengerjakan pekerjaan berat	3	PR	2	AST	189
154.	Para kader Gerbang Darling menikmati berkumpul bersama rekan lainnya.	3	KO	3	WTN	82
155.	Menyenangi kegiatan berkumpul	3	KO	3	DNI	124
156.	Menyenangi kegiatan berkumpul	3	KO	3	ELS	239
157.	Perempuan menyenangi kebersamaan	3	KO	3	WTN	105
158.	Semangat kekeluargaan	3	KO	3	AST	168
159.	Rasa kekeluargaan di antara para kader	3	KO	3	ELS	243
160.	Ikatan persaudaraan di antara kader	3	KO	3	DNI	123
161.	Hubungan persaudaraan antar kader	3	KO	3	AST	144
162.	Kekompakan.	3	KO	3	DNI	110
163.	Solidaritas	3	KO	3	DNI	120
164.	Solidaritas	3	KO	3	AST	164
165.	Mengetahui kelebihan dan kekurangannya (Kesadaran Diri)	3	KS	3	RIW	22
166.	Mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri.	3	KS	3	DNI	132
167.	Mengatasi keterbatasan yang dimiliki.	3	KS	3	DNI	133
168.	Menyadari kelebihan dan kekurangan diri sendiri	3	KS	3	AST	160
169.	Semangat memperbaiki diri	3	KS	3	AST	163
170.	Pembangunan kapasitas diri	3	KS	3	AST	165
171.	Memahami kelebihan dan kekurangan rekan-rekannya	3	KS	3	AST	161
172.	Mengetahui cara menghadapi rekan-rekannya ketika potensi konflik muncul	3	KS	3	AST	162

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
173.	Mengetahui kelebihan dan kelemahan satu sama lain	3	KS	3	ELS	248
174.	Memahami satu sama lain	3	KS	3	DNI	117
175.	Belajar memahami orang lain	3	KS	3	DNI	118
176.	Saling mendukung satu sama lain	3	KS	3	ELS	245
177.	Komunitas yang solid dan inklusif	3	KO	3	AST	167
178.	Inklusif	3	KO	3	AST	154
179.	Aktif karena peduli dan menyukai kegiatan yang ia ikuti	3	KS	3	DNI	138
180.	Ikhlas dan bersyukur	3	KS	3	AST	148
181.	Religiusitas fasilitator	3	KS	3	RIW	26
182.	Religiusitas	3	KS	3	AST	149
183.	Religiusitas	3	KS	3	YNT	229
184.	Ingin bermanfaat untuk yang lain.	3	KS	3	DNI	109
185.	Ingin bermanfaat bagi orang lain	3	KS	3	DNI	114
186.	Rasa ingin bermanfaat bagi orang lain.	3	KS	3	AST	182
187.	Ingin bermanfaat bagi orang lain	3	KS	3	ELS	240
188.	Punya kepuasan sendiri	3	KS	3	DNI	112
189.	Hobi yang bermanfaat	3	ID	3	RIW	4
190.	Kegiatan pengolahan sampah mengisi waktu luang para ibu rumah tangga	3	ID	3	WTN	81
191.	Kegiatan pengelolaan sampah kering menyenangkan dan menjadi hobi .	3	ID	3	DNI	113
192.	kader menganggap pengolahan sampah kering cukup mudah	3	ID	3	WTN	79
193.	Proses belajar singkat	3	ID	3	WTN	80
194.	Kerja sosial PKK	3	KO	3	WTN	99
195.	Kegiatan sosial	3	KO	3	DNI	115
196.	Altruisme kader gerbang darling	3	KO	3	AST	143
197.	Banyak minat	3	KR	3	KNR	209
198.	Kecintaan terhadap lingkungan	3	KR	3	YNT	230

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
199.	Keingintahuan yang tinggi	3	KR	3	RIW	5
200.	Kader tidak bertujuan mendapatkan penghasilan tambahan dari Gerbang	3	KR	0	AST	150
201.	Berhak menyuarakan pendapatnya	3	RE/EV	3	RIW	7
202.	Aspirasi didengar dan ditanggapi dengan serius	3	RE/EV	3	RIW	8
203.	Jaminan keamanan	3	RE/EV	3	AST	158
204.	Rasa percaya diri	3	KS	3	RIW	9
205.	Tidak merasa rendah diri dengan perbedaan status	3	KS	3	ELS	241
206.	Tidak mempedulikan status sosial di antara para kader	3	KS	3	ELS	242
207.	Ingin mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi	3	PD	3	ELS	233
208.	Berkembang bersama-sama	3	PD	3	AST	166
209.	Ingin maju bersama-sama	3	PD	3	DNI	121
210.	Bertukar pikiran (brainstorming) untuk menyempurnakan suatu ide	3	PD	3	DNI	122
211.	Belajar bermasyarakat	3	PD	3	DNI	119
212.	Komitmen kader lingkungan	3	KO	3	AST	141
213.	Tanggung jawab kader lingkungan	3	KO	3	AST	142
214.	Menjunjung tinggi sikap bertanggung jawab	3	KO	3	ELS	244
215.	Profesionalisme	3	KO	3	ELS	247
216.	Profesionalisme penting bagi ibu DNI	3	KO	3	DNI	116
217.	Kerja keras	3	KO	3	ELS	246
218.	Manfaat menjadi juara bagi kader : mengisi acara, pelatihan, publikasi	3	PD	3	RIW	33A
219.	Manfaat menjadi juara bagi kader : kunjungan, jaringan	3	PD	3	RIW	39
220.	Banyaknya permintaan pelatihan	3	AK	3	RIW	35
221.	Pelatihan memberikan penghasilan tambahan	3	AK	3	WTN	100
222.	Kesibukan bertambah	3	PD	2	WTN	104
223.	Kebanggaan bisa mengajarkan kepada orang lain	3	PD	3	WTN	102
224.	Kader harus lebih mandiri	3	KS	0	RIW	33B

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
225.	Kader mulai belajar mandiri	3	KS	3	WTN	108
226.	Upaya untuk lebih mandiri, berinisiatif, dan kreatif	3	KS	3	AST	169
227.	Kader masih belum dapat bergerak sendiri	3	KS	1	WTN	107
228.	Kurang percaya diri	3	KS	1	YNT	223
229.	Tidak berani mengambil keputusan	3	KS	1	YNT	224
230.	Kader memberikan pelatihan	3	ID	3	WTN	83
231.	Biaya pelatihan tergantung si pengundang	3	AK	3	RIW	38
232.	Kader memberikan pelatihan kpd pemulung	3	ID	3	WTN	98
233.	Kader penerus	4	KD	0	RIW	63
234.	Pentingnya kemauan , faktor ekonomi nomor dua.	4	KD	0	RIW	67
235.	Kader dapat mempertahankan program Gerbang Darling	4	KD	0	RIW	75
236.	Perencanaan	4	LE	0	RIW	57
237.	Fokus	4	LE	0	RIW	56
238.	Fasilitator juga harus fokus	4	LE	0	RIW	60
239.	Komitmen	4	LE	0	RIW	61
240.	Rencana jangka panjang membutuhkan komitmen pelaksanaan kegiatan yang	4	LE	0	RIW	77
241.	Menghindari fitnah	4	LE	0	RIW	62
242.	Warga diharapkan lebih peduli terhadap lingkungannya	4	MA	0	DNI	139
243.	Warga diharapkan lebih banyak berpartisipasi	4	MA	0	DNI	140
244.	Pengenalan lingkungan hidup sejak dini	4	MA	0	DNI	125
245.	Potensi PAUD bagi pencapaian tujuan Gerbang Darling	4	MA	0	DNI	126
246.	Adanya kunjungan	4	KU	0	RIW	59
247.	Kunjungan membuat warga lebih terdorong untuk mempersiapkan diri.	4	KU	0	SDY	200
248.	Konsistensi dalam pemilahan sampah harus ditingkatkan	4	PI	0	SDY	206
249.	Sampah yang dibuang oleh warga ke tps berkurang	4	PI	0	KNR	215
250.	Berkembang menjadi usaha produksi	4	MA	0	RIW	76

No.	Tema	Tujuan	Kategori	Mutu	Sumber	No. Transkrip
251.	Manfaat ekonomi yang lebih besar bagi para ibu	4	MA	0	KNR	213
252.	Ingin mengembangkan kegiatan pengolahan sampah menjadi lebih	4	MA	0	ELS	250

Keterangan:

Kategori			
RE	Perencanaan	TE	Teknis
TE	Teknis	BR	Birokrasi
BI	Pembiayaan	RT	Latar belakang rumah tangga
PA	Partisipasi	PD	Kepercayaan diri
KR	Pandangan kritis	PR	Pembagian peran
JG	JGC	KS	Konsep diri
KD	Kaderisasi	KO	Pengembangan keahlian kolektif
DK	Dukungan	ID	Pengembangan keahlian individu
LE	Kelembagaan	RE/EV	Terlibat dalam perencanaan
PM	Kepemimpinan	MA	Masyarakat
FA	Fasilitator	KU	Kunjungan
PA	Partisipasi	PI	Pemilahan
MJ	Manajemen	MA	Manfaat ekonomi

Tujuan	
1	Pengelolaan sampah di RW 13 Cipinang Melayu
2	Pengorganisasian masyarakat RW 13 Cipinang Melayu
3	Peran perempuan RW 13 Cipinang Melayu
4	Pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat

Mutu	
1	Opini yang ideal
2	Fakta yang menghambat
3	Fakta yang netral
4	Fakta yang mendorong

**GAMBAR HASIL OBSERVASI:
KERJA BAKTI DI RW 13 CIPINANG MELAYU**



GAMBAR HASIL OBSERVASI: RUMAH KOMPOS



GAMBAR HASIL OBSERVASI: PENGOLAHAN SAMPAH KERING



GAMBAR HASIL OBSERVASI: BANK SAMPAH



Dibuat oleh :
Gerbang Darling
RW 013 Kelurahan Cipinang Melayu
Kecamatan Makasar
Jakarta Timur
KEPUTUSAN

Musyawarah Warga RW 013
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar
Tentang
Pengesahan Penyempurnaan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Gerakan Bangsa Sadar Lingkungan (Gerbang Darling)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Musyawarah Warga RW. 013
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar
Jakarta Timur

Menimbang :

Bahwa AD/ART sebagai Landasan Operasional Organisasi Masyarakat perlu diperkaya dengan Idealisme dan dilengkapi dengan pasal-pasal guna memperjelas serta menetapkan pelaksanaannya.

Mengingat :

1. AD/ART- Gerbang Darling.
2. Surat Pengukuhan Kelurahan No. 302/1.823.252, Tanggal 6 Juni 2008.
3. Musyawarah warga RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Tanggal 01 April 2007.

Memperhatikan :

1. Pembahasan dan perumusan dalam musyawarah warga RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
2. Persyaratan di dalam rangka Jakarta Green and Clean.
3. Keputusan musyawarah warga RW. 013 dalam butir 1.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Membuat AD/ART sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
2. Mengesahkan AD/ART Gerbang Darling sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas.
3. Maka segala sesuatu tentang pengaturan Organisasi Gerbang Darling harus berpedoman pada AD/ART sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas.
4. Memberikan kuasa kepada Ketua RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ini dalam Akta (Notaris) dan selanjutnya mengajukan permohonan pengesahan kepada Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru dalam Musyawarah Warga RW. 013 tentang AD/ART.

Ditetapkan : Di Jakarta.
Pada tanggal : 09 Juni 2008.

Musyawarah Warga RW. 013
Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar
Pimpinan Rapat.

(Lingga Arifin)
Ketua RW. 013

(_____)
Sekretaris RW. 013

(_____) (_____) (_____) (_____)
Warga Warga Warga Warga

ANGGARAN DASAR
Gerakan Bangsa Sadar Lingkungan

Daftar Isi

Mukadimah	1
-----------------	---

BAB I

Nama, Tempat kedudukan dan Waktu

Pasal 1	Nama	2
Pasal 2	Tempat Kedudukan	2
Pasal 3	Waktu Pendirian	2

BAB II

Asas, Landasan operasional dan Kedaulatan

Pasal 4	Asas	2
Pasal 5	Landasan Operasional	2
Pasal 6	Kedaulatan	2

BAB III

Visi dan Misi

Pasal 7	Visi	3
Pasal 8	Misi	3

BAB IV

Tujuan, Tugas pokok dan Usaha

Pasal 9	Tujuan	3
Pasal 10	Tugas Pokok	3
Pasal 11	Usaha	3

BAB V

Organisasi

Pasal 12	Bentuk Organisasi	4
Pasal 13	Sifat Organisasi	4
Pasal 14	Status Organisasi	4
Pasal 15	Fungsi Organisasi	4
Pasal 16	Struktur Organisasi	5
Pasal 17	Perangkat dan Wewenang Organisasi	5
Pasal 18	Lambang, Bendera, Mars, Hymne Kode Etik	5

BAB VI

Musyawara dan Rapat-rapat organisasi

Pasal 19	Musyawarah dan Rapat	5
Pasal 20	Pengambilan Keputusan	6

BAB VII

Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan

Pasal 21	Dewan Pembina	6
Pasal 22	Dewan Pertimbangan	6
Pasal 23	Dewan Kehormatan	6

BAB VIII

Keuangan

Pasal 24	Sumber Dana	6
Pasal 25	Pengelolaan Harta Kekayaan	6

BAB IX

Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Organisasi

Pasal 26	Perubahan Anggaran Dasar	7
Pasal 27	Pembubaran Organisasi	7

BAB X

Penutup

Pasal 28	Anggaran Rumah Tangga	7
Pasal 29	Ketentuan Peralihan	7
Pasal 30	Berlakunya Anggaran Dasar	7

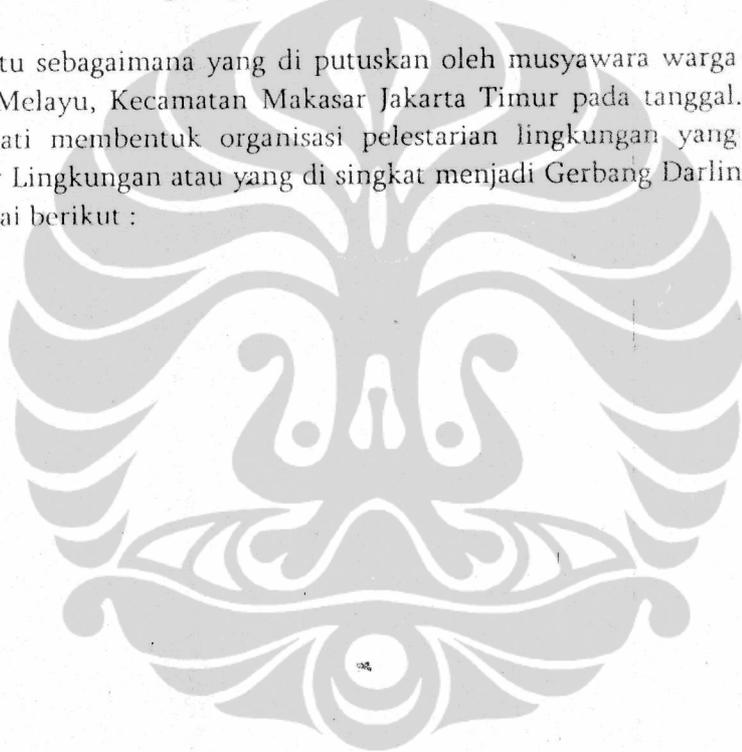
Dengan Rakhmat Tuhan Yang Maha ESA

Bahwa kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana di atur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, adalah dasar pijakan untuk memperjuangkan hak dan melaksanakan kewajiban di tengah-tengah komunitas Rakyat Indonesia dalam mewujudkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahwa lingkungan tempat tinggal adalah merupakan lingkungan yang perlu di jaga, dan perlu di buat program pelestarian lingkungan yang sistematik

Gerbang Darling bertekat untuk memprakarsai rangkaian kegiatan kebersihan, ketertiban dan keindahan lingkungan pemukiman untuk menciptakan sebuah kawasan yang hijau dan bersih (GREEN & CLEAN). Hasil yang dapat di capai adalah terbentuknya karakteristik wilaya dan sebuah lingkungan RW percontohan untuk wilaya Jakarta Timur.

Oleh karena itu sebagaimana yang di putuskan oleh musyawara warga RW 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta Timur pada tanggal. 01 April 2007, telah di sepakati membentuk organisasi pelestarian lingkungan yang bernama Gerakan Bangsa Sadar Lingkungan atau yang di singkat menjadi Gerbang Darling, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :



ANGGARAN DASAR GERBANG DARLING
(Gerakan Bangsa Sadar Lingkungan)

BAB I

Nama, Tempat kedudukan dan Waktu

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Gerakan Bangsa Sadar Lingkungan, di singkat Gerbang Darling.

Pasal 2

Tempat kedudukan

Gerbang Darling berkedudukan di RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Pasal 3

Waktu

Gerbang Darling didirikan pada tanggal, 01 April 2007, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pengesahan dari Lurah Hj. USWATUN CHASANA. S. SH, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Jakarta Timur bernomor : 302/1.823.252, tanggal 06 Juni 2008

BAB II

Asas, Landasan operasional, Kedaulatan

Pasal 4

Asas

Gerbang Darling berasaskan Pancasila dan UUD 45

Pasal 5

Landasan Operasional

Gerbang Darling berlandaskan :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No., tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Daerah Wilayah DKI Jakarta
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerbang Darling.
5. Keputusan Musyawara Warga RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur

Pasal 6

Kedaulatan

Kedaulatan Gerbang Darling ada di tangan warga RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dan di laksanakan sepenuhnya oleh Musyawara Warga.

BAB III
Visi dan Misi

Pasal 7

Visi

1. Menciptakan lingkungan wilayah RW. 013 menjadi lingkungan yang Bersih, Indah, Damai dan Sejahtera.
2. Menjadikan lingkungan wilayah RW. 013 menjadi Kampung Wisata.

Pasal 8

Misi

3. Memperkokoh organisasi Gerbang Darling agar dapat berperan di dalam melestarikan lingkungan alam
4. Turut berperan serta dalam membantu dan melaksanakan program Pelestarian alam dan budaya, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Insani.

BAB IV

Tujuan, Tugas pokok dan Usaha

Pasal 9

Tujuan

1. Menghimpun warga demi mewujudkan rasa kesetiakawanan sesama warga tanpa melihat tingkat ekonomi/sosial warga.
2. Membina dan mengembangkan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Insani dari seluruh warga RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
3. Mendorong terwujudnya tertib menjalankan hak dan kewajiban bagi seluruh warga RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
4. Menggali Kebudayaan setempat yang ada dan Kebudayaan Betawi pada khususnya.
5. Mendorong terwujudnya komunikasi yang berbasis Informasi-Teknologi di antara warga dan pejabat tingkat RT, RW, Kelurahan dan seterusnya.
6. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan, bantuan dan melindungi serta memperjuangkan kepentingan warga.

Pasal 10

Tugas Pokok

Untuk mencapai tujuan sebagaimana di maksud pada pasal 9, Tugas Pokok Gerbang Darling, meliputi bidang keorganisasian, kesejahteraan, kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 11

Usaha

Untuk tercapainya tujuan Gerbang Darling, mengadakan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan informasi program pelestarian lingkungan kepada seluruh warga RW. 013.
2. Meningkatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kepada warga RW. 013.
3. Melaksanakan program Pemerintah dengan sebaik-baiknya.
4. Memberikan penyuluhan dan motivasi kepada warga RW. 013.

5. Bekerja sama dengan organisasi sejenis di tingkat wilayah atau nasional dan internasional.
6. Menciptakan media untuk sarana komunikasi dan dialog antar warga RW. 013.
7. Meningkatkan ekonomi dan pendapatan warga dengan memanfaatkan dan memberdayakan pengolahan daur ulang, komposter dan lain sebagainya.
8. Usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Gerbang Darling.

BAB V **Organisasi**

Pasal 12 **Bentuk Organisasi**

Gerbang Darling adalah organisasi masyarakat lingkungan yang tumbuh dari keinginan warga RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Pasal 13 **Sifat Organisasi**

1. Gerbang Darling adalah organisasi yang mandiri dan independen.
 - Mandiri berarti mampu memenuhi kebutuhan sendiri.
 - Independen berarti bukan organisasi pemerintah, organisasi politik dan atau merupakan organisasi bagiannya.
2. Gerbang Darling adalah organisasi yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan alam serta pengembangannya.

Pasal 14 **Status Organisasi**

Gerbang Darling merupakan wadah dari aspirasi warga RW. 013 yang mempunyai Visi dan Misi yang sama.

Pasal 15 **Fungsi Organisasi**

1. Gerbang Darling sebagaimana di maksud pada pasal 9 ayat 1, berfungsi :
 - a. Sebagai wadah berhimpunnya warga RW. 013 yang mempunyai kesamaan Visi dan Misi.
 - b. Menampung, mamadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi warga RW. 013.
 - c. Sebagai wadah independen dalam pengembangan dan peningkatan kualitas hidup warga RW. 013.
2. Mempersatukan, menggerakkan dan mengarahkan kemampuan usaha serta kegiatan warga RW. 013 untuk mencapai tujuan bersama.
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan warga RW. 013.
4. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pelatihan, penelitian pengembangan dan pendidkan bagi warga 013.
5. Menyelenggarakan hubungan aktif dengan badan-badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi-sosial, baik wilaya nasional dan internasional yang sifatnya positif bagi warga RW. 013.
6. Memberikan penghargaan-penghargaan bagi warga yang berprestasi atau memberikan bantuan kepada anak-anak yang kurang mampu tetapi berprestasi.

Pasal 16

Struktur Organisasi dan Ketua Organisasi

1. Ketua Gerbang Darling adalah Ketua Rukun Warga (RW) 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
2. Organisasi Gerbang Darling satu-satunya, yang hanya ada di wilayah RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Pasal 17

Perangkat Organisasi dan Wewenang

1. Perangkat organisasi Gerbang Darling adalah Musyawarah Warga RW. 013, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.
2. Wewenang organisasi di atur sebagai berikut :
 - a. Musyawarah warga RW. 013 adalah merupakan kekuasaan tertinggi.
 - b. Rapat antara Ketua Rukun Tetangga dan dipimpin oleh Ketua Rukun Warga merupakan pimpinan tertinggi Gerbang Darling mewakili organisasi ini, baik keluar maupun kedalam dan bertanggung jawab penuh kepada musyawarah warga RW. 013.
 - c. Rapat RT/RW menentukan kebijaksanaan Gerbang Darling sesuai AD/ART, keputusan musyawarah warga RW. 013 serta peraturan organisasi Gerbang Darling.
 - d. Mensyahkan komposisi dan personalia pengurus Gerbang Darling.
 - e. Pengurus wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Warga RW. 013.
 - f. Melakukan segala ketentuan dan kebijaksanaan organisasi sesuai AD/ART.

Pasal 18

Lambang, Bendera, Mars, Hymne dan Kode Etik

Lambang, Bendera, Mars, Hymne dan Kode Etik Gerbang Darling akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga.

BAB VI

Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi

Pasal 19

Musyawarah

1. Musyawarah Warga RW. 013 di adakan khusus untuk :
 - a. Merubah/menyempurnakan AD/ART
 - b. Merubah/menyempurnakan pedoman ketatalaksanaan organisasi Gerbang Darling.
 - c. Merubah/menyempurnakan Logo Gerbang Darling.
 - d. Merubah/menyempurnakan dan menentukan Mars dan Hymne.
2. Rapat kerja di adakan untuk :
 - a. Mengadakan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja yang dibuat oleh pengurus berdasarkan keputusan Musyawarah Warga RW. 013.
 - b. Mengadakan inventarisasi permasalahan organisasi dan masalah penting lainnya serta menetapkan kebijaksanaan dan keputusan penyelesaian masalahnya.

Pasal 20

Pengambilan Keputusan

1. Semua keputusan dalam musyawarah dan rapat-rapat ditetapkan atas dasar musyawarah atau berdasarkan suara terbanyak dari peserta yang hadir dan memiliki suara.
2. Keputusan untuk maksud perubahan AD /ART di ambil berdasarkan persetujuan lebih dari 2/3 (dua pertiga) forum pada musyawarah warga RW. 013.
3. Khusus untuk maksud pembubaran organisasi Gerbang Darling, keputusan diambil berdasarkan keputusan mutlak forum pada musyawarah warga RW. 013 yang khusus diadakan untuk itu.
4. Musyawarah dan rapat di nyatakan kuorum dan sah apabila di hadiri oleh dari 1/2 (satu perdua) plus satu dari jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki suara.

BAB VII

Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Kehormatan

Pasal 21

Dewan Pembina

Dewan Pembina antara lain terdiri dari Kelurahan, Kecamatan dan Pejabat secara ex officio yang diangkat oleh musyawarah warga RW. 013.

Pasal 22

Dewan Pertimbangan

1. Dewan pertimbangan terdiri dari yang telah berjasa dalam pengembangan Gerbang Darling, diangkat oleh musyawarah warga RW. 013.
2. Jumlah dewan pertimbangan sebanyak-banyaknya 11 orang.

Pasal 23

Dewan Kehormatan

BAB VIII

Keuangan

Pasal 24

Sumber Dana

Guna membiayai kehidupan, kegiatan, pengembangan organisasi Gerbang Darling memperoleh dana dari :

1. Bantuan Pemerintah.
2. Sumbangan/partisipasi warga.
3. Penjualan hasil kreatifitas warga.
4. Sumbangan dan bantuan lain yang tidak mengikat serta usaha lain yang sah.

Pasal 25

Pengelolaan Harta Kekayaan

Ketua Rukun Warga bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh harta kekayaan Gerbang Darling.

BAB IX
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Organisasi

Pasal 26

Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan musyawarah warga RW. 013, yang diadakan khusus untuk itu dan dihadiri serta disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota yang memiliki hak suara.

Pasal 27

Perubahan Organisasi

1. Perubahan organisasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak kuorum pada musyawarah warga RW. 013, yang khusus diadakan untuk itu.
2. Apabila organisasi ini dibubarkan, maka musyawarah warga RW. 013 tersebut sekaligus menetapkan penghibahan/penyumbangan sebuah kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial.

BAB X

Penutup

Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar atau peraturan organisasi.

Pasal 29

Ketentuan Perlihan

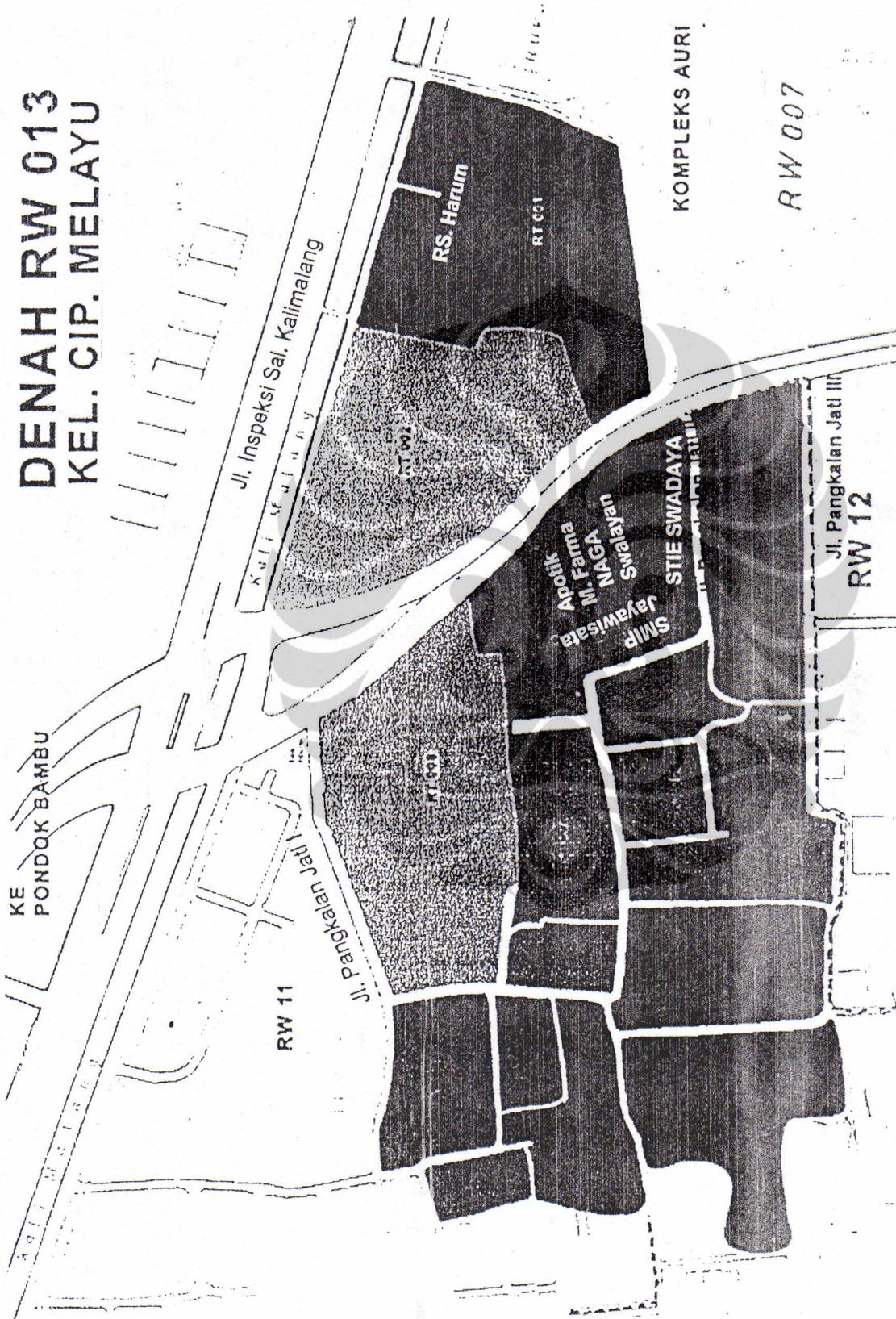
1. Peraturan-peraturan organisasi Gerbang Darling tetap berlaku selama belum ada perubahan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Ketua organisasi Gerbang Darling adalah Ketua RW. 013 terpilih dan dengan masa jabatan sesuai ketentuan dari peraturan setempat.

Pasal 30

Berlakunya Anggaran Dasar

Anggaran Dasar ini di sahkan di Jakarta, pada tanggal 2008 dalam musyawarah warga RW. 013 dan di berlakukan sejak tanggal ditetapkan.

**DENAH RW 013
KEL. CIP. MELAYU**



SUSUNAN PENGURUS JGC RW 2008
RW.013 – CIPINANG MELAYU – JAK TIM

